

# EKOWISATA

Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata



I Nyoman Sukma Arida



Fakultas Pariwisata  
Universitas Udayana

# **EKOWISATA**

**Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan  
Tantangan Ekowisata**

**I Nyoman Sukma Arida**

CAKRA PRESS  
2017

**EKOWISATA**  
**Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata**

**Penulis**

I Nyoman Sukma Arida

**Pracetak**

Slamat Trisila

**Penerbit:**

**CAKRA PRESS**

Jalan Diponegoro 256

Denpasar, Bali

Email: cakrapress@yahoo.com

Bekerja sama dengan

**Fakultas Pariwisata Universitas Udayana**

Cetakan Kedua: 2017

**ISBN 978-602-9320-85-5**

## KATA PENGANTAR

Buku ajar yang berjudul *Ekowisata; Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata* ini merupakan sebuah bentuk upaya penulis guna ikut memberikan sumbangan kecil terhadap khasanah ilmu kepariwisataan di tanah air. Materi buku ajar ini diolah dengan meramu dan menggabungkan materi skripsi dan tesis penulis, yang kebetulan keduanya mengkaji tentang ekowisata di Bali. Skripsi penulis berjudul ; *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pengembangan Ekowisata di Bali (Kasus desa Tenganan dan desa Kemenuh)*. Skripsi tersebut selesai tahun 2000 sedangkan penelitiannya berlangsung tahun 1999. Sedangkan tesis penulis berjudul *Problematik dan Strategi Pengembangan Ekowisata Banjar Kiadan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung*. Tesis ini selesai Juli 2008, sedangkan penelitiannya dilakukan dari bulan Januari sampai Juni 2008.

Pada tahun 1999 penulis mengikuti sebuah semiloka ToT (*Training of Trainner*) di Kaliurang, Jogjakarta. Saat mengikuti acara tersebut, di mana penulis masih berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir di Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), penulis merasa sangat terkesan dengan penyampaian dan cara memfasilitasi acara pelatihan dari Bapak Dr. Mansour Fakih (almarhum), seorang *trainner* handal dari INSIST Yogyakarta. Beliau memfasilitasi forum demikian mempesona sehingga tanpa sadar penulis mencerna dengan mendalam materi-materi yang beliau sampaikan, khususnya tentang pengorganisasian masyarakat. Dalam acara itu pula penulis berkenalan dengan kawan-kawan dari Yayasan Wisnu, yang sedang memulai sebuah program pengembangan ekowisata di Bali, bekerja sama dengan Yayasan KEHATI Jakarta. Penulis tertarik dengan apa yang tengah dilakukan oleh Wisnu dalam mendampingi

masyarakat desa untuk merintis pengembangan ekowisata. Kawan-kawan Wisnu-lah memberi jalan bagi penulis untuk mengadakan penelitian skripsi di salah-satu desa dampingannya, desa Tenganan.

Penulis kian berminat mendalami isu ekowisata setelah menyelesaikan kuliah S1 dengan bergabung dengan Wisnu menjadi pendamping masyarakat kurang lebih selama setahun. Dari pengalaman itu penulis semakin menyadari bahwa ekowisata akan berperan besar dalam mewarnai kepariwisataan di tanah air, khususnya di Bali. Setelah diterima menjadi dosen di PS Pariwisata Unud (tahun 2005) dan memperoleh kesempatan meneruskan studi di S2 Magister Ilmu Lingkungan Unud, penulis melanjutkan riset dengan mengambil tema penelitian tentang ekowisata. Selama melakukan riset tesis penulis menemukan kendala tentang begitu sulitnya menemukan buku referensi tentang ekowisata, khususnya yang bersumber dari dalam negeri. Begitu pula saat memberikan rujukan referensi bagi mahasiswa pada saat mengajar perkuliahan perdana mata kuliah Ekowisata, sangat terasa minimnya referensi. Mungkin karena isu ekowisata memang masih tergolong baru di Indonesia. Saat itulah penulis menanamkan tekad untuk menerbitkan hasil penelitian ke dalam bentuk buku, sesederhana apapun hasil penelitian tersebut. Penulis pernah membaca sebuah kalimat seorang filsuf, *Vox audita perit, littera scripta manet*, kata-kata yang terdengar akan lekas menghilang setelah diucapkan, tapi tulisan akan tetap abadi, selamanya.'

Dalam proses penulisan, penulis banyak mendapat mendapatkan bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. AJ Suhardjo dan M.Baiquni, MA, Ph.D, dosen-dosen pembimbing skripsi dari UGM Yogyakarta; Prof.IB Adnyana Manuaba, Dr. Nyoman Sunarta,M.Si, dan Dra Ida Ayu Alit Laksmiwati,M.Si, pembimbing dan pembahas tesis dari Program Magister Ilmu Lingkungan Unud; Drs I Putu Anom, M.Par, Plt. dekan Fakultas Pariwisata Unud yang telah

memberikan kesempatan menempuh studi S2;

Terima kasih juga kepada Udayana University Press beserta segenap staffnya yang bersedia menerbitkan buku ini, setelah melalui proses seleksi serta proses penyuntingan dari Bapak Jiwa Atmaja, sehingga buku ini dapat hadir ke hadapan sidang pembaca. Tanpa upaya keras serta dedikasi mereka, buku ini mungkin tidak akan terbit secara tepat waktu. Terima kasih pula kepada para mentor informal penulis; Pande Made Kutanegara, Ph.D dari PSKK UGM, AAGN Ari Dwipayana, M. IP dari Fisipol UGM, Ketut Sumarta dari *Sarad*, dan Gde Aryantha Soetama dari *Arti*, yang selalu memompa semangat penulis untuk terus berkarya dan berkarya.

Selain itu penulis sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dosen sejawat di Fakultas Pariwisata; Made Adi Kampana, Made Kusuma Negara, Nyoman Ariana, Made Sukana, AA Oka Mahagangga, IB Suryawan, dan lain lainnya, yang senantiasa menjadi teman diskusi yang hangat, cerdas, dan menyegarkan. Terima kasih pula kepada Ibu Ida Ayu Suryasih, M.Par, Ibu Ketut Kerti Pujani, M.Si., AA Palguna, M.Si, dan IB Astina, M.Si, dosen senior Fakultas Pariwisata yang selalu memberi motivasi dan bimbingan di sela-sela kesibukannya di kampus.

Penulis juga tidak bisa melupakan bantuan dari *key person* di desa penelitian; Ida Ayu Mas di Desa Kemenuh; Made Juta dan Made Japa di Kiadan; serta Bapak Nyoman Sadra dan Bapak Mangku (Kelihang Desa Adat Tenganan); Ir. Made Suarnata, Ambarwati Kurnianingsih, dan Denik, dari Wisnu atas kesempatannya untuk hidup di kampung-kampung dampungannya. Kepada mereka semua penulis haturkan terima kasih.

Terakhir, kepada istri sekaligus partner diskusi; Made Tisnawati, ananda Putu Bening Ambuning Wibhuti dan Made Prama Jagadisha, terima kasih atas kesabarannya 'membiarkan' penulis berkutat dengan *laptop* dalam menyelesaikan buku ini. Juga *hatursuksma* kepada orang tua penulis, ayah I Made Rajita dan ibu Ni Ketut Tamped untuk curahan kasih dan doanya

yang tak pernah berhenti kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala masukan, saran, dan kritik diharapkan untuk perbaikan di kemudian hari. Akhirnya semoga buku sederhana ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Singapadu Tengah, 27 Oktober 2017

I Nyoman Sukma Arida  
sukma.arida@gmail.com

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR PENULIS ~ iii**

**DAFTAR ISI ~ vii**

**BAB I PENDAHULUAN ~ 1**

Latar Belakang ~ 1

Fokus Kajian ~ 6

Kerangka Metodologi ~ 9

**BAB II KERANGKA PERSPEKTIF ~ 11**

Memahami Pariwisata ~ 11

Mass Tourism dan Dampaknya ~ 12

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan ~ 13

Pengertian Ekowisata ~ 15

Perkembangan Ekowisata di Indonesia ~ 26

Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat ~ 28

**BAB III POTRET TIGA DESA ~ 29**

Desa Kemenuh ~ 29

Desa Tenganan ~ 31

Desa Kiadan, Plaga ~ 37

**BAB IV DINAMIKA EKOWISATA DESA KEMENUH  
DAN TENGANAN ~ 41**

Ekowisata Kemenuh ~ 41

Ekowisata Tenganan ~ 61

**BAB V DINAMIKA EKOWISATA KIADAN, PLAGA**

Proses Perkembangan Ekowisata Kiadan ~ 89

Pengorganisasian Masyarakat ~ 92

Pemetaan Wilayah Desa ~ 95

Pembuatan Rencana Pengelolaan Ruang Kawasan  
Penyiapan Atraksi Ekowisata dan Struktur Organisasi ~ 100  
Krisis Kunjungan Wisatawan ~ 108  
Problematic Pengembangan Ekowisata ~ 115  
Kesesuaian Program dengan Kriteria Ekowisata ~124  
Analisis SWOT ~129  
Strategi Pengembangan ~133

**BAB VI EPILOG: KOMPARASI MODEL PENGEM-  
BANGAN EKOWISATA ~139**

Dari Otoritarian Menuju Partisipatif ~139  
Menuju Pendekatan Partisipatif ~ 142  
Transformasi Kesadaran Masyarakat ~ 144  
Pentingnya Pengorganisasian Masyarakat ~ 148

**DAFTAR PUSTAKA ~ 153**

**INDEKS ~ 157**

**TENTANG PENULIS ~ 160**

# BAB I

## FOKUS KAJIAN EKOWISATA

### Latar Belakang

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan World Tourism Organization (WTO), menunjukkan adanya beberapa kecenderungan dan perkembangan baru dalam dunia kepariwisataan yang mulai muncul pada tahun 1990-an. Dengan adanya kecenderungan masyarakat global, regional dan nasional untuk kembali ke alam (*back to nature*), maka minat masyarakat untuk berwisata ke tempat-tempat yang masih alami semakin besar. Adanya minat tersebut merupakan faktor pendorong bagi dikembangkannya pariwisata yang berorientasi pada lingkungan alam atau yang kita kenal sebagai ekoturisme atau wisata ekologi. Kenyataan tersebut merupakan antitesa dari kegiatan pariwisata yang berkembang selama ini yang lebih bercorak pariwisata massa (*mass tourism*).

Pariwisata massa memberikan ruang yang besar pada masuknya modal yang intensif ke dalam suatu daerah wisata dan cenderung melemahkan partisipasi masyarakat lokal. Sedangkan ekoturisme mempunyai arti dan komitmen yang lebih jelas terhadap kelestarian alam dan pengembangan masyarakat, di samping aspek ekonomi. Ekowisata mengandung perspektif dan dimensi yang baik serta merupakan wajah masa depan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kecenderungan ini ditandai oleh berkembangnya gaya hidup dan kesadaran baru akan penghargaan yang lebih dalam terhadap nilai-nilai hubungan antar manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Perkembangan baru tersebut secara khusus ditunjukkan melalui bentuk-bentuk keterlibatan

wisatawan dalam kegiatan-kegiatan diluar/lapangan (*out-door*), kepedulian akan permasalahan ekologi dan kelestarian, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta penekanan dan penghargaan akan nilai-nilai estetika. Kesadaran mengenai fenomena-fenomena tersebut di atas mendorong pemerintah untuk mencari bentuk baru bagi pengembangan produk wisata yang mampu menjawab tantangan yang ada, yaitu bahwa pengembangan produk wisata untuk waktu-waktu yang akan datang harus berorientasi pada nilai-nilai pelestarian lingkungan dan budaya masyarakat, pengembangan masyarakat lokal (*community based tourism*), termasuk di dalamnya memberi nilai manfaat yang besar bagi masyarakat serta keuntungan/orientasi jangka panjang.

Selama ini pengukuran keberhasilan sektor pariwisata seringkali hanya disandarkan pada besarnya perolehan devisa negara dalam rentang waktu tertentu dalam sektor tersebut atau seberapa besar jumlah pembangunan hotel dengan berbagai tingkatannya, perluasan jumlah lapangan golf dan taman rekreasi, serta besarnya angka kunjungan wisatawan setiap tahunnya, terutama wisatawan mancanegara.

Merujuk kembali gagasan utama pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, dan menjadikan kehidupan mereka lebih baik, maka makna pada tingkatan praksis perlu ditafsirkan secara luas, dan bukan hanya bersifat ekonomis. Apakah kebijakan yang diambil mulai dari taraf perencanaan sampai operasionalisasi betul-betul telah memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, baik dalam dimensi sosial, ekonomi maupun budaya. Inilah salah satu hal terpenting yang perlu dikedepankan ketika membahas tentang industri pariwisata. Pariwisata hendaknya juga mampu mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Pendapat ini dikemukakan mengingat dalam kehidupan sosial di Indonesia kini penafsiran berbagai kegiatan didominasi oleh pandangan yang berorientasi pada pembangunan semata

(*development oriented*). Sehingga tidak jarang pembangunan yang menekankan kepentingan masyarakat (*people oriented*) terlewatkan dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) terabaikan.

Kenyataan ini telah menumbuhkan kesadaran para pembuat kebijakan dan elemen-elemen kritis dalam masyarakat akan pentingnya pengembangan pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan (*ecologist*) dan berbasis pada kemampuan masyarakat lokal. Pergeseran orientasi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran bahwa pengembangan kepariwisataan perlu disesuaikan dengan konteks pembangunan pada masa sekarang ini, yang harus dikaitkan dengan isu lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal serta pembangunan yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan menjadi isu pokok yang harus mendasari arah pembangunan pada berbagai sektor, termasuk di dalamnya sektor pariwisata.

Kecenderungan ini ditandai oleh berkembangnya gaya hidup dan kesadaran baru akan penghargaan yang lebih dalam terhadap nilai-nilai hubungan antar manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Perkembangan baru tersebut secara khusus ditunjukkan melalui bentuk-bentuk keterlibatan wisatawan dalam kegiatan-kegiatan di luar (*out-door*), kepedulian akan permasalahan ekologi dan kelestarian, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta penekanan dan penghargaan akan nilai-nilai estetika. Kesadaran mengenai fenomena-fenomena tersebut di atas mendorong pemerintah untuk mencari bentuk baru bagi pengembangan produk wisata yang mampu menjawab tantangan yang ada, yaitu bahwa pengembangan produk wisata untuk waktu-waktu yang akan datang harus berorientasi pada nilai-nilai pelestarian lingkungan dan budaya masyarakat, pengembangan masyarakat lokal (*community based tourism*), termasuk di dalamnya memberi nilai manfaat yang besar bagi masyarakat serta keuntungan/orientasi jangka panjang.

Di samping faktor di atas, pengembangan ekowisata

di Indonesia memiliki prospek yang baik karena didukung oleh potensi keanekaragaman hayati – termasuk di dalamnya keanekaragaman budaya—merupakan modal dasar bagi pengembangan ekowisata. Seluruh dunia pun telah sepakat dan mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang pantas menyandang julukan megabiodiversity, karena keanekaragaman suku, adat, istiadat, budaya, bahasa, ekosistem, spesies flora dan fauna. Keanekaragaman tersebut memiliki pesona yang dapat dinikmati wisatawan dari seluruh penjuru dunia.

Provinsi Bali sebagai daerah tujuan utama kunjungan wisata di Indonesia juga tidak bisa lepas dari pengaruh tersebut. Dalam perkembangan terakhir, seiring dengan era Reformasi, desakan dari berbagai pihak agar pemerintah daerah merubah kebijakan pembangunan di bidang pariwisata semakin meluas. Kebijakan pariwisata selama ini yang hanya berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan (*mass tourism*) dinilai telah mengancam kelestarian lingkungan Bali, baik lingkungan fisik maupun budaya. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan selama ini, seperti kasus pembangunan Bakrie Nirwana Resort (BNR) di Tabanan yang telah mencemari kesucian Pura Tanah Lot., kasus reklamasi Pulau Serangan oleh *Bali Turtle Invoironment Development* (BTID), kasus Lapangan Golf Selasih, Payangan, dan berbagai kasus lainnya.

Diakui atau tidak motto pariwisata budaya yang selama ini dilekatkan pada kepariwisataan Bali hanya sekedar jargon. Dalam kenyataannya pariwisata Bali telah berdampak pada peminggiran penduduk lokal, pembebasan tanah secara paksa untuk pembangunan hotel dan lapangan golf, dan kerusakan ekosistem darat, sungai, dan laut telah menjadi fakta sehari-hari.. Singkatnya *mass tourism* yang selama ini diterapkan lebih banyak berdampak negatif daripada positif.

Berawal dari kondisi keprihatinan tersebut dan harapan untuk membuat kegiatan pariwisata yang lebih sehat dan bermanfaat untuk masyarakat Bali maka beberapa pihak mulai

merintis Wisata Ekologi (*Ecotourism*) di Bali, misalnya SUA BALI, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata, pada tahun 1991 mulai mengembangkan Desa Ekowisata di Desa Kemenuh, Kabupaten Gianyar. Usaha-usaha ini semakin berkembang, terutama digerakkan oleh kalangan LSM/NGO dan gerakan pemerhati lingkungan di Bali, sampai akhirnya, melalui Deklarasi 5 juli 1996 di Bali, terbentuk Masyarakat Ekowisata Indonesia (MEI).

Bila melihat ke tataran praktis di lapangan, perkembangan ekowisata di Bali pada umumnya dirintis oleh kalangan NGO/LSM (*Non Government Organisation /Lembaga Swadaya Masyarakat*) yang bermain dalam wilayah isu-isu lingkungan dan budaya. Memang ada beberapa kalangan (baca: investor) yang mengklaim bahwa paket wisata yang ditawarkannya merupakan paket ekowisata, namun realitasnya, daerah-daerah yang dijadikan kawasan ekowisata tak lebih dari kawasan akomodasi pariwisata yang letaknya sengaja memilih wilayah-wilayah yang kaya akan potensi alamnya. Apabila dilihat dari sisi nilai konservasi dan pelibatan masyarakat lokalnya boleh dikatakan masih sangat minim. Ekowisata hanya dijadikan baju untuk menjalankan bisnis pariwisatanya di Bali.

Dalam pengembangan ekowisata di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya, hal yang penting yang perlu diperhatikan adalah keikutsertaan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan kepariwisataan. Konsep pengembangan wisata ekologi yang melibatkan atau mendasarkan kepada peran serta masyarakat (*community-based ecotourism*) pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang menjadi obyek dan daya tarik wisata ekologi untuk mengelola jasa-jasa pelayanan bagi wisatawan seperti penginapan, pemandu wisata, penyediaan cinderamata khas yang berasal dari budaya dan flora-fauna setempat, dan lain-lain.

Berdasarkan paparan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu adanya kecenderungan pergeseran proses

perencanaan pariwisata Bali, yaitu dari pola *top-down* ke arah yang lebih *bottom-up*, dari peran partisipasi masyarakat lokal yang sebelumnya terpinggirkan menjadi lebih mengutamakan pelibatan masyarakat lokal. Dalam tataran konseptual hal ini tidak terlalu sulit dilakukan namun bila hal ini dilihat dalam tataran operasional-praksis kita akan menemukan fenomena-fenomena dan gejala-gejala geografi perencanaan yang sangat menarik untuk diteliti.

### **Fokus Kajian**

Perkembangan Ekowisata di Bali sebagai suatu bagian logis dari pembangunan yang berkelanjutan, memerlukan pendekatan berbagai disiplin ilmu, perencanaan yang hati-hati (baik secara fisik maupun pengelolaan) dan pedoman-pedoman serta peraturan tegas yang dapat menjamin pelaksanaan yang berkelanjutan.

Perencanaan Ekowisata yang bersifat regional terpadu dan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian alam dan lingkungan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berperan serta secara aktif dalam kegiatan ekowisata, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, hingga tahap monitoring. Dengan demikian kegiatan ekowisata harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar daerah tujuan ekowisata. Dalam banyak kasus, ekoturisme telah menimbulkan sejumlah permasalahan ketimbang menghasilkan keuntungan yang cukup seperti tujuannya, misalnya timbulnya kerusakan ekologi, pengaruh negatif terhadap kebudayaan lokal dan timbulnya kesulitan ekonomi setempat (Ceballos-Lascurain, 1991, West and Brechim, 1991).

Ada sejumlah alasan yang dapat menerangkan mengapa program ekowisata di suatu kawasan mengalami kegagalan. *Pertama*, adalah ketiadaan kemauan politik dan komitmen pemerintah untuk menggerakkan sumber daya manusia, keuangan, kebudayaan dan moral untuk menjamin integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi dan perkembangan ekonomi (Bunting, et al, 1991). Pada kenyataannya bahwa

ekowisata sering dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar kawasan. Hal ini menyebabkan ekowisata tidak terstruktur dalam memenuhi kebutuhan setempat dan keuntungan yang diperoleh sering mengalir keluar. Padahal sebenarnya misi yang diemban oleh pengembangan ekowisata seharusnya merupakan koreksi terhadap kebijakan pembangunan pariwisata Indonesia selama masa 32 tahun terakhir, di mana dalam pendekatan pembangunan tersebut lebih bersifat *top-down*, bersifat berat sebelah dan mematikan daya kreasi masyarakat itu sendiri. Akibatnya masyarakat cenderung hanya menjadi obyek dan kurang terlibat dalam merumuskan masalah dan penyusunan kebijakan untuk dirinya sendiri.. Sehingga kebijakan yang diambil pun tidak sesuai atau bahkan tidak memecahkan persoalan, rekayasa perubahan sosial menjadi bersifat negatif.

Pada tahun-tahun belakangan ini penekanan terhadap perencanaan dan perancangan proyek-proyek ekoturisme, bukan hanya sekedar memberikan kegiatan-kegiatan ekoturisme berlangsung berdasar pada kekuatan pasar semata. Ada persetujuan yang luas akan “pentingnya perencanaan yang berhati-hati untuk menghindari sejumlah efek-efek samping yang negatif dari pariwisata”(Ceballos-Lascurain, 1991). Dalam perencanaan yang berhati-hati tersebut peranan dan partisipasi masyarakat lokal menjadi penting untuk diperhitungkan . Partipasi lokal memberi lebih banyak peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal itu berarti memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat untuk memobilisasi kemampuan mereka sendiri, menjadi pemeran sosial dan bukan subjek pasif, mengelola sumber daya, membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan ekowisata.

Sayangnya, kebanyakan proyek ekowisata (termasuk di daerah Bali) lebih menekankan pada pendekatan pewaris (*beneficiary approach*), di mana masyarakat menerima keuntungan, tetapi tidak diberi wewenang. Keputusan-

keputusan tentang proyek ekowisata, pekerjaan, dan semua tipe pembangunan yang akan dilakukan sering dilakukan jauh di luar lokasi. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam perencanaan dan penerapan proyek-proyek pariwisata alam sering mengatakan bahwa mereka memiliki komitmen kuat untuk bekerja dengan orang lokal, tetapi hanya sedikit proyek ekowisata yang dapat diidentifikasi sebagai proyek yang benar-benar partisipatif atau yang telah memulai proses-proses untuk membantu masyarakat lokal mengelola pertumbuhan dan sumber daya dengan lebih bijaksana (Wells dan Brandon, 1992)

Pengembangan ekowisata di Bali pada umumnya dipelopori oleh pihak-pihak non-pemerintah, seperti LSM dan individu-individu inovator. Pada tahun 1991 Lembaga Sua Bali merintis ekowisata pedesaan di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan mendirikan bungalow dan dalam pengelolaannya mencoba melibatkan masyarakat lokal yang sebagian besar menjadi seniman pengrajin (lukisan, ukiran). Dalam perkembangan terakhir, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bali bekerja-sama dengan Yayasan KEHATI Indonesia mencoba mendampingi beberapa desa untuk dikembangkan menjadi daerah ekowisata, salah satu contohnya yaitu desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebuah desa Bali Age (desa yang sudah eksis sejak zaman pra-Majapahit, tidak terkena pengaruh Hindu Majapahit). Desa Tenganan sejak tahun 1998 didampingi oleh Yayasan Wisnu dalam mengembangkan ekowisata.

Suatu kajian untuk melihat perkembangan proses perintisan, perencanaan, sampai tahap pengembangan ekowisata di Bali sejak tahun 1991 sampai tahun 2008 dilakukan melalui studi deskripsi komparatif antara tiga desa, yaitu, desa Kemenuh, desa Tenganan, dan desa Kiadan, Plaga. Kajian pada dua desa pertama dilakukan pada tahun 2000 dengan lebih memfokuskan kepada tahap perintisan dan perencanaan. Sedangkan tahapan pengembangan lebih

terlihat pada penelitian di desa Kiadan yang dilakukan pada tahun 2008. Faktor variasi keruangan dan variasi karakteristik ketiga desa akan menjadi bahan kajian yang amat menarik bagi sebuah penelitian yang bersifat geografi perencanaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa butir permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dan peran masyarakat dalam perencanaan ekowisata di tiga desa penelitian ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan ekowisata di tiga desa daerah penelitian ?
3. Bagaimana problematika pengembangan ekowisata di desa-desa ekowisata, khususnya desa Kiadan?
4. Bagaimana sebaiknya strategi pengembangan ekowisata di desa-desa tersebut dilakukan?

### **Kerangka Metodologi**

Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif-kualitatif. Menurut Hadari (1992), perspektif ini merupakan prosedur pemecahan dan pengungkapan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan fenomena sosial, potensi, tantangan, dan prospek dengan berbagai faktor-faktor yang melatarinya serta berdasarkan fakta-fakta yang nampak di lapangan (Hadari Winarno, 1992:63).

Perspektif yang dipakai dalam analisis penelitian ini yakni perspektif partisipatoris, dengan teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Menurut Chambers (1996), pendekatan PRA mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan, oleh karena itu harus terlibat dalam penelitian. Selanjutnya ia menyebutkan metode ini sebagai suatu pendekatan dan metode untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan, dari dengan dan oleh masyarakat desa. Beberapa teknik PRA yang diterapkan antara lain; sejarah desa, pemetaan partisipatif sederhana, transek lansekap desa, analisis kecenderungan, analisis SWOT

partisipatif, dan analisis permasalahan sebab akibat.

Sedangkan tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua tahapan; *pertama*, data sekunder diperoleh dari berbagai instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat pendamping desa ekowisata, baik yang berupa hasil studi atau riset yang dipandang relevan dengan studi ini. Metode ini dilakukan untuk memperoleh dokumen, arsip, publikasi, laporan sekunder lainnya sebagai bahan penting dan rujukan untuk langkah selanjutnya berupa pengambilan data primer di lapangan.

*Kedua*, untuk mendapatkan data primer di lapangan, dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan observasi terlibat (*participant observation*) di tiga desa lokasi penelitian. Informan yang diwawancarai diantaranya; pekerja LSM Yayasan Wisnu, pengelola Sua Bali, pengurus dan warga desa tiga desa, tokoh-tokoh kunci di masing-masing desa (*key person*), pejabat desa setempat yang berposisi sentral dalam pengambilan kebijakan dalam struktur masyarakat desa,

Selanjutnya dari data dengan dua tahapan tersebut kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan kembali sebagai bentuk analisa secara komprehensif. Analisa dan pengolahan data sekunder dan primer tersebut dilakukan dengan dua tahapan waktu; *pertama*, pada saat bersamaan dengan kegiatan pengumpulan berlangsung; dan *kedua*, dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Bogdan & Biklen, 1982). Tahapan yang pertama ini dilakukan untuk mencari fokus serta untuk memperoleh data-data awal dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan selama di lapangan. Sedangkan analisis kedua ini berfungsi untuk mengantisipasi berbagai temuan yang layak dieksplorasi lebih mendalam setelah survei di lapangan. Rangkaian alur ini ditempuh agar data dan analisa dapat dilakukan secara komprehensif, serta mampu mengkontekstualisasi antara tujuan dan target penelitian dengan berbagai kenyataan yang berkembang di lapangan.

## **BAB II**

### **KERANGKA PERSPEKTIF**

#### **Memahami Pariwisata**

**D**alam menjelajahi semesta kajian pariwisata, kita masih sulit menemukan definisi pariwisata yang jelas. Interpretasi tentang istilah pariwisata masih amat beragam dan berada dalam spektrum yang amat laus. Namun setidaknya dalam memahami pariwisata kita dapat berangkat dari tiga pengertian berikut. Pertama, pariwisata dimaknai sebagai sebuah kegiatan atau serangkaian perjalanan individu atau kelompok pada suatu tempat ke tempat lainnya untuk memperoleh kesenangan (Karyono,1997). Kedua, pariwisata dimaknai sebagai gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya (Robert McIntosh). Ketiga, pariwisata dipahami sebagai fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi maupun kebudayaan. Pendapat ini juga memandang bahwa pariwisata menyangkut bidang yang kompleks, baik ekonomi, sosial, budaya, bahkan konfihurasi sistem dunia. Oleh sebab itu dalam memahami fenomena pariwisata juga harus dipotret secara menyeluruh, dengan berragam perspektif atau sudut pandang keilmuan.

Pendapat lainnya mengartikan pariwisata merupakan kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang (Damanik, 2006).

A.J. Burkart dan S. Medlik (1987) dalam Soekadijo (2000) menyebutkan bahwa pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat di luar mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan itu.

### **Mass Tourism dan Dampaknya**

Sektor kepariwisataan menjadi trend global dalam tiga dasa warsa terakhir ini. *World Travel and Tourism Council* (WTTC) pada tahun 1998 menyebutkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia dengan pertumbuhan yang cukup besar yaitu empat persen per tahun, dan menyumbang sekitar 11,6 % pada *Gross Domestic Product* (GDP) dunia (Lindberg, 2002). Pada tahun yang sama, sektor pariwisata telah mampu menyerap 9,4 persen dari total tenaga kerja atau setara dengan 230,8 juta lapangan pekerjaan baru. Sedangkan untuk konteks Indonesia, sektor pariwisata telah menyumbang sebesar 9,27 persen dari *Gross National Product* (GNP) total pada tahun 2000, serta telah mampu menyerap 8 persen tenaga kerja (Menparada, 2000).

Fenomena hampir sama juga dialami oleh kepariwisataan Bali. Wisatawan yang datang ke Bali sejak tahun 1970-an, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada era 80-an dan tahun 90-an. Pada umumnya alasan kunjungan wisatawan ke Bali adalah karena alamnya yang masih alami, keunikan budaya masyarakat, dan keramahtamahan masyarakat. Pemerintah Bali sejak lama telah menetapkan bahwa perkembangan pariwisata Bali adalah bercorak pariwisata budaya yang dijiwai oleh spirit agama Hindu.

Namun demikian, dalam tataran realitas ternyata kebijakan pembangunan pariwisata yang telah dikembangkan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal. Berbagai pembangunan infrastruktur pariwisata seringkali berakibat kepada degradasi lingkungan dalam berbagai ranah, seperti berkurangnya ruang publik

pantai, perusakan sempadan sungai oleh pembangunan hotel atau villa, penggerusan air tanah secara berlebihan untuk lapangan golf, dan seterusnya. Sektor pariwisata menyumbang cukup besar terhadap degradasi lingkungan alam Bali, dari hulu hingga ke hilir ekosistem Bali. Selain itu magnet pariwisata tersebut juga berdampak terhadap tingginya pertambahan penduduk pendatang di Bali yang memperebutkan berbagai peluang ekonomi yang tercipta berkat berkembangnya pariwisata. Penduduk migran dengan kelas kemampuan ekonomi rendah juga ikut memberikan tekanan terhadap sumber daya Bali, khususnya didaerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan pariwisata.

Kondisi demikian akhirnya akan bermuara pada percepatan degradasi lingkungan dan budaya, antara lain: semakin berkurangnya lahan pertanian produktif, pencemaran tanah dan air, serta kerusakan lingkungan lainnya.

### **Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**

Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan oleh *The World Commissions for Environmental and Development (WCED)*, yaitu komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan, yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mempertaruhkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tujuannya adalah memadukan pembangunan dengan lingkungan sejak awal proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang strategis sampai kepada penerapannya di lapangan.

Selanjutnya dalam Agenda 21 didefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut :

*... meets the needs of present tourist and host regions while protecting and enhancing opportunities for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social,*

*and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support system (Insula, 1995)*

Mandat global memberikan sinyal bagi kegiatan pariwisata berkelanjutan seperti yang terungkap dalam pertemuan-pertemuan tingkat dunia seperti WTO (*World Tourism Organisation*) dan Agenda 21. Selain itu, Piagam pariwisata Berkelanjutan menekankan bahwa pariwisata harus didasarkan pada kriteria yang berkelanjutan yang intinya adalah pembangunan harus didukung secara ekologis dalam jangka panjang dan sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat lokal.

Sedangkan *Federation of Nature and National Parks* (1993) memberi batasan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah semua bentuk pembangunan, pengelolaan dan aktivitas pariwisata yang memelihara integritas lingkungan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan dari sumber daya alam dan budaya yang ada untuk jangka waktu yang lama.

Beberapa pengertian di atas secara umum memiliki kesamaan yang merupakan terjemahan lebih lanjut dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu kegiatan wisata dianggap berkelanjutan apabila memenuhi syarat yaitu :

1. Secara ekologis berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata.
2. Secara sosial dapat diterima, yaitu mengacu kepada kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial.
3. Secara kultural dapat diterima, artinya masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (*tourist culture*).
4. Secara ekonomis menguntungkan, artinya keuntungan

yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Manuaba (2006), ada enam permasalahan pembangunan pariwisata Bali antara lain: 1) ketatnya persaingan penggunaan sumberdaya yang terbatas, 2) tekanan terhadap lingkungan, 3) kesenjangan ekonomi antar wilayah, 4) dislokasi kultural, 5) rendahnya koordinasi manajemen, dan 6) terbatasnya permodalan lokal sehingga menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap investasi asing. Hal ini tentu menjadi permasalahan ketika mengaitkan pariwisata Bali dengan keberlanjutan pembangunan.

### **Pengertian Ekowisata**

Sekitar tahun 1980-an lahir suatu konsep *Alternative tourism* yang memberikan suatu kritikan terhadap paradigma lama tentang pariwisata. Pembangunan pariwisata pada paradigma lama cenderung merupakan pembangunan besar-besaran dengan dicirikan oleh pertumbuhan yang cepat, eksploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestariannya, dan marginalisasi kepentingan masyarakat lokal. Paradigma baru pariwisata kemudian muncul sebagai kritik terhadap segenap penyimpangan praktik pariwisata massal (*mass tourism*). Konsep baru inilah yang kemudian populer dinamakan ekowisata.

Ekowisata (Fennel, 1999:43) merupakan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah terhadap lingkungan, tidak bersifat konsumtif dan berorientasi pada lokal (dalam hal kontrol, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan usaha).

Jauh sebelumnya, Auliana Poon (1993), telah menyebutkan bahwa pariwisata masal telah membuka jalan untuk 'pariwisata baru'. Yang dimaksud dengan wisatawan baru adalah wisatawan yang lebih canggih dan

berpengalaman, yang lebih suka merencanakan perjalanan wisata mereka sendiri dan bepergian secara mandiri. Menurut Poon, wisatawan baru ini bersifat lebih spontan dan luwes dalam mengatur susunan perjalanan wisata mereka. Mereka juga lebih cenderung menyenangi obyek-obyek wisata dengan minat khusus, seperti wisata budaya, wisata berbasis alam atau wisata petualangan. Mereka lebih mementingkan pengalaman yang asli dan perjalanan singkat ke satu daerah wisata saja.

Sedangkan *World Conservation Union* (WCU, 1996) menyebutkan bahwa ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab secara ekologis, mengunjungi daerah yang masih asli (*pristine*) untuk menikmati dan menghargai keindahan alam (termasuk kebudayaan lokal) dan mempromosikan konservasi. Wood (2002) memberikan pengertian ekowisata sebagai kegiatan wisata bertanggungjawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata alam, dengan mengikutsertakan pula sebagian kegiatan wisata pedesaan dan wisata budaya. Selain itu, ekowisata juga merupakan kegiatan wisata yang dilakukan dalam skala kecil baik pengunjung maupun pengelola wisata.

Konsep pembangunan pariwisata yang memperhatikan adanya keseimbangan antara aspek kelestarian alam dan ekonomi adalah konsep ekowisata dan wisata minat khusus (Fandeli, 2002). Melalui ekowisata, wisatawan dan seluruh komponen yang terkait dengan penyelenggaraan wisata diajak untuk lebih peka terhadap masalah lingkungan dan sosial sehingga diharapkan sumberdaya alam tetap lestari dan wisatawan mempunyai apresiasi lingkungan yang tinggi. Di samping itu, masyarakat di sekitar objek pariwisata memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan pariwisata, karena wisatawan ekowisata yang datang umumnya mempunyai tujuan mencari kesempatan untuk bersatu dengan alam dan budaya lokal dengan menjauhi hiruk-pikuk suasana perkotaan

Definisi ekowisata yang dipergunakan untuk standar

internasional adalah seperti yang dipakai NEAP, serta EAA, yaitu : *“ecologically sustainable tourism with a primary focus on experiencing natural areas that foster environmental and cultural understanding, appreciation and conservation”*. (pariwisata yang berkelanjutan secara ekologi dengan fokus utama pada pengalaman pada daerah alami yang membantu meningkatkan pemahaman, apresiasi serta konservasi terhadap lingkungan serta budaya (Crabtree *et al.*2002 : 4 dalam Dalem, 2002).

Sedangkan masyarakat ekowisata internasional atau TIES (*The International Ecotourism Society*) mengartikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara melakukan konservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (*responsible travel to natural area that conserves the environment and improves the well-being of local people*, (TIES, 2000). Dari pengertian ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni: *pertama*, ekowisata sebagai produk; *kedua*, ekowisata sebagai pasar; dan *ketiga*, ekowisata sebagai pendekatan pengembangan. Sebagai produk, ekowisata merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumberdaya alam. Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.

Deklarasi Quebec secara spesifik menyebutkan bahwa ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang membedakannya dengan bentuk wisata lain. Dalam praktik hal itu terlihat dalam bentuk kegiatan wisata yang : a) secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya; b) melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pengembangan, pengelolaan wisata, serta memberikan sumbangan positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat lokal; dan c) dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam skala kecil (UNEP,2000; Heher,2003). Dengan kata lain ekowisata adalah bentuk industri pariwisata

berbasis lingkungan yang memberikan dampak kecil bagi kerusakan alam dan budaya lokal sekaligus menciptakan peluang kerja dan pendapatan, serta membantu kegiatan konservasi alam itu sendiri (Panos, dikutip oleh Ward,1997).

*Ecotourism Society* yang merupakan salah satu organisasi non profit yang dideklarasikan di Vermont mencoba mendefinisikan *ecotourism* sebagai *Responsible travel to the natural areas that conserves the environment and sustains the well being of local people* " atau seperti yang dinyatakan oleh Hector Cebalos Lascuarin sebagai *"Traveling to undisturb area or uncontaminated natural areas with a specific objective of studying , admiring and enjoying the scenery and its wild plants and animals"* ( Ceballos –Lacuarin 1987 with Sligth variation Boo, 1991). Kemudian konsep tersebut dipertegas oleh David Western (1987) dengan menyatakan bahwa ekowisata menggabungkan suatu komitmen kuat terhadap alam dan suatu rasa tanggung jawab sosial para pelancong terhadap kelestarian alam sekitar. Ekowisata juga didefinisikan sebagai hal yang menciptakan dan memuaskan suatu keinginan alam, yang berhubungan dengan mengeksplorasi potensi wisata untuk konservasi dan pembangunan, serta mencegah dampak negatifnya terhadap ekologi.

Terkait dengan hal ini From (2004) menyusun tiga konsep dasar yang lebih operasional tentang ekowisata, yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, perjalanan *outdoor* dan di alam yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam ekowisata diutamakan penggunaan sumberdaya hemat energi, seperti tenaga surya, bangunan kayu, bahan daur ulang, dan bahan lain yang ramah lingkungan. Sebaliknya dalam aktifitas ekowisata diupayakan agar tidak mengorbankan kelestarian flora dan fauna, tidak mengubah topografi lahan, misalnya dengan mendirikan bangunan yang asing bagi lingkungan dan budaya masyarakat setempat.

*Kedua*, wisata ini mengutamakan penggunaan fasilitas akomodasi yang diciptakan dan dikelola oleh masyarakat

kawasan wisata itu. Prinsipnya, akomodasi yang tersedia bukanlah perpanjangan tangan hotel internasional dan makanan yang ditawarkan juga bukan makanan berbahan baku impor, melainkan semuanya berbasis produk lokal. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan jasa pemandu wisata lokal. Oleh sebab itu wisata ini memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat lokal.

*Ketiga*, perjalanan wisata ini menaruh perhatian besar pada lingkungan alam dan budaya lokal. Para wisatawan biasanya banyak belajar dari masyarakat lokal, bukan sebaliknya menggurui mereka. Wisatawan tidak menuntut masyarakat agar menyuguhkan pertunjukan dan hiburan ekstra, namun mendorong mereka agar diberi peluang untuk menyaksikan upacara dan pertunjukan yang sudah dimiliki oleh masyarakat setempat.

Sementara itu menurut para pengamat ekowisata Indonesia, ekowisata didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan/atau daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam, dengan tujuan selain untuk menikmati keindahan, juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (G. Sudarto, 1998)

Definisi ini kemudian dijabarkan dalam lima prinsip, yaitu (1) memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan; (2) pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat; (3) memberikan manfaat kepada masyarakat setempat; (4) peka dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat setempat; serta (5) memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kepariwisataan (Anonim, 1997).

Secara umum ada kemiripan dalam definisi serta prinsip-prinsip tersebut, namun apabila dicermati, maka prinsip-prinsip ekowisata internasional lebih menonjol dalam

hal memberikan penekanan pada kepuasan konsumen serta pemasaran yang bertanggungjawab. Di samping itu unsur interpretasinya juga lebih eksplisit sehingga memberikan peluang pada mereka yang lebih mengerti, lebih mampu mengapresiasi serta lebih menikmati alam itu sendiri serta secara tidak langsung akan menggugah kesadaran akan perlunya konservasi lebih baik.

Ekowisata adalah kegiatan wisata yang bersifat khas. Dalam hal ini hanya kegiatan yang mengandung unsur "eco" saja yang dapat dikelompokkan ke dalam ekowisata, yaitu memperhatikan aspek ekologis, ekonomi dan persepsi masyarakat, bahkan secara khusus ada ahli yang mengatakan bahwa kegiatan ekowisata ini mesti melibatkan unsur pendidikan.

Secara ekologis, kegiatan ekowisata memiliki karakter ramah terhadap lingkungan. Secara ekonomis menguntungkan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat di sekitar kegiatan dilaksanakan. Di samping itu, kegiatan tersebut mesti memperhatikan pendapat pendapat masyarakat lokal. Kalau kita perhatikan prinsip-prinsip ekowisata seperti yang diakui MEI (Masyarakat Ekowisata Indonesia) sejak 1996, kegiatan ekowisata harus secara tak langsung memberdayakan masyarakat lokal.

Ekowisata merupakan salah satu bentuk wisata alternatif yang bukan semata-mata memberikan wisatawan hiburan dari alam lingkungan tetapi juga diharapkan wisatawan dapat berpartisipasi langsung untuk mengembangkan konservasi lingkungan sekaligus pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk lingkungan tersebut sehingga membentuk suatu kesadaran bagaimana harus bersikap untuk melestarikan wilayah tersebut dimasa kini dan masa yang akan datang. Wisata alam juga merupakan jenis wisata yang memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya *tracking*, bersepeda dan lain-lain. Kegiatan tidak langsung seperti piknik menikmati keindahan alam dan melihat-lihat flora dan fauna

(Siti Nurisyah dalam Lewaherilla, 2002).

Yoeti (2000) menyebutkan, bahwa ekowisata adalah suatu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan aktifitas melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial budaya etnis setempat dan wisatawan yang melakukannya ikut membina kelestarian lingkungan alam di sekitarnya dengan melibatkan penduduk lokal. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pada dasarnya ekowisata dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan kesederhanaan, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara keaslian seni dan budaya, adat istiadat, kebiasaan hidup, menciptakan ketenangan, kesunyian, memelihara flora dan fauna, serta terpeliharanya lingkungan hidup sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Konsep wisata alam didasarkan pada pemandangan dan keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa para ahli, akademisi, maupun praktisi ekowisata belum memiliki kesepakatan bulat tentang rumusan atau definisi ekowisata. Namun demikian, terdapat prinsip-prinsip ekowisata yang terdiri dari 8 prinsip utama yang bisa dijadikan pegangan, antara lain :

1. Memiliki fokus area natural (*natural area focus*) yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal serta langsung.
2. Menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam sehingga mereka menjadi lebih mengerti, lebih mampu mengapresiasi serta lebih menikmati.
3. Kegiatan terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis.
4. Memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya.
5. Memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap

masyarakat lokal.

6. Menghargai serta peka terhadap nilai-nilai budaya yang ada di wilayah tersebut.
7. Secara konsisten memenuhi harapan konsumen.
8. Dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataanya sesuai dengan harapan.

Sedangkan Eplerwood (1999) dalam Fandeli, menyebutkan ada delapan prinsip dalam pengembangan ekowisata, antara lain :

1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya. Pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat.
2. Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pensisipan ini dapat dilakukan langsung di alam.
3. Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan pajak konservasi dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas pelestarian alam.
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata, sekaligus dalam pengawasan.
5. Penghasilan masyarakat; keuntungan secara nyata terhadap terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.
6. Menjaga keharmonisan dengan alam; semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya *disharmonize* dengan alam akan merusak produk ekowisata ini. Seperti hindarkan sejauh

mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat.

7. Daya dukung lingkungan, pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dibanding daya dukung kawasan buatan. Meskipun permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi.
8. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka belanja wisatawan didorong sebesar-besarnya dinikmati oleh negara atau pemerintah daerah setempat.

Pada tanggal 3-5 September 2002 diselenggarakan pelatihan ekowisata se-Bali oleh Kantor Kementerian lingkungan Hidup dan merumuskan 9 prinsip ekowisata, yaitu

1. Memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya.
2. Menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam.
3. Memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat serta memberdayakan masyarakat setempat.
4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.
5. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dengan persetujuan masyarakat setempat.
7. Secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen.
8. Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan.
9. Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*.

Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan

definisi ekowisata yang dijelaskan oleh TIES (*The International Ecotourism Society*), yang mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang bertanggungjawab dengan cara mengonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan prinsip-prinsip ekowisata yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip ekowisata yang dihasilkan dari lokakarya Bali di atas, karena dianggap lebih sesuai untuk menganalisis kondisi ekowisata di Bali. Prinsip-prinsip ekowisata yang dirumuskan di atas sebagian besar diadopsi dari prinsip-prinsip yang ada pada TIES (*The International Ecotourism Standarts*), kecuali prinsip yang ke-9. Prinsip ini selanjutnya dijabarkan dalam kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria-kriteria untuk prinsip 1 (memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya) :
  - a. Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan
  - b. Penggunaan teknologi ramah lingkungan
  - c. Pemanfaatan areal warisan budaya sebagai objek ekowisata disesuaikan dengan daya dukung
  - d. Melestarikan keanekaragaman hayati dan cagar budaya
  - e. Memperhatikan keberadaan endemis
2. Kriteria prinsip 2 (menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam)
  - a. Menyediakan pramuwisata profesional dan berlisensi
  - b. Menyediakan fasilitas pendukung dan informasi yang memadai terkait dengan objek ekowisata.
  - c. Melibatkan lembaga adat setempat
3. Kriteria prinsip 3 (memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat serta memberdayakan masyarakat setempat) :
  - a. Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian.
  - b. Memprioritaskan pemanfaatan produk lokal untuk

- operasional objek ekowisata.
- c. Melibatkan lembaga adat setempat.
4. Kriteria prinsip 4 (peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat) :
    - a. Pembangunan dan operasional disesuaikan dengan tata krama, norma setempat dan kearifan lokal
    - b. Keberadaan dan kegiatan objek ekowisata tidak mengganggu aktivitas keagamaan masyarakat setempat.
  5. Kriteria prinsip 5 (mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku)
    - a. Mentaati undang-undang dan perangkat peraturan lainnya yang terkait.
    - b. Mentaati *awig-awig* (peraturan) desa setempat
  6. Kriteria prinsip 6 ( pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dan dengan persetujuan masyarakat setempat).
    - a. Pembangunan perlu mendapat persetujuan masyarakat dan lembaga adat setempat.
    - b. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat dan lembaga adat setempat dalam pengembangan objek.
  7. Kriteria prinsip 7 (secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen) :
    - a. Menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan prima dan memuaskan kepada konsumen.
    - b. Menyediakan media untuk memperoleh umpan balik dari konsumen.
  8. Kriteria prinsip 8 (dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan dan kenyataan) :
    - a. Materi pemasaran harus akurat, jelas dan berkualitas
    - b. Materi pemasaran yang jujur dan harus sesuai dengan kenyataan
  9. Kriteria prinsip 9 (sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana*) :

- a. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*).
- b. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia (*pawongan*)
- c. Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan (*palemahan*).

### **Perkembangan Ekowisata di Indonesia**

Ekowisata mulai menjadi isu nasional di Indonesia sejak digelarnya seminar dan lokakarya nasional yang diselenggarakan oleh *Pact-Indonesia* dan WALHI, Bulan April 1995 di Wisma Kinasih Bogor. Dalam acara tersebut dihasilkan suatu rumusan kegiatan ekowisata, bahwa masyarakat setempat harus dilibatkan dalam pengelolaan ekowisata secara proporsional. Pada bulan Juli 1996 di Bali diselenggarakan Lokakarya Nasional kedua, dalam acara tersebut terbentuk sebuah forum, yaitu Masyarakat Ekowisata Indonesia (MEI). Gerakan ekowisata nasional mencapai titik-titik tonggakinya, antara lain dengan pengembangan ekowisata di Kepulauan Seribu, di Tanjung Puting (Kalimantan), Gunung Halimun (Jawa Barat) Gunung Leuser (Sumatera) dan lain-lain.

Di Bali, upaya perintisan pengembangan ekowisata mulai dilakukan beberapa pihak, antara lain pihak masyarakat desa pakraman, pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), atau varian di antara keduanya. Yayasan Wisnu merupakan salah satu NGO yang fokus mendampingi pengembangan ekowisata di 4 desa di Bali, yaitu Desa Tenganan (Karangasem), banjar Kiadan, Pelaga (Badung), Desa Ceningan (Klungkung), dan desa Sibetan (Karangasem). Bahu-membahu berbagai pihak tersebut bekerja sama melakukan upaya pengembangan ekowisata sejak tahun 1999 hingga sekarang.

### **Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat**

Paradigma pembangunan telah bergeser dari pembangunan yang bersifat memenuhi keinginan dan ukuran kemajuan yang bertumpu pada kekuatan dari luar

telah bergeser ke paradigma yang bertumpu pada ukuran dan kekuatan diri sendiri. Pembangunan harus bersifat optimalisasi kekuatan diri sendiri serta berkelanjutan. Masyarakat setempat harus terlibat secara aktif dalam proses pembangunan yang pada hakekatnya membangun dirinya sendiri. Aktif di sini berarti ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan yang paling penting adalah yang 'menikmati' hasilnya pertama kali (Achmad Charris Zubair, 1999).

Jelas ada kompensasi yang terjadi apabila melibatkan orang-orang lokal dalam perencanaan ekoturisme. Memulai kegiatan partisipasi lokal memerlukan waktu dan energi yang banyak dan kemampuan organisasi yang baik (Katrina Brandon, 1993).

Partisipasi lokal digambarkan sebagai memberi lebih banyak peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal ini berarti memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat untuk memobilisasi kemampuan mereka sendiri, menjadi pemeran sosial dan bukan subyek pasif, mengelola sumber daya, membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupannya (Cernea, 1991). Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat di dalam proses pengembangan dirinya. Partisipasi lokal atau partisipasi masyarakat sering dipandang sekedar sebagai pembagian manfaat sosial dan ekonomi. Proses partisipatif membantu orang untuk memiliki pengawasan cukup terhadap kehidupan mereka sendiri. Pandangan partisipatif ini berbeda dengan pendekatan pewaris (*beneficiary approach*), di mana orang menerima keuntungan tetapi tidak diberikan wewenang.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam pengembangan ekowisata. Artinya, sebelum ekowisata dikembangkan harus ada upaya sadar untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi aktif dalam program. Usaha pemberdayaan masyarakat lebih

diarahkan agar masyarakat mampu membuat keputusan sendiri agar dalam pengembangan ekowisata mampu mempresentasikan inisiatifnya dan memiliki posisi tawar yang memadai ketika berhadapan dengan *stakeholders* yang lain.

Kegiatan yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat diantaranya adalah usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*). Terkait dengan hal itu, beberapa upaya bisa dilakukan misalnya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, *workshop*, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya. Segala bentuk pelatihan maupun *workshop* tersebut harus mencakup aspek peningkatan kesadaran (*awareness*), pemahaman, ketrampilan, serta profesionalisme (Deny Hidayati, dkk, 2003).

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat hal terpenting yang disosialisasikan sejak awal adalah, bahwa kegiatan ekowisata selain memberi manfaat bagi masyarakat lokal juga harus memberi kontribusi langsung bagi kegiatan konservasi lingkungan. Hal ini penting dilakukan, agar dalam mengembangkan usahanya mereka memiliki rambu-rambu konservasi yang harus dijaga, dan dalam hubungan dengan *stakeholders* lain juga dapat saling bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan konservasi.

# BAB III POTRET WILAYAH TIGA DESAEKOWISATA

## Desa Kemenuh

### *a. Letak, Luas, dan Kondisi Geografis*

**D**esa Kemenuh terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, merupakan sebuah desa yang terletak di antara pusat-pusat pariwisata di Bali Selatan (Lihat peta wilayah desa Kemenuh pada Lampiran). Sekitar 6 km ke arah barat laut dari desa Kemenuh terletak desa Ubud yang merupakan desa wisata sebagai sentra seniman lukisan tradisional Bali bercorak Pangosekan dan Nyuh Kuning. Berjejer dari Ubud ke selatan menuju Denpasar terdapat desa-desa sentra kerajinan dengan karakteristiknya masing-masing, seperti desa Mas (sentra kerajinan patung), desa Sukawati yang terkenal dengan pasar seni Sukawati, desa Celuk (sentra kerajinan emas dan perak), desa Batubulan (sentra kerajinan patung batu padas), dan desa Singapadu (sentra kerajinan ukiran kayu dan tari barong). Singkat kata, secara letak, desa Kemenuh berada di jantung pusat pariwisata Bali. Sedangkan akses desa Kemenuh ke pusat-pusat pemerintahan juga cukup strategis, yaitu berjarak 25 km ke arah timur dari Kota Denpasar, berjarak 8 km ke arah barat dari Kota Gianyar, dan berjarak 6 km ke arah timur dari Kota Sukawati.

Posisi yang strategis tersebut ditunjang oleh memadainya kondisi ruas jalan yang menghubungkan desa Kemenuh dengan pusat-pusat wilayah tadi. Wilayah desa Kemenuh terpisah menjadi dua bagian oleh seruas jalan propinsi yang merupakan jalan koridor Denpasar – Batubulan – Sukawati – Gianyar – Klungkung. Kondisi tersebut tentu sangat mendukung mobilitas masyarakat desa Kemenuh ke

tempat-tempat yang dituju.

Desa Kemenuh terdiri dari 8 banjar dinas dan 5 *desa pakraman*. Ke delapan banjar dinas tersebut adalah sebagai berikut: banjar Tegenungan, Kemenuh, Medahan, Sumampan, Tengkulak Mas, Tengkulak Kelod, Tengkulak Kaja Kauh, dan Tengkulak Kaja Kangin. Sedangkan ke lima *desa pakraman* yang ada di desa Kemenuh, yaitu : *desa pakraman* Tegenungan, Kemenuh, Sumampan, Tengkulak, dan Medahan. Adapun batas-batas desa Kemenuh adalah sebagai berikut; di sebelah barat berbatasan dengan desa Mas, sebelah Utara adalah desa Dlod Tangluk, sebelah Timur adalah desa Blahbatuh, dan di sebelah Selatan adalah desa Sukawati.

Desa Kemenuh masih bercorak agraris, meskipun pekerjaan sebagai petani sudah mulai tergeser oleh pekerjaan bidang *home industry*, sebagai pematung. Luas sawah basah sekitar 505,54 Ha teknis dan 405,54 Ha berupa lahan sawah setengah teknis. Sedangkan luas ladang tercatat 235,900 Ha. Dengan ketinggian 99 – 109 meter dpal dan suhu rata-rata sebesar 31<sup>0</sup> C memberikan peluang bagi desa Kemenuh untuk mengembangkan sektor pertanian.

### ***b.Kondisi Demografis, Sosial dan Ekonomi***

Penduduk desa Kemenuh berjumlah 7956 jiwa dengan 1500 KK (Statistik Desa Kemenuh Tahun 1998). Sedangkan penduduk banjar Sumampan, di mana lokasi Sua Bali berada, berjumlah 1157 jiwa setara dengan 229 KK. Sedangkan dari sisi pekerjaan warga desa Kemenuh sebagian besar terserap ke sector pertanian (61,3%), kemudian diikuti oleh sector perdagangan 10,6%. Secara lengkap komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan tersebut dapat disimak dalam table berikut :

Tabel 3.1. Komposisi Desa Kemenuh berdasarkan Jenis Pekerjaan tahun 1998

Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
Petani	1224	61,3
Pedagang	210	10,6
Pegawai Negeri Sipil	87	4,4
Pegawai Swasta	75	3,8
Pengerajin	198	9,9
TNI/Polri	19	9,6
Buruh tani	155	7,9
Dll	15	0,01
	1983	100

## Desa Tenganan

### a. Letak, Luas, dan Kondisi Geografis

Desa Adat Tenganan Pegringsingan terletak di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, dengan jarak lebih kurang 17 km dari Kota Amlapura dan 76 km dari kota Denpasar (Lihat peta wilayah Desa Tenganan pada Lampiran). Letak desa adat cukup menarik karena terlindung oleh bukit-bukit di sekitarnya \_ sehingga nampak seperti ‘palung bukit’ dengan desa adat Tenganan Pegringsingan sebagai dasarnya. Semakin mengesankan lagi karena lingkungan pola menetapnya dikurung oleh tembok-tembok di sekelilingnya, dengan sebuah pintu gerbang di keempat penjuru mata angin. Desa ini memanjang dari arah Utara ke Selatan—semakin utara semakin meninggi sesuai dengan latar belakang geografisnya. Sehingga memperlihatkan wujud yang berundak-undak, dan oleh masyarakat setempat dinamakan *teratag*.

Adapun batas-batas *desa pakraman* Tenganan Pegringsingan adalah : di sebelah Barat adalah desa Ngis; di sebelah Utara adalah desa Macang dan Bebandem, di sebelah

Timur adalah desa Bungaya, desa Asak dan desa Timrah; dan di sebelah Selatan adalah desa Pasedahan.

Mengenai luas wilayah desa Tenganan dan penggunaannya dapat diikuti tabel berikut :

Tabel 3.2. Luas Tanah Desa Tenganan dan Penggunaannya

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Persentase
1	Tanah Perkampungan	80.000	7,70
2	Tanah Pertanian	243.315	23,50
3	Tanah Tegalan	499.740	48,30
4	Tanah Laba Pura	95.825	9,30
5	Tanah Kuburan	40.000	3,90
6	Tanah Kolam	0,030	0,00
7	Lain-lain	75.090	7,30
	Jumlah	1.034	100

Sumber: Diolah dari Monografi Desa Tenganan Tahun 1998

Tempat pola menetap penduduk desa adat Tenganan Pegringsingan bertopografi datar. Ketinggian desanya lebih kurang 100 m dari pedalaman dan di sebelah kiri kanannya dikelilingi oleh bukit. Di sebelah utaranya adalah Bukit Kaja, di sebelah timur Bukit Kangin, dan bukit tertinggi dengan puncaknya bernama Badadudu terletak di sebelah Baratnya, dengan ketinggian lebih kurang 450 m .

Di sebelah Bukit Kangin, terbentang tanah pertanian yang merupakan tanah sawah dengan hasil utama adalah padi sebagai milik perseorangan maupun milik desa. Keadaan tanah di Desa Tenganan pada umumnya adalah tanah aluvial coklat kelabu dengan batuan utama deposit. Sumber air yang diperlukan oleh masyarakat sebelum tahun 1980 sebagian besar diambil dari sungai. Dua buah yang mengalir mengalir di desa Tenganan adalah Tukad Buhu dan Tukad Pandek.

Sungai ini airnya mengalir sepanjang tahun, dan airnya dipergunakan untuk air minum, memasak, mandi maupun untuk keperluan irigasi bagi daerah pertanian.

Daerah perbukitan yang mengelilingi desa adat Tenganan merupakan daerah hutan dengan hutan lindung yang tumbuh dengan subur dan terjaga kelestariannya. Hal ini disebabkan karena ketatnya peraturan yang tertuang dalam awig-awig Desa Tenganan tentang penebangan pohon yang terdapat di Bukit Kangin, Bukit Kaja, dan Bukit Kauh. Wilayah hutan tersebut semuanya diatur oleh desa adat, baik tanah milik perseorangan maupun tanah milik desa.

### ***b. Kondisi Demografis, Sosial dan Ekonomi***

Warga desa adat Tenganan adalah setiap orang yang menempati karang desa, yang tergabung dalam tiga banjar, yakni : Banjar Kauh, banjar Tengah dan Banjar Pande—yang terhimpun ke dalam desa adat dan menjalankan segala peraturan-peraturan (*awig-awig*) serta ketentuan-ketentuan adat Tenganan lainnya.

Tabel 3.3 berikut memperlihatkan keadaan jumlah warga desa Tenganan pada tahun 1998.

Tabel 3.3. Jumlah Warga Desa Adat dan KK Tahun 1998

No	Banjar	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
1	Kauh	167	68
2	Tengah	154	58
3	Pande	274	92
	Jumlah	550	218

Sumber : Diolah dari data statistik Desa Tenganan tahun 1998

Dari data di atas dapat diketahui bahwa hampir sebagian penduduk bertempat tinggal di Banjar Pande. Hal ini kemungkinan diakibatkan antara lain karena penduduk pendatang (*wong angendok jenek*) biasanya diberi bertempat tinggal di Banjar Pande dan karena adanya perpindahan

penduduk dari Banjar Kauh dan Tengah ke Banjar Pande jika terjadi suatu pelanggaran adat.

### 1. Komposisi Warga Desa Adat Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi warga desa adat menurut umur dan jenis kelamin pada tahun 1998, diperlihatkan oleh tabel 3.4. Namun, tabel berikut hanya mencakup keadaan di dua Banjar saja, yakni Banjar Kauh dan Banjar Tengah.

Tabel 3.4. Komposisi Warga Desa Adat menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1998

No	Umur (tahun)	Pria (jiwa)	W a n i t a (jiwa)	J u m l a h (jiwa)
1	0 – 4	16	9	25
2	5 – 14	30	25	60
3	15 – 24	18	29	52
4	25 – 54	70	82	152
5	55 ke atas	25	17	42
	Jumlah	159	162	321

Sumber : Diolah dari data statistik desa Tenganan tahun 1998

Dari tabel di atas tampak bahwa perbedaan jumlah warga dari golongan pria dan wanita tidak terpaut jauh, yaitu 164 :167. Sedangkan dilihat dari penggolongan menurut kelompok umurnya dapat diketahui bahwa hampir sebagian dari jumlah penduduk termasuk ke dalam kelompok umur 25 – 54 tahun.

### 2. Komposisi Warga Desa Adat Menurut Pendidikan

Komposisi warga desa adat menurut jenjang pendidikannya diperlihatkan dalam tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5 Komposisi Warga Desa Adat Menurut Pendidikan Tahun 1998

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase
1	Belum sekolah	311	56,54
2	TK	9	1,64
3	Tidak tamat SD	89	16,18
4	SD	63	11,45
5	SLTP	26	4,73
6	SMU	28	5,10
7	Perguruan tinggi	24	4,36
	Jumlah	550	100,00

Sumber : Diolah dari data statistik desa Tenganan Tahun 1998

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah warga desa adat Tenganan yang sudah dapat mengenyam pendidikan adalah 239 orang atau 43,45% dari keseluruhan jumlah warga. Di desa Tenganan sekarang terdapat sebuah TK dan sekolah dasar. Sedangkan sekolah-sekolah lanjutan semuanya berada, yakni : di desa Ulakan dan Kota Amlapura.

### 3. Komposisi Warga Desa Adat Menurut Mata Pencaharian

Membicarakan tentang mata pencaharian hidup dari masyarakat desa adat Tenganan, tidak bisa terlepas dari suatu keadaan masyarakat yang masih sangat kuat terikat oleh adat. Keadaan mata pencaharian warga desa adat itu diperlihatkan dalam tabel 3.6. berikut :

Tabel 3.6 Komposisi Penduduk Tenganan Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Prosentase
1	Petani	122	75,31
2	Tukang/Buruh	11	6,79
3	Pedagang	3	1,85
4	Pegawai	13	8,02
5	Seniman	9	5,56
6	TNI/Polri	4	8,20
	Jumlah	162	100,00

Sumber : Diolah dari data statistik desa Tenganan Tahun 1998

Terlihat bahwa sebagian besar warga mempunyai mata pencaharian sebagai petani (75,31%). Selanjutnya yang bekerja sebagai tukang adalah 6,79 %, sebagai pedagang sebanyak 1,85 %, pegawai 8,01 %, seniman 5,56 %, dan yang bekerja sebagai TNI/Polri sebanyak 8,20 %.

Ciri-ciri kehidupan dan tradisi desa mengharuskan warga desa lebih banyak harus berada di desa dan mengkhususkan waktunya demi kepentingan desanya—menyebabkan tidak banyak warga desa yang mengerjakan langsung tanah sawahnya. Mereka kebanyakan menyakapkan atau menyuruh orang lain untuk menggarap sawah dan ladangnya, baik yang merupakan milik perseorangan ataupun milik desa. Petani yang bertindak sebagai penyakap itu biasanya adalah orang-orang desa dimana sawah-sawah tersebut berada.

Kegiatan-kegiatan lain dari beberapa anggota desa , seperti menenun, mengayam *ata*, mencari tuak untuk bahan gula, menyurat lontar dalam huruf Bali, dan hampir di setiap rumah tangga ada kegiatan membuat sapu lidi dari daun palm, dan beberapa pekerjaan sambilan lainnya. Walaupun hasil dari kegiatan ini tidak mutlak untuk diperdagangkan, tetapi hal ini tetap dilakukan masyarakat untuk mengisi waktu

disamping kesibukan untuk upacara dan kerja desa.

## **Desa Kiadan, Pelaga**

### ***a. Letak, Luas, dan Kondisi Wilayah***

Banjar Kiadan adalah salah satu Banjar di Desa Pelaga (Lihat Peta Potensi Dusun Kiadan pada Lampiran). Banjar Kiadan berjarak sekitar 46 km dari ibu kota provinsi Bali, Denpasar, serta 40 km dari ibu kota kabupaten, Sempidi. Banjar Kiadan merupakan bagian dari Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Banjar Kiadan terletak antara  $115^{\circ}12'50''$  –  $115^{\circ}13'30''$  Bujur Timur (BT) dan  $08^{\circ}17'40''$  –  $08^{\circ}19'11''$  Lintang Selatan (LS).

Banjar Kiadan dibatasi oleh sungai Bukian yang merupakan batas antara wilayah Kiadan dengan *Desa Pakraman* Bukian di sebelah timur, dibatasi juga oleh sungai Auman yang merupakan batas antara wilayah Kiadan dengan *Desa Pakraman* Auman di sebelah barat. Sedang di sebelah utara dan selatan berbatasan dengan *Desa Pakraman* Pelaga dan *Desa Pakraman* Nungnung. Sebelah timur dan barat wilayah Kiadan merupakan *pangkung* atau jurang yang tertutupi tanaman bambu dan pohon besar lainnya. Tanaman ini yang menjaga tanah tidak mengalami longsor serta menangkap dan menyimpan banyak air, yang nantinya mengalir untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tinggal di Bali selatan.

Berdasarkan letak topografi, Banjar Kiadan berada pada ketinggian 975 meter dari permukaan air laut. Banjar Kiadan masih termasuk beriklim tropis yang pada umumnya terdiri dari lima bulan musim kemarau dan tujuh bulan musim penghujan. Curah hujan rata-rata pertahun 1.124 milimeter yang biasanya datang setiap bulan Oktober – Januari setiap tahunnya. Sedangkan suhu udara rata-rata minimum  $25^{\circ}$  C dan maksimum  $28^{\circ}$  C. Kondisi ini menyebabkan kondisi udara masih sangat segar dan bersih karena faktor pencemaran yang relatif rendah.

Berdasarkan peta Tata Guna Lahan yang dibuat oleh masyarakat Kiadan, diketahui bahwa luas wilayah Banjar

Kiadan adalah 242,3 ha dengan keliling 8,49 km. Ada beberapa penggunaan lahan atau pemanfaatan ruang di dalamnya, yaitu untuk permukiman seluas 8,44 ha, perkebunan seluas 185,12 ha, hutan bambu sebagai daerah perlindungan jurang seluas 13,05 ha, dan hutan belantara yang berstatus sebagai Tanah Negara seluas 35,68 ha. Lahan perkebunan sendiri terdiri dari lahan untuk tanaman kopi seluas 87,71 ha, tanaman jeruk seluas 60,36 ha, campuran antara tanaman kopi dan jeruk seluas 22,91 ha, perkebunan palawija seluas 7,99 ha, dan untuk lahan sawah seluas 6,15 ha.

### ***b. Kondisi Demografis, Sosial dan Ekonomi***

Pada mulanya Banjar Kiadan terdiri dari 12 kepala keluarga yang disebut dengan *seka roras*, kemudian *seka roras* ini berkembang menjadi tiga puluh kepala keluarga yang disebut *pengayah ngarep*. *Pengayah ngarep* kemudian berkembang menjadi warga Banjar yang disebut *pengele*. Saat ini Banjar *pakraman* Kiadan terdiri dari 170 KK. Secara administrasi kedinasaan hingga tahun 2007, Banjar Kiadan terdiri dari 216 KK, dengan jumlah penduduk sebanyak 868 jiwa terdiri dari 446 penduduk laki-laki dan 442 perempuan. Penduduk Kiadan sampai saat ini masih menempati tanah PKD (Tanah Pekarangan Desa) yang berada di bagian tengah dari wilayah Kiadan di sepanjang jalan utama.

Sebagian besar masyarakat Kiadan adalah lulusan Sekolah Dasar, berjumlah 710 orang, kejar paket A sebanyak 21 orang, Sekolah Tingkat Pertama (SMP) berjumlah 57 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 70 orang dan sisanya yaitu 10 orang adalah lulusan Perguruan tinggi (universitas). Untuk sekolah dasar rata-rata semua lulusan SD 3 Nunung, untuk SMP rata-rata bersekolah di Pelaga dan Petang, demikian juga untuk SMA, sebagian besar bersekolah di Petang, Abiansemal dan sebagian kecil di Denpasar. Untuk lulusan perguruan tinggi, rata-rata melanjutkan ke Denpasar, Singaraja dan luar Bali (Monografi Dusun Kiadan, 2007).

Sebanyak 82,09 % penduduk Kiadan yang produktif bekerja sebagai petani, baik petani lahan basah, lahan kering, maupun campuran. Sisanya tersebar ke dalam beberapa profesi, seperti PNS, pedagang, wiraswasta. Secara lengkap struktur mata pencaharian penduduk Kiadan bisa dilihat dalam tabel 3.7

Tabel 3.7 Struktur mata pencaharian penduduk Kiadan

<b>Mata pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
Petani/peternak	550
Pegawai Negeri Sipil	12
Pegawai swasta	10
Wiraswasta	32
Buruh	42
Lain-lain	24
Jumlah	670

Sumber: Monografi Desa Pelaga, 2007



## BAB IV DINAMIKA EKOWISATA DESA KEMENUH DAN TENGANAN

**B**AB ini memaparkan proses perkembangan ekowisata desa Kemenuh, dan Tenganan. Pembahasan difokuskan kepada proses awal pengembangan ekowisata di kedua desa, peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengembangan, tahapan perencanaan, dan respons masyarakat lokal. Pada akhir pembahasan dipaparkan pula hasil analisis SWOT terhadap potensi ekowisata di kedua desa. Gambaran perkembangan ekowisata di kedua desa kasus memberikan cerminan perihal dinamika perintisan pada rentang masa-masa awal sebuah gerakan ekowisata pada masyarakat lokal dengan segenap dinamika pasang-surutnya. Selain itu disajikan pula pola-pola pengembangan partisipasi masyarakat di kedua desa serta implikasinya terhadap keberhasilan pengembangan ekowisata secara keseluruhan di masing-masing desa.

### **Ekowisata Kemenuh**

Ekowisata di Desa Kemenuh, tepatnya di Banjar Sumamp, dipelopori oleh Ida Ayu Mas (IAM), seorang perempuan bangsawan *brahmana* yang memilih meninggalkan *griya*<sup>1</sup> untuk mendedikasikan hidupnya pada masyarakat desa. IAM masuk ke desa Kemenuh pertama kali pada tahun 1985. Ia membeli sebidang tanah yang letaknya sangat terpencil di salah-satu sudut desa Kemenuh. Tanah tersebut terletak dalam wilayah banjar Medahan, desa Kemenuh, Sukawati, Gianyar, Bali. Secara geografis lokasi itu berbatasan dengan Sungai Petanu di sisi timur, dan dengan *pangkung* (jurang), sebagai batas antara desa Medahan dengan desa Sumamp. IAM membangun sebuah pondok sederhana dan berusaha

menjadi warga desa Kemenuh.

Sebagai pendatang (*krama tamiu*), IAM segera melaporkan diri kepada kepala dusun dinas agar tercatat sebagai warga banjar dengan segala hak dan kewajiban yang melekat. Usaha sungguh-sungguh IAM untuk dapat diterima oleh warga Kemenuh tersebut tercermin dari hasil wawancara berikut :

“Perlahan-lahan saya mulai memasuki lokasi dan membangun gubuk sederhana dari bambu. Lokasi ini sangat terpencil sehingga sulit dicapai kendaraan mobil maupun sepeda motor, karena jalannya penuh lubang dan becek. Penduduk setempat menyebut situasi di sana sangat serbi, penerangan tidak ada dan mereka tidak mau lewat sesudah senja. Selain jalan yang rusak, lingkungan sekitar sangat miskin dan terbelakang. Dengan dibantu oleh penduduk setempat saya membeli batu krikil, berusaha meratakan jalan agar bisa dilewati kendaraan.”

(wawancara tanggal 10 Mei 2000)

Namun usaha itu ternyata malah direspon kurang positif warga masyarakat terhadap kehadiran IAM di desa Kemenuh, seperti terungkap dari hasil wawancara berikut ini :

“ Sebagai pendatang baru saya tidak tahu bahwa ada larangan truk masuk dusun ini. Untuk pertama kali saya memasukkan truk ukuran menengah untuk mengangkut bambu. Peristiwa ini sempat menimbulkan ketegangan di antara penduduk sekitar lokasi dengan saya dan juga penduduk dengan aparat desa yang seolah-olah telah memberikan ijin istimewa kepada saya untuk memasukkan truk. Menurut mereka aparat desa pilih kasih, aparat desa dianggap tidak adil dalam memperlakukan warganya. Tanpa merasa bersalah sedikitpun dan juga karena tidak mendapat teguran, saya meneruskan pengangkutan bambu tersebut. Peristiwa ini telah menimbulkan pertanyaan di benak saya, masalah yang ada sebenarnya cukup sederhana, dan bisa diselesaikan dengan memberikan informasi dengan jelas atau memasang tanda larangan. Saya menduga di balik

semua itu terdapat kesenjangan komunikasi di lingkungan ini. Beberapa hari setelah peristiwa itu saya mendapat teguran halus dari *kelihan adat* karena dianggap tidak melaporkan diri kepada mereka. Dengan rasa kecewa saya sampaikan kepada mereka bahwa saya telah melapor kepada kepala dusun dan menyatakan kesediaan saya menjadi warga desa. Dengan sangat malu kelian adat minta maaf akan kelalaian dan sikap kepala dusun dinas mereka”.

(wawancara tanggal 20 Mei 2000)

Di samping peristiwa tersebut, beberapa bulan sesudahnya terdapat pula kasus pembelian tanah milik warga oleh IAM yang menimbulkan konflik antara pemilik sah tanah dengan anak angkat pemilik tanah. Konflik yang berakhir di pengadilan tersebut menambah citra kurang positif terhadap keberadaan IAM di Kemenuh.

Serangkaian peristiwa di atas akhirnya membuat IAM membatalkan rencananya semula, yaitu untuk mengembangkan proyek pariwisata berskala menengah. Selama lima tahun berikutnya yaitu dari tahun 1985-1990, IAM hanya membangun rumah *pelebahan* Bali yang sangat sederhana. Masa-masa tersebut dimanfaatkan untuk berintegrasi dengan lebih baik dengan masyarakat sekitar, mengingat kondisi lingkungan yang tidak terbuka. Sementara itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu IAM mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain untuk mengembangkan suatu kegiatan di tingkat pedesaan, yang dapat mempersempit kesenjangan ekonomi yang ada di Kemenuh. Dalam proses tersebut IAM menemukan beberapa ‘penyakit-penyakit sosial’ dalam sistem *desa adat* maupun desa dinas di Kemenuh. Penyakit-penyakit sosial tersebut antara lain : kepala desa memiliki kekuasaan tanpa batas (tidak ada kemungkinan kritik; sistem kontrol tidak berfungsi, penyampaian kritik menjadi sesuatu yang mustahil); penyampaian informasi memiliki mekanisme yang khas yang sudah mengakar dalam kultur masyarakat, kuatnya peran para kelompok orang-orang tua yang dituakan (*informal leader*) yang pada umumnya ada dalam status materi yang lebih

baik daripada warga kebanyakan, amat menentukan dalam kehidupan sehari-hari; tingkat homogenitas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kesulitan beradaptasi bagi pendatang baru; adanya kesenjangan ekonomi yang sangat lebar antara pengusaha pemilik *art shop* dengan para pengerajin pada umumnya. Hal ini disebabkan karena terjadinya praktek-praktek ekonomi yang cenderung merugikan pengerajin dalam transaksi patung.

Pada tahun 1990 IAM memulai membangun pondok wisata berskala kecil dengan lima buah rumah. Tempat tersebut diberi nama Sua Bali. Beberapa orang warga desa diajaknya serta membangun dan selanjutnya mengelola pondok wisata tersebut. Bahan-bahan untuk membangun pondok wisata Sua Bali 80 % merupakan bahan-bahan lokal atau berasal dari dalam Desa Kemenuh, seperti : pasir, jerami, kayu, dan lain lain. IAM juga memakai tukang bangunan lokal untuk mengerjakan bangunan pondoknya tersebut.

#### **a. Filsafat, Konsep, dan Prinsip Sua Bali**

Sebagai orang Bali dari keluarga terdidik dengan pengalaman mengenyam kehidupan di Jerman IAM mampu mencerna dan menterjemahkan ulang berbagai konsep kearifan lokal Bali sehingga lebih bersifat kontekstual. Menurutnya, filsafat hidup yang paling mendasar bagi orang Bali adalah "Keseimbangan". Filsafat hidup ini bersumber dari konsepsi *Tri Hita Karana*, sebuah konsepsi keseimbangan dalam khasanah ajaran Hindu yang mengintegrasikan secara selaras tiga komponen penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang diyakini. Ketiga komponen tersebut yaitu: (1) *parhyangan* atau Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kehidupan; (2) *palemahan* yaitu seluruh wilayah dari lembaga tersebut; (3) *pawongan* adalah sumber daya manusia yang terdiri dari semua warga dari lembaga bersangkutan.

Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keharmonisan antara berbagai kepentingan individu dalam berinteraksi dan menjaga kondisi harmonis antara individu dan lingkungan

alamnya. Filsafat Sua Bali merupakan cerminan dari hal tersebut. Harapan dan keinginan wisatawan seharusnya tetap dijaga agar harmonis dengan keinginan dan kebutuhan orang Bali dan lingkungan hidupnya.

Sayangnya, menurut pengamatan IAM, pengembangan kepariwisataan di Bali seringkali mengabaikan nilai harmoni relasi antara kunjungan wisatawan dengan kehidupan sehari-hari orang Bali dan budayanya. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Bali, ketika pulang ke negerinya merasa bahwa hari libur yang telah mereka lalui tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya.

Sebagian besar wisatawan tinggal di daerah pusat pariwisata di sepanjang pantai selatan pulau Bali dan kesan yang diperoleh tentang Bali dalam kunjungan singkatnya sangat artifisial. Mereka dapat melihat pemandangan alam yang indah, penduduk yang murah senyum dan ramah serta berbagai macam tarian yang misterius. Kesempatan untuk mengerti segala sesuatu yang telah dilihatnya, hampir tidak pernah diperoleh para wisatawan. Mereka kembali ke tanah airnya dengan membawa foto-foto, tetapi tidak pernah mengalami secara utuh mengapa Bali berbeda dengan daerah tujuan wisata lainnya di dunia. Terkadang orang Bali sendiri merasa kecewa dan terluka perasaannya karena sebagian wisatawan tidak menunjukkan rasa saling menghormati ketika berkunjung ke tempat-tempat peribadatan, baik ketika tidak ada upacara maupun ada upacara keagamaan. Sebagian besar penduduk setempat juga sering merasa kecewa karena manfaat ekonomis dan non ekonomis yang mereka rasakan dari kunjungan wisatawan tersebut sangat kecil.

Sua Bali berkeinginan untuk merealisasikan suatu bentuk kepariwisataan yang membawa dampak positif lebih besar dibandingkan dampak negatif bagi Bali. Sua Bali berharap dapat memberikan kesempatan pada tamu-tamu yang berkunjung ke Sua Bali untuk mengerti negara Indonesia, kebudayaan Bali dan Orang Bali sendiri. Tidak seperti wisatawan yang tinggal di pusat-pusat pariwisata

konvensional, tamu-tamu Sua Bali akan menikmati hidangan masakan Bali, menghirup udara keseharian orang Bali dan merasa seperti hidup di Bali. Suara kokok ayam di pagi hari akan membangunkan mereka dari tidurnya. Petang hari mereka dapat mendengarkan sayup-sayup gamelan yang ditabuh, berasal dari *wantilan*<sup>2</sup> pura-pura yang ada di sekitarnya. Dan di malam hari suara-suara binatang melata akan menghanyutkan mereka kembali ke alam tidur. Singkatnya, Sua Bali berusaha menjadi tempat yang dapat membantu setiap individu dalam usaha meraih ambisi. Di Sua Bali tamu-tamu tidak hanya mendapat informasi mengenai tata krama pada situasi-situasi tertentu, tetapi juga latar belakang mengenai keberadaan adat tersebut. Setiap tamu juga diberikan kesempatan belajar bahasa Indonesia, jika menginginkannya, selain beragam keterampilan tradisional Bali. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada para wisatawan sesuai keinginannya mengenai gaya hidup, agama dan kebudayaan Bali.

Bagi Sua Bali, bentuk kepariwisataan yang terbaik adalah kepariwisataan yang memiliki landasan komunikasi dua arah. Sua Bali berkeinginan agar lebih banyak lagi orang Bali yang dapat meraih manfaat positif dari pariwisata. Masyarakat Bali semestinya tidak hanya mendapatkan dampak positif dari sisi finansial tetapi juga dari sisi ilmu pengetahuan. Contohnya, pengusaha yang membangun penginapan agar menggunakan material yang berasal dari desa setempat atau dari lingkungan terdekatnya. Demikian juga dengan karyawan supaya bersal dari desa setempat, tidak hanya untuk bekerja tetapi juga untuk dieberikan pendidikan.

Para tamu Sua Bali diperlakukan sebagai bagian dari komunitas. Setiap wisatawan ikut berperan dalam pemeliharaan desa dengan menyumbangkan \$US 1 dollar / hari untuk desa. Oleh pengurus banjar uang sumbangan ini digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain : upacara di desa dan untuk membantu penduduk yang mengalami berbagai kesulitan. Sebagai imbalannya, tamu-tamu Sua Bali

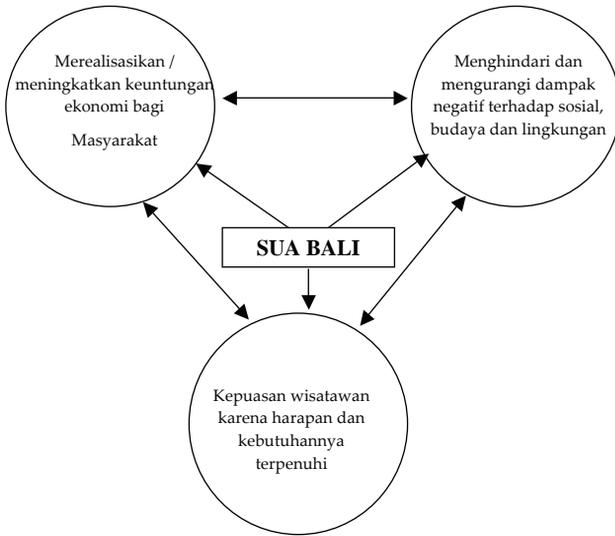
dapat ikut menikmati berbagai perayaan di pura-pura di Desa Kemenuh. Penduduk setempat merupakan bagian integral dari kehidupan Sua Bali, misalnya : masyarakat sekitar ikut membantu persiapan upacara piodalan di “mrajan” Sua Bali.

### *Menuju Konsep Pariwisata yang Bertanggungjawab*

Sua Bali merupakan representasi dari keinginan IAM dalam merealisasikan sebuah konsep kepariwisataan berskala kecil. Tujuannya, adalah mengajak untuk mengalami Bali sesungguhnya, dengan tetap menghormati kepentingan penduduk setempat di bidang ekonomi, sosio kultural dan lingkungan hidup.

Menurut pemahaman IAM kepariwisataan Bali selama ini memiliki sedikitnya tiga sisi, yaitu : *pertama*, kekecewaan masyarakat Bali yang tidak begitu merasakan dampak positif secara ekonomis kepariwisataan, *kedua*, munculnya dampak negatif pada lingkungan sosial, lingkungan alam dan lingkungan budaya akibat dari pola kepariwisataan massal. Selain itu terjadi pula ‘keterasingan’ budaya di masyarakat. *Ketiga*, kekecewaan wisatawan yang tidak menemukan lagi pemandangan alam dan budaya yang otentik, tetapi sebaliknya menemukan pemandangan buatan dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan.

IAM yang pernah tinggal cukup lama di Jerman, mengenal betul kebutuhan wisatawan Jerman dalam berlibur. Ia juga sangat menyadari harapan-harapan dan kekhawatiran masyarakat Bali. Bergerak dari latar belakang tersebut, ia lalu berusaha mengimplementasikan gagasan-gagasannya di bidang kepariwisataan. Tujuannya adalah untuk menghindari atau paling tidak memperkecil dampak-dampak negatif sosio kultural kepariwisataan dan memaksimalkan keuntungan ekonomis bagi penduduk setempat. Bersamaan dengan itu wisatawan juga harus memperoleh kesempatan untuk mengenal masyarakat Bali dengan lebih baik dan pada akhirnya dapat mengerti latar belakang budaya yang unik ini.



### b. Respon Masyarakat Lokal terhadap Sua Bali

Dalam perkembangannya Sua Bali berusaha menjalankan program-programnya dengan berpedoman pada konsep dan filsafat Sua Bali di atas. Konsep dan filsafat yang dirumuskan oleh IAM berdasarkan pemikiran-pemikiran yang diyakini kebenarannya. Dari konsep dan filsafat tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa Sua Bali memang tidak menjadikan masyarakat Kemenuh sebagai subyek dalam membuat perencanaan pariwisata Sua Bali. Artinya, proyek Sua Bali hanya merupakan representasi dari gagasan IAM dalam merealisasikan sebuah konsep kepariwisataan berskala kecil. Sua Bali menempatkan dirinya sebagai pihak yang dapat membaca keinginan-keinginan masyarakat lokal berkaitan dengan bentuk-bentuk pariwisata yang diharapkannya.

Pada tataran konseptual Sua Bali telah memberikan perhatian terhadap pentingnya pelibatan peran masyarakat Desa Kemenuh, namun dalam tataran praktis (implementasi) hal tersebut ternyata masih sulit untuk dilaksanakan. Ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kedua belah pihak sehingga menyebabkan proses sosialisasi menjadi terhambat.

Pihak Sua Bali sendiri menganggap kendalanya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia pedesaan yang diakibatkan oleh terjadinya pemiskinan struktural di pedesaan. Kondisi tersebut menurut Sua Bali disebabkan oleh perlakuan elit-elit desa Kemenuh dan kelemahan-kelemahan yang melekat pada perangkat desa Kemenuh, baik desa adat maupun desa dinas. Dalam salah satu bagian wawancara IAM menyebutkan :

“Ada empat hal yang terjadi di desa ini yang menghambat proses pengembangan Sua Bali, antara lain : keterbelakangan dan ketidakpedulian masyarakat, pelecehan terhadap awig-awig desa oleh aparat desa dan *informal leader*, pembodohan masyarakat oleh aparat desa dan *informal leader* dan pelecehan hak-hak rakyat.”

(wawancara tanggal 14 Mei 2000)

Sedangkan dari pihak masyarakat sebagian besar kurang dapat menerima kehadiran Sua Bali karena faktor figur IAM yang menurut pandangan masyarakat kurang dapat bersikap simpatik dan menghargai keberadaan desa adat, sering melontarkan kritik-kritik pedas yang dianggap merongrong kewibawaan institusi desa adat. Hal tersebut dipertajam lagi oleh sikap dan tingkah laku IAM yang berada di luar kelaziman masyarakat Kemenuh pada umumnya. Setidaknya anggapan demikian muncul dari seorang tokoh pemuda Desa Kemenuh, IBS, seperti yang disampaikannya dalam salah-satu wawancara dengan peneliti:

“Di mata masyarakat, IAM adalah figur yang terlalu percaya diri dengan apa yang diyakininya. Dia terkesan selalu memonopoli kebenaran. Di sisi lain dia juga kurang bisa bergaul dengan masyarakat kebanyakan. Singkat kata IAM lebih lebih sering menempatkan diri dalam posisi yang superior”.

(wawancara tanggal 11 Mei 2000)

Padahal secara umum, masyarakat sebenarnya mengakui bahwa program-program pariwisata alternatif yang ditawarkan oleh Sua Bali sebenarnya sangat ideal. Hanya saja karena citra yang telah melekat pada figur IAM terlanjur negatif sejak awal, akhirnya apapun yang dilontarkan Sua Bali kepada masyarakat tidak direspon secara positif. Hal ini seperti tersirat dari pernyataan salah seorang informan (Kepala Desa), sebagai berikut:

“Apa yang diprogramkan oleh IAM sebenarnya dapat diterima oleh masyarakat di sini, hanya sayangnya memang, karena sejak awal masyarakat sudah kurang berkenan dengan sikap dan cara-cara IAM dalam menyampaikan ide-ide atau programnya itu, akhirnya ya masyarakat bersikap acuh tak acuh saja terhadap apa yang dikemukakan oleh IAM.”

(wawancara tanggal 12 Mei 2000)

### c. Problematik Pengembangan

Kehadiran Sua Bali di Desa Kemenuh di samping memberikan manfaat ekonomi kepada sebagian masyarakat ternyata juga memunculkan permasalahan-permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut sebagian telah menimbulkan konflik pada tingkat wacana di kalangan masyarakat Desa Kemenuh. Masyarakat terbagi dalam faksi-faksi sesuai dengan pendapatnya dalam menilai kehadiran Sua Bali atau figur IAM.

Peneliti mencoba memilah-milah permasalahan-permasalahan tersebut ke dalam tema-tema khusus permasalahan agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat lebih jelas untuk dilihat. Dari proses pemilahan permasalahan tersebut berhasil dirumuskan sebagai berikut :

*Pertama*, masalah yang terkait dengan persoalan-persoalan **budaya**, dalam konteks masalah hubungan Sua Bali dengan masyarakat Kemenuh adalah menyangkut pandangan-pandangan kedua belah pihak terhadap nilai-nilai yang dianut oleh desa adat. Desa adat menurut pemahaman masyarakat Desa Kemenuh pada umumnya adalah suatu sistem kekerabatan yang menempatkan ‘harmoni’ sebagai nilai

dasar yang sangat penting. Demikian pentingnya, sehingga demi terwujudnya sebuah harmoni hak-hak individual warga desa adat sering dikorbankan. Misalnya kasus pengucilan warga yang telah melakukan jenis pelanggaran yang berat.

Sedangkan pemrakarsa Sua Bali memiliki pandangan yang berbeda, yaitu bahwa sistem desa adat merupakan sebuah sistem yang dinamis. Sebuah sistem yang selalu bergerak ke arah perkembangan-perkembangan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman.. Artinya, desa adat harus senantiasa melakukan reposisi dan reinterpretasi dalam menentukan pilihan-pilihan sikapnya. Implementasi dari pandangan semacam ini, salah-satunya ialah ketika Sua Bali menterjemahkan prinsip partisipasi (*ngayah*) dalam kegiatan desa adat.

Bagi pemrakarsa Sua Bali *ngayah* tidak harus berupa keterlibatan fisik secara intensif dalam setiap kegiatan adat atau keagamaan, sebagaimana umumnya yang dilakukan oleh warga pada umumnya, namun partisipasi dalam *ngayah* juga dapat diekspresikan dengan memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran yang konstruktif kepada desa adat atau sumbangan-sumbangan dalam wujud materi (uang). Hal ini untuk mengantisipasi seandainya terdapat warga desa adat yang bermigrasi ke tempat lain.

*Kedua*, masalah **komunikasi**, citra pertama yang dimunculkan oleh kehadiran pemrakarsa Sua Bali di Desa Kemenuh akhirnya menyebabkan terganggunya komunikasi antara masyarakat dengan Sua Bali. Sehingga pada tahap berikutnya masyarakat terkesan menolak setiap apapun yang ditawarkan oleh pemrakarsa Sua Bali. Dalam pandangan masyarakat pemrakarsa adalah figur yang terlalu superior (IAM berasal dari golongan Brahmana, berpendidikan tinggi, dan pernah bermukim di Jerman), dibandingkan dengan warga masyarakat pada umumnya. Kondisi tersebut semakin parah karena pemrakarsa Sua Bali tersebut sangat jarang memanfaatkan pranata-pranata sosial tradisional yang telah ada dan berkembang sejak lama di masyarakat, seperti forum

sangkepan (musyawarah desa).

Dari kondisi demikian akhirnya yang berkembang adalah prasangka-prasangka di antara kedua belah pihak. Masyarakat menganggap IAM sebagai tokoh yang sering memonopoli kebenaran, tukang kritik pengurus adat, dan tidak bersikap kooperatif. Sebaliknya IAM memandang masyarakat desa Kemenuh, khususnya pengurus desa adat sebagai konservatif, tidak memihak pada kepentingan masyarakat kecil, dan menjadikan institusi adat sebagai alat untuk menindas rakyat.

Sebenarnya pihak Sua Bali telah berupaya untuk menjalin komunikasi dengan warga masyarakat Kemenuh. Salah-satunya, misalnya, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat setiap bulan dalam pertemuan di Sua Bali. Namun upaya tersebut ternyata tidak banyak memberikan manfaat karena rendahnya respon masyarakat yang diundang untuk menghadirinya.

*Ketiga*, masalah tata hubungan kelembagaan (struktural). Masalah ini merupakan masalah yang muncul dalam hubungan Sua Bali dengan desa adat. Dalam persepsi pemrakarsa Sua Bali, sistem desa adat tidak efektif lagi dipergunakan sebagai media untuk melakukan proses perubahan sosial. Desa adat telah kehilangan perannya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat Desa Kemenuh, terbukti dari banyaknya persoalan-persoalan persengketaan antar warga Desa yang berakhir di pengadilan, termasuk salah-satunya persengketaan tanah antara warga yang menjual tanahnya ke pemrakarsa Sua Bali dengan anak angkatnya.

Peran desa adat semakin menyempit, di mana desa adat hanya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan di pura-pura. Keadaan seperti itu menyebabkan Sua Bali kurang menaruh perhatian terhadap keberadaan desa adat ketika harus berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan ketika desa desa adat menyelenggarakan sangkepan rutin yang semestinya setiap kepala keluarga yang menjadi warga desa adat menghadirinya, pemrakarsa hampir

tidak pernah menghadirinya.

Masalah kelembagaan yang lain juga muncul terkait dengan sumbangan dana yang diberikan oleh Sua Bali kepada desa adat khususnya sumbangan kepada Banjar Medahan. Dalam kasus tersebut, pemrakarsa Sua Bali meminta pertanggungjawaban penggunaan dana sumbangan tersebut langsung kepada pengurus bank banjar, padahal pemrakarsa Sua Bali sebelumnya menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kelihan Dusun (Kepala Dusun) Medahan. Akibatnya, pengurus bank banjar memandang tindakan pemrakarsa Sua Bali tersebut sebagai bentuk intervensi kelembagaan terhadap bank banjar.

*Keempat*, masalah Sosial, masalah sosial yang paling menonjol adalah renggangnya hubungan sosial antara Sua Bali dengan masyarakat Kemenuh. Jarak sosial yang terbentuk selain karena faktor sejarah latar-belakang kehadiran Sua Bali yang kurang mendapat tempat dalam tata pergaulan sosial Desa Kemenuh, juga dipicu oleh kondisi riil yang berkembang di Desa Kemenuh sendiri. Dari hasil investigasi, peneliti mendapatkan fakta bahwa interaksi sosial antar warga Desa Kemenuh telah bergeser ke arah pola-pola interaksi bercorak urban atau kota. Kondisi tersebut hampir sama dengan kondisi yang tengah berkembang pada desa-desa lainnya di sekitar Desa Kemenuh. Pada desa-desa tersebut umumnya pengaruh pariwisata telah menyebabkan tingkat mobilisasi warga desa cukup tinggi karena harus memenuhi tuntutan profesional masing-masing. Hal ini menyebabkan semakin berkurangnya interaksi antar warga.

Dalam kondisi seperti itu partisipasi warga dalam kegiatan-kegiatan komunal semakin sulit diharapkan, kecuali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah keyakinan (keagamaan). Jadi, dalam kenyataannya kesulitan menumbuhkan partisipasi warga tidak hanya dihadapi oleh Sua Bali, namun juga dialami oleh pengurus desa adat maupun desa dinas. Akibat rendahnya partisipasi warga masyarakat tersebut berdampak pula terhadap kualitas kemufakatan yang

dihasilkan dalam media permusyawaratan desa. Seringkali keputusan yang diambil bukan merupakan cerminan aspirasi seluruh warga, namun hanya merupakan representasi dari keinginan sekelompok kecil warga masyarakat yang memiliki pengaruh.

*Kelima*, masalah lingkungan, ada dua kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan masalah lingkungan yang dipicu oleh adanya kesenjangan komunikasi antara Sua Bali dengan pengurus desa, yaitu :

1. Pengelolaan sampah masyarakat yang kurang profesional. Warga masyarakat yang tidak mempunyai pembuangan sampah sendiri membuang sampahnya tersebut ke lokasi Tempat Pembuangan Sampah Desa yang salah-satunya berlokasi tepat di depan penginapan Sua Bali. Hal tersebut telah berlangsung cukup lama dan pihak Sua Bali pun telah melayangkan surat protes kepada aparat desa, namun belum diselesaikan dengan baik. Kasus tersebut semakin mempertajam konflik di antara kedua belah pihak, prasangka-prasangka baru bermunculan. Sua Bali menganggap pihak warga yang melakukan pembuangan sampah tersebut sengaja ingin menciptakan citra negatif terhadap Sua Bali sehingga para tamu enggan berkunjung. Sedangkan dari pihak warga masyarakat tidak terlalu peduli dengan akibat perilaku mereka, karena menganggap tindakan tersebut tidak melanggar awig-awig desa adat.
2. Pembuatan jalan tembus oleh desa dinas menuju ke arah sungai Petanu, yang melewati areal yang bersebelahan dengan lokasi Sua Bali. Kehadiran jalan tersebut bagi Sua Bali merupakan sesuatu yang berdampak negatif karena mengurangi keindahan pemandangan, selain dapat menyebabkan longsornya tanah di mana Sua Bali mendirikan penginapannya. Perangkat Desa sebenarnya telah mengetahui dampak yang akan timbul dari pembangunan jalan tersebut, namun dalam masalah tersebut mereka juga tidak dapat menolak begitu saja keinginan sebagian besar warga masyarakat yang

menuntut pembuatan jalan tersebut. Dari kasus ini, semakin menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang muncul sebenarnya berawal dari kegagalan kedua belah pihak di dalam menjalin komunikasi yang efektif.

### c. Respons Eksternal

Bertolak belakang dengan sikap resistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat lokal, pengelolaan Sua Bali justru menuai pujian pihak internasional. Hal ini tercermin dari pemberian penghargaan 'To Do' oleh sebuah lembaga yang berkedudukan di Jerman, yaitu ITB (*International Tourism Exchange Berlin*). Lembaga tersebut setiap tahun memberikan penghargaan kepada proyek-proyek pariwisata di manapun di dunia yang telah mempraktikkan pengelolaan pariwisata yang berdampak positif terhadap masyarakat lokal. Terpilihnya Sua Bali sebagai salah satu penerima penghargaan tersebut dapat dipergunakan sebagai indikasi besarnya pengakuan pihak-pihak luar terhadap program-program kepariwisataan alternatif yang telah dilakukan Sua Bali.

Beberapa butir penilaian yang dipergunakan oleh ITB dalam menilai Sua Bali adalah sebagai berikut :

1. *Keterkaitan antara kesadaran masyarakat lokal terhadap pengaruh positif dan negatif pembangunan pariwisata dalam kehidupan sehari-hari mereka : kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.*

Dalam kaitan dengan filosofi yang disebutkan diatas, menurut ITB penyelenggara Sua Bali telah melibatkan populasi masyarakat Kemenuh dalam perencanaan Sua Bali dan realisasinya setahap demi setahap dalam diskusi-diskusi sejumlah individu dan dibanjar, dengan dewan desa. Ini dilakukan untuk memastikan apakah konsep Sua Bali tersebut benar-benar dalam garis-garis tradisi dan pola perilaku yang berlaku di desa Kemenuh.

2. *Proses memperkuatnya kesadaran masyarakat lokal terhadap pengaruh positif dan negatif pembangunan pariwisata dalam kehidupan keseharian mereka, dalam bidang ekonomi sosial dan budaya.*

Dalam beberapa serangkaian diskusi IAM memberi penjelasan kepada penduduk desa mengenai harapan (kesempatan) dan resiko pariwisata. Ini telah dilakukan misalnya melalui kegiatan perlombaan lukis yang diselenggarakan di sekolah dasar yang bertemakan tentang sikap, kelakuan, tata krama dan perilaku para turis sebagaimana yang dialami anak-anak setiap hari.

Sedangkan kegiatan yang mengarah kepada warga masyarakat desa Kemenuh yang lainnya dilakukan melalui diskusi-diskusi dengan warga pemuda dan orang tua didesa tersebut. Tema-tema yang didiskusikan pada kesempatan ini khususnya berkaitan dengan komersialisasi acara-acara religius-budaya (misalnya susunan perkawinan campuran dalam tata cara masyarakat Hindu Bali). Tema lainnya tentang dampak-dampak yang muncul akibat trend pembangunan rumah-rumah bergaya modern yang menyebabkan ditinggalkannya gaya tradisional, yaitu rumah dengan atap lalang, dinding tanah. Demikian juga ide untuk memasang sebuah *Flatfom Bungee Jumping* di perbatasan desa Kemenuh.

### *3. Partisipasi lapisan masyarakat desa secara luas berkenaan dengan pengaruh positif bidang ekonomi, sosial dan budaya dari sektor pariwisata*

Staf Sua Bali sebagian besar berasal dari Kemenuh dan desa-desa tetangga. Kesempatan yang sama pula untuk pekerja-pekerja dan ahli bangunan (tukang, seniman, dan pekerja yang mempunyai keahlian teknis tertentu), yang membangun rumah-rumah penginapan Sua Bali dalam stil Bali. Material dan perkakas yang mendukung operasional Sua Bali juga dibeli dari daerah sekitarnya. Komoditi untuk keperluan sehari-hari juga diperoleh dari desa tersebut atau dari pasar-pasar lokal di sekitar desa Kemenuh. Desa Kemenuh mendapatkan keuntungan sekitar 70 % sampai 80 % dari pengaruh pekerjaan tersebut, sisanya dinikmati oleh desa-desa tetangga.

Di samping itu, masing-masing tamu yang menginap

di Sua Bali harus menyumbang 1 US \$ per malam untuk kepentingan sosial desa Kemenuh. Sejauh ini (tahun 2000) sekitar 900 tamu Sua Bali yang pernah tinggal menginap di Sua Bali selama 5000 malam telah menyumbang sekitar US 3700 \$ untuk kepentingan masyarakat desa Kemenuh.

1. *Jaminan ketertarikan dalam pekerjaan untuk masyarakat lokal di sektor pariwisata dengan meningkatkan kondisi kerja dalam kaitannya terhadap pembayaran, keamanan sosial, jam kerja, pendidikan dan latihan.*

Dengan jumlah karyawan sampai 10 orang, sampai saat ini Sua Bali memiliki suatu staf yang memiliki kemampuan profesionalitas di atas rata-rata. IAM beranggapan hal tersebut perlu sehingga semua karyawannya dapat mencapai puncak profesinalismenya. Prinsip ini diwujudkan dengan memberikan gaji yang layak untuk hidup, memberikan tempat tinggal sementara di Sua Bali, dan yang paling penting adalah para karyawan dapat mengikuti kewajiban-kewajiban komunal mereka di desanya masing-masing jika terdapat upacara agama atau kegiatan adat yang lainnya. Tugas-tugas komunal tersebut diutamakan dari pada pekerjaannya di Sua Bali dan gajinya tidak dipotong.

Alasan yang mendasar dari perlakuan ini adalah bahwa tidak ada pekerja yang harus diasingkan dari interaksinya dalam desa adat, sehingga dengan demikian prinsip utama Sua Bali, yaitu Keseimbangan, akan dapat tercapai.

IAM tetap memberikan pembayaran gaji untuk karyawan yang sakit, maupun karyawan yang sedang hamil. Dia membantu karyawannya dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa keharusan waktu pengembalian yang ketat. IAM juga membiayai kursus-kursusn bahasa asing bagi karyawan yang berminat memperdalamnya, setelah mempunyai masa kerja satu tahun. Suasana 'Griya' (rumah) yang diciptakan dalam lingkungan penginapan menyebabkan para karyawan umumnya betah bekerja di Sua Bali. Rata-rata masa kerja karyawan Sua Bali adalah 1,5 – 3 tahun.

2. *Penguatan budaya lokal seperti identitas budaya dalam kehidupan daerah tujuan wisata.*

Penguatan budaya lokal tercermin dari program Sua Bali antara lain memberikan kursus memasak makanan tradisional kepada para tamu yang menginap, diskusi-diskusi intensif dengan para pengerajin lokal, dan memperkenalkan para tamu tentang sistem perdagangan di pasar tradisional desa dengan mengajak mereka langsung berbelanja ke pasar terdekat.

3. *Penerapan metode baru dalam relasi persahabatan dan kerjasama antara industri pariwisata dengan penduduk lokal*

Sua Bali melalui program-programnya melakukan pemaknaan yang lebih mendalam terhadap hubungan wisatawan dengan masyarakat lokal. Sua Bali berusaha mengubah pola relasi tersebut dari hubungan “tuan – pelayan” menuju lebih kepada pertemuan yang berorientasi persahabatan. Secara nyata hal tersebut terlihat, misalnya perlakuan Sua Bali terhadap para tamu yang telah memiliki jumlah kunjungan dalam kuantitas tertentu, tidak lagi dikenakan biaya akomodasi karena mereka telah berada dalam kategori ‘sahabat Sua Bali’.

4. *Program-program yang dilaksanakan tidak melanggar prinsip-prinsip kesesuaian lingkungan.*

Sua Bali dipandang telah menjaga tanggung jawab atas batas-batas ekspansinya dan stil bangunan. Sua Bali dibangun pada sebidang lahan yang relatif kecil dengan menjaga kesesuaian karakter bangunan dengan lingkungan sekitarnya atau standar lokal. Di samping itu penyediaan bahan makanan penginapan diambil dari persediaan lokal desa.

Sua Bali memiliki sumber mata air sendiri. Pembuangan kotoran dihubungkan melalui pipa-pipa yang ditanam di kedalaman tanah tertentu. Sua Bali juga tidak menggunakan fasilitas pendingin udara (AC) karena pengingatannya yang didesain berdasarkan stil Bali konstruksi atap yang bahannya berupa alang-alang lokal.

#### d. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan suatu metode analisis yang mendeskripsikan potensi dan masalah utama, peluang dan ancaman utama serta permasalahan yang harus dihadapi. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor-faktor dalam yang dapat dimanfaatkan atau perlu ditangani/diperbaiki akan menjadi peluang sedangkan apabila tidak ditangani akan menimbulkan tantangan/ancaman.

##### ▪ **Kekuatan :**

- Ekowisata telah berkembang lama di Kemenuh dengan adanya Sua Bali,
- Kemenuh terletak pada lintasan jalur-jalur pariwisata,
- Desa Kemenuh telah dikenal sebagai sentra kerajinan patung kayu, hal ini merupakan keunikan budaya Desa Kemenuh,
- Aksesibilitas baik, mudah dijangkau dari pusat-pusat wisata yang lain.

##### • **Kelemahan :**

- Adanya persoalan-persoalan yang muncul dalam pengembangan Sua Bali di bidang sosial, komunikasi, budaya, struktur kelembagaan dan lingkungan .

##### • **Ancaman :**

- Perkembangan pariwisata '*mass tourism*' di luar Kemenuh,
- Labilnya kondisi politik dan keamanan nasional Indonesia,
- Krisis ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.

##### • **Peluang :**

- Tersedianya perangkat kebijakan atau perundang-undangan yang mendukung,
- Adanya segmen pasar wisatawan ekowisata yang cukup besar,
- Adanya tanggapan positif dari dunia internasional terhadap keberadaan Sua Bali di Kemenuh,
- Adanya respon positif dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Analisis SWOT terhadap ekowisata desa Kemenuh mempertimbangkan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, serta hal-hal yang bisa mempengaruhinya. Faktor-faktor internal yang dianalisis adalah kekuatan dan kelemahan obyek, sedangkan yang termasuk faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman yang berasal dari luar yang berdampak pada pengembangan ekowisata Kemenuh.

### Analisis SWOT Pengembangan Ekowisata Kemenuh

	KEKUATAN/STRENGTH (S)	KELEMAHAN (W)
<b>INTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekowisata telah berkembang cukup lama dengan adanya Sua Bali.</li> <li>2. Desa Kemenuh telah dikenal sebagai sentra kerajinan patung kayu yang unik.</li> <li>3. Memiliki tingkat aksesibilitas yang baik, mudah dijangkau dari pusat-pusat pertumbuhan wisata yang telah ada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya persoalan-persoalan dalam relasi antara Sua Bali dengan banjar adat.</li> <li>2. Kesadaran warga yang masih rendah tentang kelestarian lingkungan</li> </ol>
<b>EKSTERNAL</b>		
PELUANG/ OPPORTUNITY(O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya kebijakan yang memadai tentang wisata ekologi.</li> <li>b. Terdapat segmen pasar ekowisata yang luas.</li> <li>c. Respon positif pihak eksternal terhadap Sua Bali.</li> <li>d. Respon positif dari pemerintah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan jaringan mitra ekowisata (stakeholders) (1-a)</li> <li>b. Mempromosikan ekowisata Kemenuh kepada segmen pasar yang sebelumnya belum terjamah. (1,2,3-c,d)</li> <li>c. Membina pengerajin-pengerajin patung dengan memberikan kesadaran ekowisata (3-e)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalin komunikasi konstruktif antara pihak Sua Bali dengan banjar adat.(1-c,d)</li> <li>b. Menjalin kerjasama yang lebih erat dengan karang taruna desa dengan dengan melibatkan mereka dalam program-program ekowisata Sua Bali(1-a).</li> <li>c. Melakukan upaya rekonsiliasi dengan pengurus adat untuk mencari solusi bersama dari permasalahan yang ada (1-a,c,d).</li> </ol>

ANCAMAN THREATS	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
a. Perkembangan mass tourism yang tengah booming di era tahun 90-an. b. Kondisi sosial politik yang otoritarian. c. Adanya krisis ekonomi berkepanjangan.	a. Melakukan penguatan institusi lokal (1,b) b. Melakukan deseminasi ekowisata guna mengcounter isu dan perkembangan masstourism.(1-a) c. Membantu para pengusaha dalam mencari peluang pemasaran baru untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi (3,4-c)	a. Merumuskan kontrak sosial dengan unsur-unsur masyarakat tentang wewenang dan tugas dalam mengembangkan ekowisata.(1,b) b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang besarnya ancaman <i>mass tourism</i>

## Ekowisata Tenganan

### a. Awal Mula Ekowisata

Desa Tenganan sangat potensial dikembangkan untuk pariwisata. Banyak potensi yang dapat dijual kepada wisatawan, namun apabila Desa Tenganan tidak dikelola secara terencana akan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat setempat. Tenganan selama ini dikenal sebagai desa Bali Age, artinya keaslian desa Tenganan merupakan potensi dalam mengembangkan pariwisata. Apabila keaslian desa tersebut terancam atau bahkan sampai punah maka Desa Tenganan tidak akan lagi mendapat predikat sebagai objek wisata budaya.

Selain dikenal sebagai daerah tujuan wisata, desa Tenganan juga merupakan desa agraris yang sangat potensial. Sejak dahulu masyarakat Tenganan sudah dikenal sebagai pemilik lahan yang luas. Menurut data yang Monografi desa, jumlah seluruh luas tanah garapan yang dimiliki oleh masyarakat Tenganan sekitar 1000 Ha. Tanah tersebut sebagian besar disakapkan pada petani upahan dari desa-desa tetangga.

Ketergantungan masyarakat Tenganan terhadap sektor pariwisata selama ini telah menggeser perhatian masyarakat

dari sektor pertanian, yang merupakan mata pencaharian warisan leluhur mereka. Perkembangan pariwisata telah menggeser pola mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris menuju sektor jasa khususnya jasa kepariwisataan. Namun sekitar tahun 90-an muncul pemikiran di kalangan pemuka-pemuka masyarakat Tenganan maupun kelompok masyarakat yang memiliki wawasan luas untuk lebih memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan eksistensi desa mereka. Muncul pemikiran-pemikiran kritis terhadap dampak pariwisata terhadap desa Tenganan. Pemikiran tersebut pada umumnya muncul dari anggota masyarakat yang telah memiliki wawasan yang lebih luas dari anggota masyarakat lainnya. Kalangan ini berpendapat bahwa perkembangan pariwisata selama ini telah menjadikan Desa Tenganan sebagai obyek perolehan PAD Pemerintah Daerah. Masyarakat Tenganan hanya menjadi tontonan para wisatawan yang berkunjung ke Tenganan, masyarakat Tenganan hanya memperoleh keuntungan yang sangat kecil dari kegiatan pariwisata.

Munculnya kegiatan ekowisata di Desa Tenganan diawali dengan beberapa tahap proses pendahuluan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tahap pertama adalah munculnya ide para pemuda desa Tenganan untuk mengembangkan wisata *Trecking*. *Trecking* merupakan bentuk perjalanan wisata yang dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri suatu kawasan yang memiliki karakteristik khas tertentu, baik dari segi ekologi, sosial maupun budaya. Terdapat beberapa alasan dipilihnya pengembangan wisata *Trecking* yaitu :

*Pertama*, alasan kurangnya keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata Tenganan selama ini seperti dikemukakan oleh salah seorang informan, yaitu NS :

“Selama ini kami hanya menjadi obyek dari pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah. Masyarakat tidak

dilibatkan sama sekali dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, padahal pariwisata Tenganan sudah memberikan banyak sumbangan kepada pemerintah. Pariwisata yang dikembangkan di sini sebaiknya adalah pariwisata yang berbasis masyarakat. Jadi masyarakat harus ikut serta dalam perencanaan pariwisata tersebut, jangan hanya duduk menjadi penonton saja...”

(wawancara tanggal 11 April 2000).

Informasi yang bersifat mendukung tentang lemahnya posisi masyarakat juga diungkapkan oleh pemuka adat Desa Tenganan, M.W:

“Selama ini pungutan parkir wisatawan semuanya diambil oleh Pemda, masyarakat hanya berpendapatan dari hasil penjualan souvenir/kerajinan dan karcis masuk saja. Sedangkan karcis masuk hanya ditentukan secara sukarela karena masyarakat khawatir kalau-kalau tamu mencap Tenganan materialistis.”

(wawancara tanggal 11 April 2000).

*Kedua*, adalah alasan ekologis. Desa Tenganan sebagian besar kondisi lahannya berupa hutan yang dilindungi adat. Keberadaan hutan lindung tersebut oleh beberapa masyarakat dianggap dapat terancam apabila wisatawan yang datang ke Tenganan tidak dibatasi .

Tahap berikutnya, para pemuda desa Tenganan tersebut menghubungi beberapa tokoh desa adat Tenganan untuk meminta saran dan pandangan. Salah seorang tokoh desa menyarankan untuk meminta bantuan pihak luar yang telah berpengalaman dalam mengelola pariwisata bercorak lingkungan. Pihak luar yang dimaksudkan tersebut adalah Yayasan Wisnu, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di Bali yang mempunyai perhatian dalam mengembangkan ekowisata Bali. Setelah melalui beberapa proses negosiasi, akhirnya Wisnu bersedia menjalin kerja-sama dengan kelompok masyarakat Tenganan dalam mempersiapkan

masyarakat agar pada masa mendatang mampu membuat perencanaan ekowisata sendiri.

Dari tahapan proses tersebut dapat diketahui bahwa ternyata inisiatif untuk mengembangkan ekowisata untuk pertama kalinya datang dari pihak masyarakat (kelompok pemuda). Hal ini berarti bahwa pengembangan ekowisata dirasakan sebagai suatu kebutuhan oleh masyarakat. Merujuk pada pemikiran Hofstede (1980) tentang tingkatan partisipasi yang meliputi partisipasi inisiatif, partisipasi legitimasi, dan partisipasi eksekusi, maka fenomena masyarakat Tenganan dapat dianalisis dengan pendekatan tersebut. Pada tahap awal ternyata masyarakat mempunyai inisiatif serta keinginan untuk mengembangkan ekowisata di desanya. Dengan rumusan yang agak berbeda dapat dikatakan bahwa proses partisipasi awal pengembangan ekowisata di desa Tenganan telah memenuhi logika *bottom-up*, di mana masyarakat ikut merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan ide-idenya tentang pembangunan.

Fenomena ini terlihat sebagai hal yang baru di luar kelaziman yang terjadi selama ini. Pada umumnya inisiatif perumusan program pembangunan umumnya datang dari pihak penguasa (pemerintah) dan masyarakat pada tingkat bawah hanya memiliki sedikit peluang di dalam ikut merencanakan program-program pembangunan tersebut.

Setelah kerja-sama disepakati, akhirnya Wisnu bersama dengan CO [*Community Organizer*] desa Tenganan menyusun langkah-langkah program yang akan dilaksanakan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mensosialisasikan gagasan ekowisata kepada masyarakat yang lebih luas melalui media musyawarah tradisional yang dimiliki oleh desa adat Tenganan, yaitu forum sangkepan. Sangkepan yang dipergunakan adalah sangkepan yang dihadiri oleh seluruh krama desa adat, hal ini bertujuan agar ide ekowisata dapat tersebar luas ke seluruh anggota desa adat, tidak hanya pada lapisan elite desa adat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam usaha perencanaan ekowisata di Tenganan. Sedangkan dipilihnya forum sangkepan sebagai media sosialisasi menunjukkan adanya keinginan dari pihak LSM sebagai agen luar untuk menghormati pranata-pranata lokal, bahkan dalam jangka panjang pilihan sikap Yayasan Wisnu seperti itu akan dapat memberdayakan fungsi sangkepan desa adat. Sikap Yayasan Wisnu tersebut dinyatakan sendiri oleh salah seorang pekerja Wisnu, IBY, sebagai berikut :

“Dalam forum persangkepan di Tenganan memang ada sesuatu yang menghambat proses demokratisasi, misalnya ada hierarki yang harus diikuti sehingga masyarakat biasa terkurangi haknya untuk mengeluarkan pendapat, mereka harus menunggu giliran bila ingin berbicara. Kami (Wisnu) sebagai fasilitator tidak akan merombak sistem yang telah ada dan tumbuh di sini, namun Wisnu akan memaksimalkan fungsi-fungsi media sangkep tersebut.”

(wawancara tanggal 12 April 2000)

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi digunakan untuk menyampaikan pengertian-pengertian umum tentang ekowisata, arti penting ekowisata, peran masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata dan fungsi Yayasan Wisnu sebagai LSM pendamping.

Setelah proses sosialisasi, di tingkat masyarakat pada awalnya muncul tanggapan atau sikap yang bersifat paradoks terhadap ide ekowisata, yaitu sikap setuju dan tidak atau kurang setuju. Pihak masyarakat yang setuju berpendapat bahwa dengan pengembangan ekowisata akan dapat tercapai dua tujuan sekaligus, yaitu tujuan pelestarian kebudayaan dan lingkungan desa, dan kedua, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan sektor pariwisata yang beresiko negatif seminimal mungkin. Sedangkan pihak yang tidak setuju berpandangan umum

bahwa apa yang telah berkembang selama ini di Tenganan sudah mencukupi kebutuhan masyarakat secara ekonomis. Mereka melihat program ekowisata yang akan dikembangkan terlalu rumit dan penuh resiko yang sulit diprediksi. Sikap penolakan sebagian anggota masyarakat tersebut tercermin dari pernyataan seorang informan, W.K, yaitu :

“ Sejak dulu banyak ahli-ahli yang mengadakan penelitian di sini sehingga mereka mendapat gelar yang hebat-hebat, jumlahnya mungkin puluhan. Tapi mereka tidak menyumbangkan apa-apa secara nyata kepada masyarakat kami. Pemerintah pun sama saja, sekitar 3 tahun lalu ada survei dari Bappeda dan Fak.Teknik UGM yang katanya bertujuan menjadikan desa kami sebagai desa wisata, kami ditanyai macam-macam, namun nyatanya sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya...”

(wawancara tanggal 15 April 2000)

Atau seperti yang diungkapkan oleh pekerja Yayasan Wisnu tentang pengalamannya ketika pertama kali datang ke Tenganan :

“Kami waktu pertama kali datang ke sini dikira orang pemerintah yang akan menjelaskan suatu program pembangunan dan akan melakukan riset. Kelihatan sekali dari sikap mereka kalau mereka telah jenuh sebagai obyek sekian puluh riset sejak dari jaman Belanda dulu sampai jaman pembangunan saat ini...”

(wawancara tanggal 15 April 2000)

Dari dua informasi di atas dapat diketahui bahwa sikap kontra sebagian masyarakat muncul karena pengalaman masa lalu masyarakat dalam berhubungan dengan agen luar yang selalu menjadikan mereka sebagai objek pembangunan. Kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan desa Tenganan selama ini yang selalu digaungkan sebagai salah-satu desa Bali Age di Bali membuat puluhan ilmuwan luar negeri dan

dalam negeri datang melakukan penelitian berbagai bidang di Tenganan, khususnya yang berkaitan dengan kekhasan Tenganan di bidang sosial budaya. Seperti sifat penelitian konvensional pada umumnya para ahli tersebut hanya menggali sumber pengetahuan di Tenganan tanpa adanya keinginan untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran atas hak-haknya.

Di samping faktor kejenuhan masyarakat Tenganan terhadap segala sesuatu yang berbau riset, sikap penolakan atau apriori sebagian masyarakat juga disebabkan oleh sikap mental masyarakat Tenganan sendiri, seperti dikemukakan oleh salah seorang informan :

“Saya susah mengajak teman-teman pemuda yang lain untuk terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Mereka tidak punya keinginan untuk maju, manja, dan telah merasa cukup puas dengan apa yang dinikmatinya saat ini. Padahal menurut saya kalau saja mereka membuka wawasannya sedikit saja, mereka akan bisa mengerti kalau desa kami selama ini hanya menjadi alat bagi pihak luar untuk mendapatkan dolar dan kami hanya memperoleh sedikit sekali...”

(wawancara tanggal 16 April 2000)

Sikap mental tersebut dikategorikan sebagai faktor internal yang menghambat proses pengembangan ekowisata. Sikap mental tersebut muncul dari dalam diri sebagian masyarakat yang berupa sikap puas dan manja. Sikap-sikap ini terbukti telah menghambat dalam melihat peluang-peluang baru dari perkembangan pariwisata nasional dan global. Fenomena ini oleh Paulo Freire(1970) disebutkan sebagai gejala kaum tertindas. Menurut Freire, melalui hegemonisasi telah menimbulkan sebagian besar masyarakat tertindas yang tidak menyadari dirinya berada dalam keadaan tertindas karena adanya hambatan-hambatan psikologi dari dalam dirinya sendiri.

## **b. Aktor-Aktor Ekowisata**

Pada saat ekowisata mulai disosialisasikan di Desa Tenganan, maka diperlukan suatu media untuk menyampaikan ide-ide/gagasan ekowisata. Dalam rangka pemikiran ini dapat digunakan analisis Grindle (1976) yang menyatakan bahwa dalam sebuah pelaksanaan suatu rencana diperlukan sebuah 'penghantaran' (*delivery system*) implementasi melalui media yang berfungsi sebagai saluran-saluran.

Kelancaran dan keberhasilan suatu rencana pengembangan sebuah program, tidak terlepas dari suatu pendekatan yang dilakukan baik itu yang bersifat formal maupun informal. Pendekatan formal lebih cenderung pada bentuk-bentuk prosedural birokratik yang memang telah dicanangkan dalam kerangka urusan hierarki pemerintahan di tingkat daerah. Sedangkan pendekatan informal lebih merujuk pada bentuk-bentuk pendekatan pada unsur di luar aspek prosedural yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara.

Kedua bentuk pendekatan tersebut memberikan kekuatan yang berbeda dalam mempengaruhi masyarakat, namun diantara keduanya terdapat sebuah hubungan yang bersifat saling melengkapi. Fenomena itu terjadi karena dalam masyarakat tidak hanya berisi hal-hal yang bersifat formal semata, tetapi di sana terkadang terdapat kekuatan-kekuatan yang berada di luar institusi formal yang memiliki power dan diakui serta dianut secara bersama oleh masyarakat. Oleh karena itu kekuatan ini tidak bisa diabaikan dalam proses pendekatan/sosialisasi di masyarakat .

Autar Singh (Alfitri, 1992 : 17) menyatakan terdapat tiga pendekatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan masyarakat, yaitu :

1. Pendekatan *posisional*, suatu bentuk pendekatan yang melihat keberadaan elit desa yang dapat ditelusuri melalui posisi-posisi mereka dalam lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di desa.
- 2.

3. Pendekatan *reputasional*, suatu bentuk pendekatan yang dilakukan dengan menentukan kejelasan keberadaan elit dengan melihat pengakuan (*recognition*) dari masyarakatnya.
4. Pendekatan *decisional* (pendekatan aksi), suatu bentuk pendekatan yang dilakukan dengan melihat penampilan nyata elit masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pendekatan-pendekatan pada kelompok elit seperti pendapat Autar Singh (1992) di atas setidaknya memiliki implikasi pada kondisi masyarakat Desa Tenganan karena pola-pola yang digunakan mendekati hal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan fenomena pada awal sosialisasi pengembangan ekowisata di desa ini. Pendekatan yang lebih informal, dalam arti pendekatan pada pimpinan informal di desa yang dilakukan pada tokoh-tokoh desa. Tentang hal tersebut ditunjukkan dengan ungkapan dari salah-satu informan dengan menyatakan:

“ Waktu pertama kali datang ke sini, Wisnu mendatangi Pak S., beliau mantan kepala desa di sini. Pak S. memang sangat dihormati di sini karena wawasan beliau yang luas, beliau pernah sekolah ke India tahun 80-an. Lalu setelah bertemu Pak S. barulah pihak Wisnu menghubungi Pak MW sebagai pimpinan adat di Tenganan. Seingat saya pihak Wisnu hampir tidak pernah mendatangi kantor kepala desa untuk minta izin atau lain-lainnya, paling kepala desa hanya sekedar diberikan surat pemberitahuan.”

(wawancara tanggal 13 April 2000)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa di samping peran sebagai tokoh dalam taraf sosialisasi tersebut, pimpinan informal yang dihubungi tersebut juga berpotensi sebagai mediator antara LSM dalam berhadapan dengan masyarakat.

### c. Pro dan Kontra Respon Masyarakat

Respon masyarakat merupakan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat setelah adanya suatu program tertentu. Dalam kasus ekowisata di Desa Tenganan, respon masyarakat mulai muncul setelah kegiatan sosialisasi dilakukan. Respon masyarakat tersebut terbagi ke dalam tiga kategori : respon positif (menerima ekowisata), respon negatif (tidak menerima atau kurang menerima ekowisata), dan respon yang netral (setengah menerima dan setengah menolak).

Kelompok masyarakat yang dapat menerima ide ekowisata dicirikan oleh tumbuhnya kesadaran mereka tentang pentingnya ekowisata dalam mensikapi perkembangan trend pariwisata massa. Kesadaran tersebut umumnya diperoleh setelah mereka mengikuti tahapan proses sosialisasi dan berbagai pelatihan dan workshop, seperti misalnya : pelatihan ToT (*training on trainers*), pelatihan CO (*Community Organizer*) dan pelatihan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Di samping itu proses penyadaran itu juga terjadi melalui kegiatan-kegiatan diskusi yang dilakukan antar anggota masyarakat maupun antar masyarakat dengan pendamping dari LSM. Hal ini diakui oleh informan N.S :

“ Saya dulu juga tidak mengerti apa dan untuk apa ekowisata itu, juga apa bedanya dengan kegiatan pariwisata yang selama ini telah berjalan. Didorong oleh rasa keingintahuan itu saya akhirnya bersedia mengikuti beberapa program pelatihan yang diadakan oleh Wisnu. Saya bahkan pernah ikut pelatihan sampai ke Madura, padahal sebelumnya saya belum pernah pergi ke luar Bali. Sekarang saya sudah mulai paham sedikit tentang ekowisata dan kenapa kami harus melakukan itu. Saya atas kesadaran sendiri mulai juga menyampaikan apa yang telah saya dapatkan itu kepada teman-teman lainnya di desa Tenganan.”

(wawancara tanggal 19 April 2000)

Pendapat yang hampir senada juga disampaikan oleh seorang sesepuh adat Desa Tenganan, M.W :

“Tadinya saya agak ragu-ragu untuk mengajak serta teman-teman lain untuk ikut mendukung ekowisata di sini, karena waktu itu saya sendiri belum paham betul tentang ekowisata. Hal ini termasuk hal baru bagi masyarakat di sini, termasuk saya. Namun setelah mengikuti pelatihan di desa Plaga tentang ToT, keyakinan saya tambah kuat . Sekarang setiap kesempatan bergaul dengan tetangga-tetangga saya gunakan untuk ngomongin masalah ekowisata...”

(wawancara tanggal 19 April 2000)

Pelatihan memang memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyadaran masyarakat. Pelatihan yang dirancang berdasarkan konsep andragogi (metode mendidik orang dewasa) memberikan kesempatan kepada pesertanya untuk belajar bersama dengan peserta lainnya tentang suatu topik. Di dalamnya tidak ada hubungan guru-murid, seperti umumnya sistem pendidikan yang berkembang saat ini, namun dalam pelatihan tersebut senantiasa menciptakan hubungan yang sejajar antar peserta dan fasilitator. Proses dialog yang terjadi tidak lagi satu arah atau dua arah melainkan ke segala arah, artinya setiap peserta adalah narasumber yang dapat membagikan pengalaman hidupnya kepada seluruh peserta. Dari pengalaman tersebut peserta yang lain berkesempatan mendiskusikannya secara luas sehingga pada akhirnya menghasilkan sintesa yang bermanfaat sebagai pengetahuan baru bagi seluruh peserta pelatihan.

Sedangkan pihak yang bersikap negatif ( menolak sampai kurang menerima) terhadap program pengembangan ekowisata menganggap bahwa ekowisata tidak akan mampu memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap masyarakat Desa Tenganan. Di samping itu ada juga sebagian warga masyarakat yang menganggap bahwa program ekowisata tidak begitu penting bagi masyarakat Tenganan. Pihak yang berpandangan demikian umumnya adalah masyarakat yang sudah banyak pengalaman dalam bidangnya, namun belum begitu memahami dengan baik

hal-hal yang berhubungan dengan ekowisata. Dengan kata lain telah terjadi bias informasi dalam memahami ekowisata. Fenomena ini misalnya tercermin dari seorang informan yang berprofesi sebagai kolektor tenun ikat dan sering mengikuti pameran di berbagai tempat, W.K :

“Menurut saya, apa yang dikerjakan oleh KSM ekowisata itu tidak terlalu penting, selama ini saya malah telah melakukan hal-hal yang lebih ‘besar’. Misalnya saya mengadakan pameran tenunan pegringsingan di Jakarta, bahkan hingga ke luar negeri.” (wawancara tgl 17 April 2000)

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa ternyata terdapat sikap kuarang positif dari sebagian warga masyarakat yang disebabkan karena faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekowisata. Kurangnya pemahaman masyarakat tersebut, bila ditelusuri lebih jauh diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh CO. hal ini diakui oleh informan WS :

“Kader pemuda yang telah aktif terlibat di KSM Ekowisata kurang berani melakukan sosialisasi, terutama yang amat terasa adalah kurangnya sosialisasi kepada *sekehe-sekehe* yang sebenarnya terlibat langsung nantinya dalam program ekowisata misalnya *subak, banjar*, dan lain-lain.”  
(wawancara tanggal 18 April 2000)

Sedangkan dari pihak pemuda mengungkapkan kesulitannya dalam memulai langkah sosialisasi yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti diungkap oleh NS :

“Kesulitan sosialisasi, menurut saya, disebabkan beberapa faktor, antara lain, pertama : karakter masyarakat Tenganan yang hanya bersedia melakukan sesuatu yang telah terbukti berhasil, mereka umumnya kurang tertarik terhadap sesuatu yang baru. Kedua, masyarakat traumatis dengan kasus-kasus proyek yang pernah terjadi di sini. Ketiga, interaksi antar warga masyarakat yang kurang.”  
(wawancara tanggal 15 April 2000)

Di antara masyarakat yang menerima dan menolak terdapat kelompok masyarakat yang bersikap moderat (netral) di dalam merespon program ekowisata. Kelompok ini berada di tengah-tengah, mereka pada umumnya masyarakat kebanyakan yang pandangan-pandangan dan sikapnya sangat tergantung pada seorang figur. Figur tersebut dapat berupa tokoh-tokoh formal maupun tokoh-tokoh informal yang ada di Desa Tenganan.

Kelompok masyarakat yang moderat tersebut secara riil sebenarnya mendukung program ekowisata karena gagasan ekowisata telah sempat dibicarakan dan diterima oleh *krama* (anggota masyarakat) Tenganan sampai pada tingkat forum sangkep tertinggi dalam sistem desa adat mereka. Dengan telah diterimanya program ekowisata berarti dalam pandangan mereka keputusan tersebut secara otomatis juga telah mengikat mereka secara langsung. Di sisi lain mereka mereka memang masih bersikap skeptis (ragu-ragu) terhadap program ekowisata karena kurangnya pemahaman mereka mengenai masalah ekowisata.

Peran institusi desa adat memang mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap respon masyarakat. Keputusan-keputusan desa adat dapat menjadi pedoman bagi sebagian besar masyarakat untuk menentukan sikap. Pada umumnya kalau suatu program telah disetujui secara resmi oleh Desa Adat maka warga desa adat pasti akan tunduk terhadap keputusan tersebut.

#### **d. Proses Perencanaan**

Kesadaran kritis yang dimiliki oleh anggota KSM Desa Tenganan merupakan faktor penting yang menjadi latar-belakang dan mendorong sebagian kelompok masyarakat Tenganan melakukan hubungan dengan Yayasan Wisnu pada awal tahun 1998. Yayasan Wisnu sebagai LSM yang mempunyai perhatian pada masalah kelestarian lingkungan menyambut keinginan masyarakat Tenganan tersebut dengan segera melakukan kontak kepada intitusi desa adat Desa

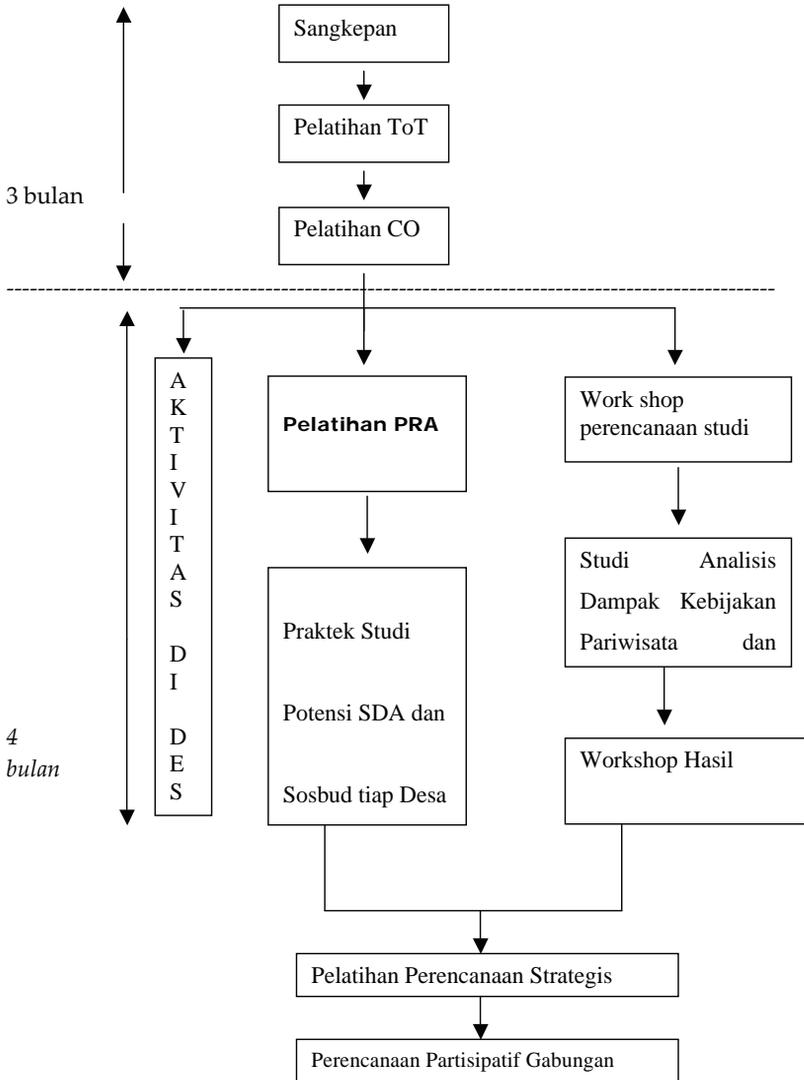
Tenganan. Selanjutnya Yayasan Wisnu mengadakan beberapa tahap sosialisasi melalui media sangkepan desa adat untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program ekowisata yang akan dikembangkan di Desa Tenganan.

Selanjutnya dengan kerja sama dengan Yayasan KEHATI Indonesia terbentuk team pengembangan ekowisata Bali yang terdiri dari 3 LSM (Wisnu, Manikaya Kauci, dan LBH Bali) dan Politeknik Negeri Bali. Team inilah yang akhirnya sepakat untuk mengembangkan program ekowisata di desa Tenganan sejak tahun 1998. Tujuan utama program ini adalah untuk memperkuat perlindungan terhadap nilai tradisi dan kepentingan masyarakat Tenganan sehingga tidak tergeser oleh kepentingan komersil berskala besar.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut team memandang sangat diperlukan adanya perencanaan bersama oleh masyarakat sendiri untuk mendapatkan konsep dan pola pengelolaan daerah wisata yang tepat. Hal ini diperlukan mengingat kawasan Tenganan memiliki kekayaan berupa potensi budaya tradisional dan potensi Sumber Daya Hayati yang cukup besar, sementara saat ini belum ada perangkat kebijakan yang memberi akses partisipasi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya ekosistem lokal. Seiring dengan itu pula, arus investasi dari luar sangat deras, dimana bila tidak ditangani dengan baik akan dapat menimbulkan dampak degradasi ekosistem dan konflik sosial.

Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahapan sosialisasi, Yayasan Wisnu dan KSM Tenganan berhasil membuat rencana program yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Seluruh tahapan kegiatan berlangsung selama 3 tahun dengan tahapan kegiatan pada tahun pertama mengarah kepada penyiapan masyarakat Desa Tenganan agar dapat melakukan perencanaan ekowisata secara mandiri.

Secara lengkap seluruh tahapan kegiatan tersebut dilukiskan dalam bagan berikut :



Gambar 4. Skema Aktivitas KSM Tenganan

Secara rinci tahapan-tahapan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

## Sangkepan

Tujuan *sangkep* ialah untuk menyamakan persepsi, visi dan misi tentang ekowisata antara masyarakat (KSM) dengan lembaga pendamping, yang dalam hal ini adalah Yayasan Wisnu. Di samping itu, melalui *sangkep* Yayasan Wisnu juga melakukan sosialisasi program ekowisata kepada masyarakat luas secara bertahap. Setelah melewati beberapa *sangkep* di desa Tenganan secara intensif, akhirnya Yayasan Wisnu mengumpulkan semua desa pilot project program ekowisata untuk mengadakan *sangkep* gabungan di desa Petang, Kabupaten Badung pada bulan Januari 2000. Sangkep tersebut dihadiri oleh semua perwakilan dari masyarakat dampingan.

## Pelatihan ToT(*Training on trainees*)

Pelatihan ToT dilaksanakan selama lima hari di desa Plaga. Ada beberapa materi yang dibahas bersama oleh para peserta, seperti : falsafah fasilitator, teknik memfasilitasi, media memfasilitasi (*ice breaker*, meta-plan, *energizer*, diskusi kelompok, ceramah, kuesioner, curah pendapat, studi kasus), sikap fasilitator, teori pendidikan, dan praktek memfasilitasi.

Tujuan pelatihan ToT adalah agar para peserta mempunyai ketrampilan dalam memfasilitasi sebuah proses diskusi dalam suatu kelompok. Dengan memiliki keterampilan menjadi fasilitator diharapkan nantinya anggota-anggota KSM dapat menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul di tingkat desa.

Setelah mengikuti pelatihan ToT anggota KSM memiliki semangat yang lebih tinggi dalam melakukan sosialisasi program ekowisata kepada warga masyarakat yang lainnya. Dengan memiliki ketrampilan sebagai pelatih mereka selalu memakai setiap kesempatan pertemuan untuk mensosialisasikan ide-idenya.

Di samping itu dalam pelatihan ToT tersebut, masing-masing desa juga diarahkan untuk menemukan akar permasalahan yang ada di desanya masing-masing. Adapun pohon masalah yang berhasil dirumuskan oleh KSM Tenganan adalah sebagai berikut (lihat lampiran)

### Pelatihan CO (*Community Organizing*)

Pelatihan CO (*community organizing*) dilaksanakan dengan maksud agar anggota KSM memahami seluk-beluk mengorganisir masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut materi yang diberikan meliputi : asas-asas pengorganisasian masyarakat, teknik-teknik pengorganisasian masyarakat, dan pemahaman terhadap persoalan yang ada pada tingkat desa masing-masing. Hal ini mengingat pentingnya peran pengorganisasian yang nantinya akan diperankan oleh seluruh anggota KSM ketika menghadapi masyarakat desanya.

Hal yang penting dalam proses pelatihan adalah ketika anggota KSM melakukan pemetaan terhadap persoalan yang terjadi di Desa Tenganan. Setelah melewati proses diskusi yang cukup panjang, mereka berhasil merumuskan peta persoalan yang tengah berkembang dalam masyarakat ke dalam sebuah matrik, sebagai berikut :

Tabel 4. Analisis Kepentingan Permasalahan Aktual  
Desa Tenganan

Pihak yang terlibat	Kepentingan
Pedagang kerajinan	Sumber pendapatan, Desa Tenganan sebagai tempat berdagang
Wisatawan	Wisatawan ingin melihat wajah desa sesuai dengan yang tercantum dalam promosi (brosur atau buku-buku).
Guide (pemandu)	Ingin agar Desa Tenganan tetap menjadi obyek wisata yang menarik.
Biro Perjalanan	Paket perjalanannya tetap diminati wisatawan
Desa adat	Wajah desa tetap lestari
Pemerintah daerah	Menjadikan Desa Tenganan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Sumber : Laporan Pelatihan CO Yayasan Wisnu, 2000

Banyak kalangan menyoroti tentang wajah Desa Tenganan yang tidak lestari, padahal wisatawan yang berkunjung ke sana menginginkan agar Tenganan tetap seperti gambaran yang pernah mereka baca dari promosi agen-agen perjalanan pariwisata di luar dan dalam negeri Indonesia. Mereka menginginkan Desa Tenganan tetap terkesan purba, misalnya : lantai rumah penduduknya terbuat dari tanah, atap rumah dari ijuk, suasana sepi senyap tanpa deru kendaraan bermotor, penduduk hanya sibuk dengan kegiatan ritual rutin tanpa pernah peduli dengan aktivitas kehidupan yang lainnya, dan lain-lain. Guide, pemerintah daerah, dan biro perjalanan wisata pun kurang lebih mempunyai harapan yang hampir sama dengan keinginan wisatawan. Mereka menginginkan perubahan wajah Tenganan seminimal mungkin demi menjaga daya tarik pariwisatanya.

Di pihak lain, masyarakat Desa Tenganan memiliki keinginan untuk mengikuti arus kemajuan modernisasi. Bagaimanapun juga, pengaruh-pengaruh luar yang masuk tidak semuanya dapat dibendung begitu saja. Pengaruh-pengaruh dari luar itu pada akhirnya akan merubah pola pikir masyarakat Desa Tenganan menjadi lebih modern dan konsumtif dan dengan cepat mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang ditawarkan oleh pihak luar. Mereka menjadikan bagian depan rumah tradisional mereka menjadi kios barang-barang kerajinan, demikian pula mereka pun tanpa canggung-canggung lagi memasang antena parabola di atas atap rumah mereka. Dari kondisi yang bertolak belakang tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara keduanya

### **Pelatihan PRA (*Participacy Rural Apraisal*)**

Pelatihan PRA diadakan dengan beberapa tujuan, antara lain :

1. Mengembangkan dasar kemampuan masyarakat untuk mengerti, menggali dan mengoptimalisasikan potensi masyarakat di bidang ekowisata melalui

metode partisipasi.

2. Mengembangkan dasar kemampuan merancang konsep pembangunan dan pengembangan ekowisata yang sesuai dengan potensi masyarakat Desa Tenganan.
3. Mengembangkan dasar kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi masyarakat. Masyarakat dapat terlibat sebagai subyek sekaligus pihak pertama yang menikmati perubahan, pembangunan di bidang pariwisata baik secara kultural maupun ekonomi.

Melalui pelatihan PRA, anggota KSM Desa Tenganan belajar secara bersama-sama merumuskan masalah, membahas, dan merancang secara mandiri cara pemecahan masalah tersebut. Untuk mencapai tujuan pelatihan, peserta pelatihan dilatih menggunakan salah satu alat atau metode PRA, yaitu membuat peta sketsa desa.

Peta sketsa desa adalah gambar pengetahuan lokal yang dibuat dengan tangan dan dari ingatan, biasanya digambar di atas kertas dengan pensil atau pensil warna. Untuk membuat peta sketsa tidak perlu memakai alat ukur, hitungan, alat-alat khusus atau pengetahuan teknis. Peta sketsa tidak dibuat dengan skala. Meskipun demikian peta sketsa yang digambar oleh masyarakat dari pengetahuan mereka dapat sangat detail (rinci) dan memuat pengetahuan lokal tentang desa yang akurat.

Peta sketsa adalah alat yang baik untuk diskusi internal masyarakat tentang konflik pemanfaatan lahan, masalah lingkungan, dan perencanaan pemanfaatan ruang. Dalam kenyataannya peta sketsa biasanya lebih efektif daripada peta teknis untuk diskusi internal antar masyarakat karena peta sketsa mudah dimengerti oleh siapa saja dengan sedikit latihan.

Dengan menggambar peta sketsa desa anggota KSM Desa Tenganan dapat lebih memahami pola dan struktur ruang desa mereka saat itu. Setelah melakukan penggambaran peta sketsa tersebut, akhirnya diketahui bahwa ternyata Desa

Tenganan memiliki areal hutan desa yang cukup luas dan selama ini potensi hutan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil diskusi dengan para orang tua desa yang membenarkan adanya potensi Sumber Daya Alam tersebut. Namun hal itu juga belum dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa karena terdapat ketidakadilan dalam sistem bagi hasil dengan para petani penyakap dari desa sekitar Desa Tenganan yang selama ini menggarap lahan tersebut.

Dukungan masyarakat Desa Tenganan terhadap penyelenggaraan pelatihan PRA cukup tinggi. Konstitusi desa adat mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut dengan mengizinkan KSM dan LSM Wisnu menggunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh desa adat, seperti penggunaan Balai Desa Adat (tempat pertemuan desa), penginapan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Masyarakat juga bergotong-royong dalam menyediakan konsumsi (makanan) untuk peserta pelatihan dari empat desa lainnya yang mengikuti pelatihan di Tenganan. Di samping itu, pengurus adat juga mengizinkan kegiatan pelatihan berlangsung sampai larut malam (di atas jam 22.00 Wita). Sikap pengurus desa adat tersebut menunjukkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap apa yang sedang dirintis oleh KSM Desa Tenganan dengan LSM Wisnu, karena dalam kondisi yang wajar peraturan adat Desa Tenganan melarang kegiatan-kegiatan berkelompok melewati jam 22.00 wita.

### **Pemetaan Partisipatif**

Pemetaan partisipatif dilakukan bersama-sama oleh anggota masyarakat dengan beberapa maksud, antara lain :

- Untuk mencatat dan mengesahkan pengetahuan lokal atau tradisional. Peta adalah cara yang paling jitu bagi suatu masyarakat untuk membuat catatan sejarah dan budaya dalam cara masyarakat melangsungkan kehidupannya di atas permukaan bumi. Bagaimana masyarakat menggunakan lahannya, di mana lokasi masyarakat menggunakan lahan dan sumberdayanya

sebagai tempat tinggal dan untuk memenuhi kebutuhan pangan merupakan hal yang penting untuk dipetakan. Yang penting juga untuk dipetakan adalah sejarah kawasan yang bersangkutan, hal ini dapat ditunjukkan dari nama-nama tempat, sungai, tempat suci/terlarang, tempat legenda dan tanah perkuburan.

- Untuk pengorganisasian rakyat dan meningkatkan kesadaran mengenai masalah-masalah tanah dan lingkungan. Peta juga dapat membantu menunjukkan perubahan lahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan trend yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sejalan dengan perubahan lahan dan perubahan kehidupan di suatu desa, peta dapat membantu setiap orang untuk sadar akan perubahan yang terjadi dan membahas perubahan itu bersama-sama. Bagaimana kegiatan pertanian suatu keluarga memberi dampak bagi keluarga yang lain? Semua pertanyaan ini akan lebih mudah dimengerti dan didiskusikan oleh setiap orang dengan bantuan peta. Peta merupakan alat yang tepat untuk menginisiatifkan diskusi dalam suatu masyarakat/komunitas serta membantu penduduk kampung untuk saling berbagi pengalaman, membahas perubahan yang terjadi pada kawasan mereka dan untuk membangun harapan masa depan yang mereka idamkan atas kawasan tersebut.
- Untuk perencanaan dan pengelolaan lahan masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya alam. Terdapat banyak masyarakat asli/indigenous yang telah melakukan pengelolaan lahan berkelanjutan dari generasi ke generasi.
- Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak luar. Peta merupakan alat visual untuk berkomunikasi dengan pegawai pemerintah, pengusaha dan pemilik industri, atau pengacara yang datang dari jauh dan memiliki pengaruh untuk mengambil keputusan atas

kawasan lokal.

- Untuk menegaskan dan menegosiasikan kepemilikan kawasan adat. Ketika suatu masyarakat asli (*indigenous community*) mensurvei batas-batas wilayah dan lokasi bersejarah dalam kampungnya, hal ini akan menunjukkan dan menentukan sejarah dimulainya wilayah tersebut didiami dan prioritas pemanfaatan yang ada.

Anggota KSM Ekowisata Desa Tenganan melakukan pemetaan setelah melakukan pelatihan PRA. Dalam proses pembuatan peta tersebut tidak terlalu dipentingkan persoalan-persoalan teknis pemetaan, seperti skala, kontur, gradasi warna atau hal-hal teknis lainnya. Namun lebih ditekankan pada pencapaian tingkat pemahaman masyarakat tentang kondisi sumber daya desanya sehingga selanjutnya dari pemahaman tersebut akan muncul sikap kritis terhadap setiap perkembangan yang terjadi.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pembuatan peta bukan hasil penggambaran peta yang diutamakan dan menjadi penting, melainkan yang lebih penting adalah proses pembuatan peta tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembuatan peta tersebut terjadi diskusi-diskusi antar warga masyarakat dalam membahas tema-tema tertentu dan dari proses tersebut menimbulkan kesadaran baru dari anggota masyarakat, misalnya :

- Masyarakat menyadari ternyata selama ini berlangsung proses ketidakadilan dalam bidang pembagian hasil panen dari lahan yang disakapkan kepada para petani desa-desa tetangga. Kesadaran tersebut muncul setelah mereka menghitung kembali luas tanah garapan yang dimiliki desa dan dibandingkan dengan hasil yang mereka dapatkan selama ini, ternyata hasil yang mereka terima sangat kecil.
- Masyarakat menyadari kembali bahwa ternyata ada beberapa sengketa tanah dengan desa tetangga seperti

Desa Bugbug. Sebagian masyarakat berkeyakinan bahwa tanah sengketa itu adalah tanah Tenganan. Sebelum melakukan pemetaan desa Bugbug pernah berjanji akan memberikan imbalan kepada Tenganan sebagai ganti rugi namun kenyataannya sampai saat dilakukan pemetaan tidak diberikan ganti rugi. Dari kasus tersebut krama desa adat Desa Tenganan menyadari bahwa sengketa tanah dengan desa penyanding harus diwaspadai sebagai salah satu bentuk ancaman dari luar desa.

- Ada batas-batas desa yang tidak jelas dan warga masyarakat yang mengetahui batas desa sangat terbatas jumlahnya. Dalam pembuatan peta desa yang dilakukan bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya batas-batas desa tersebut dirunut dan dipertegas lagi berdasarkan pada informasi(ingatan) tokoh-tokoh sepuh desa Tenganan. Pada akhirnya melalui kegiatan pemetaan masyarakat, khususnya generasi muda dapat mengetahui batas-batas desa Tenganan secara jelas. Pengetahuan ini menjadi penting untuk menghindari munculnya konflik-konflik tanah dengan desa tetangga dikemudian hari.

Sebelum melakukan pemetaan KSM memberitahukan secara resmi kepada desa-desa tetangga Tenganan bahwa akan dilakukan pemetaan desa Tenganan, KSM juga mengundang warga desa tetangga tersebut untuk datang pada saat penentuan batas desa. Demikian juga KSM akan melakukan sosialisasi setelah peta desa selesai dibuat. Jika seandainya dalam proses sosialisasi peta tersebut ada hal-hal yang tidak disepakati maka akan dilakukan perbaikan bersama-sama, jika sudah benar maka peta akan disahkan oleh masyarakat dan desa penyanding.

Berdasarkan peta desa yang dibuat masyarakat dapat melihat dengan lebih jelas potensi desa Tenganan sehingga dapat dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya

## **Kegiatan Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi masalah, mengawasi/melihat dan mengevaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut. Dalam proses monitoring dan evaluasi ukuran sukses harus sudah ditetapkan sejak awal. Penglihatan disertai dengan penilaian karena monitoring dan evaluasi bertujuan untuk membuat rencana ke depan.

Langkah pertama yang dilakukan anggota KSM Tenganan adalah menentukan visi dan misi bersama. Setelah misi telah berhasil dirumuskan, mereka kemudian mendesain model atau konsep. Konsep dibangun berdasarkan kondisi lokal yang terdapat di Desa Tenganan.

Adapun tahap-tahap kegiatan yang dilalui dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Desa Tenganan adalah sebagai berikut :

1. Membangun bersama rencana monitoring, membuat kesepakatan waktu dan hal-hal yang akan dimonitor. Dalam membangun rencana monitoring diikuti dengan membangun tujuan (jangka panjang dan pendek).
2. Melaksanakan kegiatan lapang dan monitoring.
3. Melakukan analisis data dan komunikasi hasil, klarifikasi dari perubahan yang terjadi.
4. Membuat rencana pengelolaan dan tindak lanjut.

### **d. Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan suatu metode analisis yang mendeskripsikan potensi dan masalah utama, peluang dan ancaman utama serta permasalahan yang harus dihadapi. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor-faktor dalam yang dapat dimanfaatkan atau perlu ditangani/diperbaiki akan menjadi peluang sedangkan apabila tidak ditangani akan menimbulkan tantangan/ancaman.

Berikut ini merupakan penjabaran isu-isu dari faktor-

faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman dari pengembangan ekowisata Tenganan :

**Kekuatan :**

- Fasilitas umum desa, bentuk, letak, serta jumlah masih terjaga dan terawat dengan baik.
- Pola desa tradisional Bali Age.
- Pola karang (rumah) tradisional masih terjaga,
- Panorama alam lingkungan sekitar desa berupa bukit dan hutan  
Bukit-bukit di sekitar Desa Tenganan seluas 583035 ha, bukit-bukit tersebut mempunyai pemandangan alam yang sangat indah, dari puncak bukit terlihat dua pemandangan yang cukup indah ke arah lembah (sawah dan Pantai Candidasa) dan ke arah gunung (Gunung Agung).
- Dukungan infrastruktur sudah berkembang
- Sasaran kunjungan wisatawan asing,
- Merupakan produk andalan *tour operator* (pengelola paket wisata)
- Dukungan hasil kerajinan khas,
- Dukungan atraksi kesenian berupa tari Mekare (perang pandan),
- Kegiatan upacara keagamaan menonjol dan unik.

**Kelemahan :**

- Kebersihan lingkungan kurang terjaga disebabkan oleh kotoran hewan,
- Semakin banyak rumah yang membuka kios cinderamata merusak tata lingkungan fisik desa,
- Keterbatasan dukungan infrastruktur lain,
- Kualitas dan keberagaman obyek/daya tarik yang berupa desa tradisional mulai berkurang,
- Budaya etnik sudah mulai luntur,
- Sikap sadar akan pelestarian lingkungan binaan rendah,
- Belum ada penegelolaan sirkulasi
- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang ekowisata.

**Peluang :**

- Sikap positif masyarakat dalam menerima kunjungan wisatawan,
- Kedekatan dengan kawasan wisata Candidasa, Candidasa merupakan kawasan wisata yang berkembang pesat dan berjarak 4,5 km dari desa Tenganan. Kawasan ini sangat penting dikaitkan dengan pengembangan Desa Tenganan karena mempunyai kelengkapan fasilitas-fasilitas wisata, seperti : hotel, homestay, restoran, dan sebagainya.
- Pencapaian yang mudah,
- Kondisi ekonomi mantap,
- Diversifikasi atraksi,
- Kebutuhan guide lokal,
- Adanya hutan lindung dan bukit dengan panorama alam yang indah.

**Tantangan :**

- Menurunnya kualitas lingkungan fisik akibat belum sadarnya masyarakat akan kebersihan,
- Belum adanya manajemen pengelolaan kepariwisataan,

Secara utuh rumusan analisis SWOT dan strategi pengembangan ekowisata desa Tenganan dapat dilihat dari matrik berikut ini :

### Analisis SWOT Pengembangan Ekowisata Tenganan

	KEKUATAN/STRENGTH (S)	KELEMAHAN (W)
<b>INTERNAL</b>   <b>EKSTERNAL</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas umum desa, bentuk, letak masih terjaga dan terawat baik.</li> <li>2. Panorama alam dan lingkungan yang indah.</li> <li>3. Telah lama dikenal sebagai obyek wisata.</li> <li>4. Terdapat hasil kerajinan khas.</li> <li>5. Budaya unik dan khas.</li> <li>6. Sikap positif masyarakat dalam menerima wisatawan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebersihan desa kurang.</li> <li>2. Perubahan pekarangan depan menjadi artshop.</li> <li>3. Terancamnya wajah desa tradisional.</li> <li>4. Melunturnya budaya tradisional.</li> <li>5. Kurangnya kesadaran lingkungan masyarakat.</li> <li>6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekowisata.</li> </ol>
PELUANG/ OPPORTUNITY(O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kedekatan dengan obyek wisata Candi Dasa.</li> <li>b. Aksesibilitas yang baik.</li> <li>c. Tersedianya perangkat kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekowisata.</li> <li>d. Respon positif dari pemerintah.</li> <li>e. Adanya jaringan ekowisata nasional (MEI)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, seperti pengembangan kerajinan (4-a,b,d,e)</li> <li>- Bekerjasama dengan unit-unit pariwisata di Candidasa untuk mempromosikan ekowisata Tenganan (2,4,5-a,b)</li> <li>- Merumuskan potensi-potensi ekowisata Tenganan yang dapat dipublikasikan secara luas lewat MEI (2,4,5-e).</li> <li>- Melakukan pendekatan kepada lembaga legislatif (DPRD) untuk membuat perda ekowisata di Bali.(5,6-d)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan upaya-upaya penyadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan.(1-d,e)</li> <li>- Memperkuat kelompok kesenian tradisional dengan bekerjasama dengan pihak luar. (4-b,d).</li> <li>- Menyusun Tata Ruang Desa secara partisipatoris guna memperkuat daya tawar masyarakat lokal terhadap supra desa(2,3-c).</li> <li>- Meneruskan kegiatan pelatihan dan workshop dengan jaringan mitra (6-e)</li> </ul>

ANCAMAN THREATS	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<p>d. Perkembangan mass tourism yang tengah booming di era tahun 90-an.</p> <p>e. Kondisi sosial politik yang otoritarian.</p> <p>f. Adanya krisis ekonomi berkepanjangan.</p>	<p>d. Melakukan penguatan institusi lokal (1,b)</p> <p>e. Melakukan deseminasi ekowisata guna mengcounter isu dan perkembangan masstourism.(1-a)</p> <p>f. Memberikan informasi kepada wisatawan yang datang ke Tenganan tentang citra desa Tenganan sebagai desa ekowisata (3-a,b,c)</p>	<p>c. Merumuskan kontrak sosial dengan unsur-unsur masyarakat tentang wewenang dan tugas dalam mengembangkan ekowisata. (1,b)</p> <p>d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang besarnya ancaman <i>mass tourism</i>.</p>

## **BAB V**

### **DINAMIKA EKOWISATA KIADAN, PLAGA**

**P**ADA bab ini, dipaparkan proses pengembangan ekowisata di Banjar Kiadan, Desa Plaga, Badung. Pada saat penelitian dilakukan di Kiadan (bulan Januari-Juni 2008), kegiatan ekowisata telah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang bagi perjalanan sebuah program pengembangan pariwisata komunitas. Banjar Kiadan menjalani proses yang mirip dengan Desa Tenganan, karena sama-sama menjadi anggota JED (Jaringan Ekowisata Desa) dengan didampingi oleh Yayasan Wisnu. Namun dalam beberapa aspeknya, Kiadan mengalami proses perkembangan yang khas sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

Pembahasan ekowisata Kiadan akan lebih difokuskan pada respon masyarakat terhadap program ekowisata yang telah berlangsung cukup lama. Selain itu penulis mencoba membandingkan realitas pengembangan ekowisata di Kiadan dengan rumusan prinsip-prinsip ekowisata.

#### **Proses Perkembangan Ekowisata Kiadan**

Proses perkembangan ekowisata Kiadan dapat dipilah menjadi tiga fase atau tahapan perkembangan, yaitu 1) tahap perintisan, 2) tahap penguatan, dan 3) tahap pengembangan. Masing-masing tahapan dicirikan oleh beberapa peristiwa dengan karakteristiknya yang khas. Secara sederhana perkembangan tersebut dapat dilihat dalam matrik Matrik 5.1

Matrik 5.1 Tahapan perkembangan ekowisata Kiadan

Tahapan (Jangka waktu)	Peristiwa penting	Karakteristik
<i>Tahap Perintisan</i> ( 1 9 9 9 - 2002)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengorganisasian masyarakat&amp;peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan workshop.</li> <li>• Perencanaan dan pemetaan potensi wilayah desa.</li> <li>• Sosialisasi program di Kiadan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran masyarakat tentang ekowisata masih rendah.</li> <li>• KSM masih amat tergantung kepada LSM pendamping.</li> <li>• Program masih bernuansa proyek.</li> </ul>
<i>Tahap Penguatan</i> ( 2 0 0 2 - 2004)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Susunan LSM pendamping.</li> <li>• Pemutusan kerja sama dengan Yayasan Kehati.</li> <li>• Pembentukan JED.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai tumbuh kemandirian dan percaya diri.</li> <li>• Ketergantungan terhadap LSM berkurang, mulai tumbuh inisiatif lokal.</li> <li>• Melepas ketergantungan kepada dana funding.</li> <li>• Inisiatif untuk membentuk jaringan antar desa.</li> <li>• Sempat terjadi kevakuman kunjungan wisatawan.</li> </ul>
<i>Tahap Pengembangan</i> ( 2 0 0 4 - 2008)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai ada kunjungan wisatawan.</li> <li>• Menyelenggarakan pelatihan mandiri dengan menggunakan dana koperasi/KSM.</li> <li>• Mencoba bentuk-bentuk kegiatan lain, seperti sekolah banjar, <i>organic farming</i>, energi alternatif, dsb.nya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Ekowisata semakin profesional.</li> <li>• Aktivis koperasi ekowisata Kiadan semakin percaya diri menjalankan ekowisata.</li> </ul>

Sumber: analisis data primer

## 1. Tahap Perintisan

Tahapan perintisan diawali dengan kontak perkenalan sejumlah tokoh masyarakat Kiadan dengan beberapa aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan kampus. Dalam ingatan Nyoman Juta dan Made Japa pertemuan pertama kali mereka dengan salah satu aktivis yakni Ida Bagus Bintana dari Politeknik Negeri Bali, terjadi dalam sebuah pelatihan agrowisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Badung di Desa Belok Sidan. Melalui Bintana, kemudian Juta dan Japa diperkenalkan dengan beberapa aktivis dari Yayasan Wisnu, seperti Made Suarnata dan Ida Bagus Kade Yoga Atmadja. Lewat beberapa kali proses dialog akhirnya Yayasan Wisnu sepakat menjadikan Banjar Kiadan sebagai salah-satu desa dampingan dalam perintisan program ekowisata.

Pada saat itu, Yayasan Wisnu dengan beberapa lembaga lainnya berencana hendak menjalankan sebuah bentuk pariwisata rakyat yang ramah lingkungan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan terhadap *mass tourism* yang tengah berkembang pesat di Bali. Penolakan terhadap bentuk pariwisata massal, yang dipandang sebagai pengejawantahan dari sistem kapitalisme global, dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada tanpa melakukan eksploitasi berlebihan. Minimal Yayasan Wisnu dengan tim ingin mendesain sebuah model pengembangan pariwisata yang tidak melibatkan investor besar.

Selain alasan tersebut, pengembangan ekowisata juga diharapkan dapat menjawab permasalahan lingkungan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Dengan menjalankan ekowisata masyarakat diharapkan dapat mandiri dengan mengembangkan pariwisata yang dimiliki sendiri oleh masyarakat, sehingga keuntungan terbesarnya akan dinikmati oleh masyarakat sebagai pemilik sumber daya alam lokal.

Gagasan yang berkembang kemudian direalisasikan dalam wujud proposal yang kemudian diajukan ke Yayasan KEHATI Jakarta. Sebagai lembaga *funding* (pemberi dana), ternyata KEHATI merespon gagasan tersebut dengan

menyetujui proposal perintisan ekowisata di Bali. Akhirnya terjalin kerjasama antara KEHATI dengan beberapa pihak di Bali, seperti Yayasan Wisnu, Yayasan Manikaya Kauci, dan UPPM Politeknik Negeri Bali, pada tahun 1999. Yayasan Wisnu kemudian merangkul lima desa di Bali untuk dijadikan desa dampingan untuk merintis ekowisata, salah satunya adalah Banjar Adat Kiadan.

### **Pengorganisasian Masyarakat**

Setelah melewati serangkaian proses, akhirnya proposal yang diajukan kepada KEHATI, direspon positif (disetujui untuk didanai). Maka sejak saat itu secara resmi beberapa pihak yang telah terhimpun memulai sebuah rangkaian panjang proses pengembangan ekowisata di Bali. Program yang berhasil tersusun direncanakan untuk dijalankan dalam tiga tahun. Kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama (1999) merupakan program persiapan melalui pengenalan atau identifikasi sumber daya alam dan sosial budaya, pengembangan kelembagaan, serta peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building*).

Tipe kegiatan pada tahun pertama masih pada tataran pengembangan kapasitas individu dan kelembagaan, hampir tidak ada dana kegiatan untuk pembangunan fasilitas ekowisata. Hal tersebut, menurut Direktur Yayasan Wisnu, Ir Made Suarnata, memang disengaja, setelah melihat kondisi kesadaran masyarakat lima desa yang masih rendah.

Tahun pertama adalah tahapan untuk mengajak masyarakat melihat bersama persoalan kewilayahan desa masing-masing. Kami malah belum menyebut istilah ekowisata pada saat itu. Tujuannya agar masyarakat menjalankan ekowisata nantinya berangkat dari potensi dan permasalahan yang dimilikinya. Bukan sesuatu yang berasal dari 'atas'. Jadi, ada kesadaran bahwa ekowisata bukan merupakan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu keberlanjutan sumber daya alam.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antar lima desa, yaitu *sangkep*, pertemuan untuk membicarakan program; serta pelatihan dan workshop untuk peningkatan kapasitas individu dan lembaga, seperti pelatihan untuk fasilitator, pelatihan pengorganisasian masyarakat, pelatihan pemetaan, dan pelatihan pembuatan rencana strategis.

Kegiatan utama dalam tahun pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan keseluruhan program yang akan dilakukan dalam kegiatan ekowisata kepada segenap lapisan masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara formal dengan membuka resmi program ekowisata di Banjar Kiadan, melalui *sangkep* banjar. Dalam proses *sangkep* tersebut pihak penyelenggara program menjelaskan kepada prajuru banjar adat serta krama banjar mengenai aktifitas yang akan dijalankan di lima desa.

Setelah sosialisasi beberapa pihak di masyarakat mempertanyakan sistem pendanaan yang dibiayai oleh Yayasan KEHATI. Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya muncul dalam obrolan-obrolan tidak resmi di warung-warung. Masyarakat menganggap program yang dibawa oleh Wisnu, dan jaringannya akan mirip dengan proyek pemerintah, di mana sering berlaku adagium 'ada proyek pasti ada uang'. Secara perlahan-lahan staf Yayasan Wisnu yang bertugas di lapangan menjawab pertanyaan warga terkait soal pendanaan dan program secara umum. Dijelaskan pula bahwa pendanaan KEHATI hanya bersifat sementara, yaitu maksimal tiga tahun, setelah itu masyarakat harus dapat mencari sumber dana sendiri untuk meneruskan program ekowisata.

Selain kegiatan sosialisasi, dalam tahun pertama juga diadakan beberapa jenis pelatihan dan workshop. Pelatihan dan workshop merupakan media untuk memperoleh wawasan dan keterampilan tentang pengorganisasian masyarakat dan pengelolaan ekowisata. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (kemampuan) masyarakat desa

dalam menjalankan program ekowisata. Beberapa pelatihan dan *workshop* yang diikuti Banjar Kiadan bersama empat desa lainnya, yaitu pelatihan ToT (*Training on Trainers*), Pelatihan CO (*Community Organizer*), PRA (*Participatory Rural Appraisal*), pemetaan partisipatif, pelatihan guide lokal, pelatihan F&B (*Food and Beverage*) dan pengelolaan keuangan dan usaha. Beberapa pelatihan dan *workshop* yang dilaksanakan di Banjar Kiadan, antara lain pelatihan CO, F&B. Sementara utusan empat desa lainnya datang ke Kiadan menjadi peserta pelatihan. Dalam setiap lokakarya dan pelatihan disi oleh fasilitator dan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya.

Media *workshop* dan pelatihan ternyata cukup efektif dalam memberikan peluang yang sama dan adil bagi semua pihak untuk memberikan kontribusi dan pertimbangan-pertimbangan terhadap rencana pengembangan ekowisata di Banjar Kiadan. Selain itu *workshop* juga menjadi media yang efektif bagi setiap pihak untuk saling tukar informasi dan pengalaman tentang pengelolaan sumberdaya dan teknik penyusunan rencana. Diskusi-diskusi dalam acara-acara tersebut bisa memfasilitasi setiap pihak untuk belajar tentang apa yang dipikirkan oleh pihak lain, bagaimana mereka bertindak, apa hasil tindakan tersebut dan bagaimana semua itu dipadukan dengan kepentingan pengembangan ekowisata. Sebagian besar peserta *workshop* mengalami transformasi kesadaran setelah mengikuti serangkaian *workshop*. I Gede Wiratha, guide lokal Banjar Kiadan, mengaku mendapatkan inspirasi yang kuat pada saat mengikuti *workshop*/pelatihan pemandu :

Saya ikut terlibat menjadi peserta Pelatihan Pemandu Lokal di Tenganan. Ketika itu saya sangat tertarik dengan pelatihan tersebut. Saya merasa mendapat dorongan untuk mengembangkan desa dari fasilitator pelatihan. Ketika itulah saya mendengar dan setuju dengan kalimat: untuk apa bekerja di luar desa. Sampai saat ini saya selalu bersyukur, ketika saya memutuskan kembali ke desa. Walaupun tidak ada banyak

uang, tetapi dada dan kepala saya hampir tidak pernah rasa sesak (lagi). Saya semakin bersyukur ketika memutuskan untuk selalu belajar mengenal lebih baik desa saya dengan cara menjadi pemandu ekowisata. Saya tetap menjadi petani, dan juga bisa menjadi pemandu.

Wiratha sebelumnya pernah bekerja sebagai *guide* dan biro *travel agent* di Denpasar selama 10 tahun. Namun setelah ada program ekowisata di Kiadan, ia memutuskan untuk ikut terlibat mengelola program tersebut dengan menjadi pemandu lokal.

### **Pemetaan Wilayah Desa**

Selain kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelima desa, ada juga kegiatan yang harus dilakukan di masing-masing desa, yaitu pemetaan wilayah desa, termasuk di Banjar Kiadan. Pemetaan wilayah menjadi kegiatan terpenting di awal perencanaan ekowisata, karena melalui pemetaan akan diketahui potensi desa yang sesungguhnya sehingga akhirnya akan dapat diperkirakan jenis atraksi apa yang sesuai untuk dijalankan nantinya. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui faktor-faktor pembatas wilayah yang ada di desanya, misalnya keberadaan lahan kritis, area-area rawan longsor, dan sebagainya. Pengetahuan kewilayahan tersebut selanjutnya bisa menjadi dasar model konservasi lingkungan yang akan dilakukan.

Pemetaan wilayah Banjar Kiadan memiliki arti strategis dalam kaitannya dengan perencanaan ekowisata, karena melalui pemetaan terjadi proses penguatan dan pengorganisasian masyarakat sehingga masyarakat Kiadan mampu dalam membuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat dan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pemetaan wilayah merupakan langkah awal dalam perencanaan ruang dan kawasan. Selama proses pemetaan masyarakat Banjar Kiadan mempelajari lebih jauh perihal kekayaan sumber daya alam yang ada, selanjutnya

masyarakat mencoba menyusun sistem pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan.

Proses pemetaan di Banjar Kiadan diawali dengan pembuatan peta sketsa wilayah Kiadan berdasarkan pengetahuan lokal dan peta mental masyarakat Kiadan. Peta sketsa dikerjakan secara berkelompok berdasarkan gender, umur, dan pekerjaan. Dari peta sketsa yang dihasilkan, diketahui bahwa ada pengetahuan yang berbeda tentang wilayah berdasarkan kelompok yang membuat, tetapi secara menyeluruh diketahui bahwa masyarakat tidak mengetahui potensi wilayah secara mendalam, terlebih lagi jika dikaitkan dengan luasan atau besar potensi yang dimiliki.

Peta sketsa merupakan dasar untuk melakukan pengukuran wilayah dengan pengambilan data di lapangan. Pengukuran dilakukan menggunakan alat sederhana berupa meteran dan kompas untuk mengukur jarak dan sudut. Selain itu tim pemetaan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) untuk mengetahui posisi titik koordinat dan pada akhirnya kawasan Kiadan secara keseluruhan di muka bumi, yaitu titik Lintang dan Bujur. Data yang telah diambil kemudian dipindahkan ke dalam kertas milimeter untuk selanjutnya digambar di atas kertas kalkir. Dalam melakukan pemetaan masyarakat dibantu oleh fasilitator dari Yayasan Wisnu, terutama dalam penggunaan alat-alat pemetaan yang sudah barang tentu merupakan alat-alat yang asing bagi sebagian besar warga Kiadan sebelum melakukan pemetaan.

Pemetaan wilayah Kiadan yang berlangsung selama enam bulan memberikan banyak manfaat dan pelajaran bagi warga Kiadan yang terlibat di dalamnya. Pada saat memulai pemetaan, tim pemetaan yang sebagian besar anggota KSM, dihinggapi keraguan. Mereka tidak yakin terhadap kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan yang cukup berat, yakni memetakan wilayah dan potensi desa mereka. Di lain sisi banyak pula anggota tim yang meragukan manfaat dari kegiatan pemetaan tersebut. Seperti terungkap dari pernyataan seorang warga Kiadan, Wardana, yang bekerja

sebagai petani berikut ini :

Sebagian masyarakat Kiadan menganggap kegiatan pemetaan wilayah pada waktu itu seperti main-main, tanpa manfaat yang jelas, dan hanya membuang-buang duit program. Kenapa tidak langsung saja membangun fasilitas ekowisata, seperti penginapan, restoran, dan sebagainya? Tentu akan lebih bermanfaat.

Namun berkat dorongan dari koordinator KSM, Nyoman Juta, dan pendamping dari Yayasan Wisnu, kegiatan pemetaan akhirnya berjalan juga.

Pengambilan data di lapangan, penggambaran data ke dalam kertas, hingga digitasi peta, seluruhnya dilakukan oleh masyarakat Kiadan. Pihak lain hanya bersifat sebagai pembantu teknis, kaitannya dengan masalah teknis yang dihadapi masyarakat ketika melakukan pemetaan. Berangkat dari pengetahuan lokal tentang wilayahnya lewat peta sketsa atau peta mental, kemudian dipadukan dengan pengetahuan tentang teknis pemetaan sederhana, masyarakat dapat menghasilkan peta partisipatif yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Peta yang telah berhasil dibuat sampai selesai adalah peta dasar yang terdiri dari batas wilayah dan jalan, peta potensi, peta DAS (Daerah Aliran Sungai), peta permukiman, serta peta tiga dimensi/maket.

Ternyata dalam proses pemetaan yang dilakukan oleh kelompok kecil ini, banyak kendala dan masalah yang dihadapi diantaranya ketidakpedulian masyarakat banjar, sinisme dari beberapa orang bahwa mereka melakukan pemetaan karena ada banyak uangnya dan sebagainya. Di samping kendala dari masyarakat sendiri, medan yang cukup berat dan waktu yang lama membuat mereka jenuh dan proses pemetaan pun mengalami pasang surut. Namun berkat tekad dan semangat beberapa orang ini, akhirnya proses pemetaan dapat mereka selesaikan dengan baik.

Berbulan-bulan anggota tim menyusuri seluruh wilayah Kiadan untuk melakukan pencatatan dan pengukuran terhadap berbagai aspek sesuai dengan panduan dari fasilitator pemetaan. Mereka menjelajahi hamparan kawasan tegalan, perkebunan, pemukiman, jurang-jurang, yang ada di Kiadan, sambil mendeliniasi, mencatat berbagai vegetasi, jenis tanah, kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan atribut geografis lainnya (Lampiran 3.b.). Selama pemetaan terjadi proses dialog antar berbagai elemen, generasi, dan kelompok masyarakat di Kiadan. Berbagai pengetahuan lokal tentang potensi sumber daya alam yang selama ini hanya membekap dalam pemikiran para orang tua dikeluarkan untuk kemudian dipertanyakan dan dicatat oleh generasi yang lebih muda.

Di akhir proses pemetaan tim pemetaan menghasilkan dua temuan penting terkait keberadaan potensi wilayah banjir Kiadan :

1. Batas-batas wilayah banjir adat Kiadan dengan banjir adat lainnya menjadi lebih tegas dan jelas. Batas-batas tersebut lebih banyak berupa kawasan jurang (*pangkung*), terutama batas-batas di sebelah barat dan timur banjir. Dalam penyusunan program selanjutnya, kawasan-kawasan jurang tersebut dijadikan wilayah konservasi dengan menanam dengan pohon bambu.
2. Penemuan beberapa buah sumber mata air di kawasan hutan lindung bagian barat pemukiman, yang memiliki debit air cukup besar. Penemuan mata air ini menjadi makna penting dari kegiatan pemetaan dan menghilangkan keragu-raguan anggota tim peta tentang manfaat pemetaan. Di waktu selanjutnya, mata air tersebut dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga warga Kiadan dengan mengalirkannya ke depan pekarangan rumah warga Kiadan.

Peta yang telah selesai kemudian disosialisasikan kepada masyarakat secara keseluruhan melalui *sangkep* banjir. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk klarifikasi terhadap peta yang

sudah dibuat. Walaupun sifatnya partisipasi aktif, tetapi hanya beberapa orang yang terlibat secara intensif, sehingga perlu dilakukan klarifikasi. Setelah dilakukan perbaikan, dilakukan digitasi terhadap peta yang dihasilkan, yaitu mengubah data manual ke dalam bentuk digital lewat komputer.

### **Pembuatan Rencana Pengelolaan Ruang Kawasan**

Dalam perjalanannya, proses pembuatan peta tersebut sekaligus merupakan pembelajaran secara langsung bagi masyarakat Kiadan untuk mampu memahami wilayah, potensi sumber daya alam dan sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Berdasarkan proses pembelajaran tentang potensi dan masalah tersebut, maka masyarakat Banjar Kiadan mampu membuat Rencana Pengelolaan Ruang dan Kawasan (RPRK) untuk lima tahun ke depannya.

Penyusunan rencana pengelolaan ruang dan kawasan beserta aturannya diawali dengan *sangkep* Banjar Kiadan yang menetapkan 25 *krama banjar* sebagai wakil untuk membuat RPRK Banjar Kiadan. Penyusunan rencana pengelolaan ruang dan kawasan beserta aturannya dilakukan oleh kedua puluh lima wakil *krama banjar* tersebut, yang selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh *krama banjar* melalui *sangkep* untuk mencari kesepakatan.

Hasil perencanaan semakin memperkuat keyakinan masyarakat Kiadan, terutama kelompok fasilitator lokal, dalam memfasilitasi masyarakat. Perlahan-lahan para aktifis KSM mendapat gambaran yang jelas tentang pola dan posisi ekowisata dalam peta pariwisata secara umum. Nyoman Juta, selaku koordinator program, misalnya mulai menyadari bahwa bentuk pariwisata yang akan dikembangkan di Kiadan bukanlah bentuk pariwisata seperti yang dikembangkan oleh pemodal besar (investor) dengan membangun hotel atau *villa*, restoran, dan lapangan golf, melainkan pariwisata yang berbasis kerakyatan berupa ekowisata.

Awalnya, kami memang sempat kebingungan dengan program yang kami jalankan bersama. Kenapa harus mengikuti

banyak pelatihan?kenapa harus melakukan pemetaan segala? Kenapa tidak langsung berlatih menjadi guide saja? Akhirnya setelah melewati serangkaian proses, saya pribadi semakin menyadari bahwa pariwisata yang akan coba dikembangkan sama sekali berbeda dengan bentuk-bentuk wisata yang sudah umum di daerah lainnya di Bali.

Dari pernyataan Juta di atas tersirat sebuah kesadaran tentang karakteristik pariwisata baru yang akan dikembangkan di Kiadan, yakni sebuah bentuk pariwisata yang melibatkan sebagian besar potensi dan kemampuan masyarakat lokal dan pariwisata yang mempunyai dampak negatif minimal bagi lingkungan.

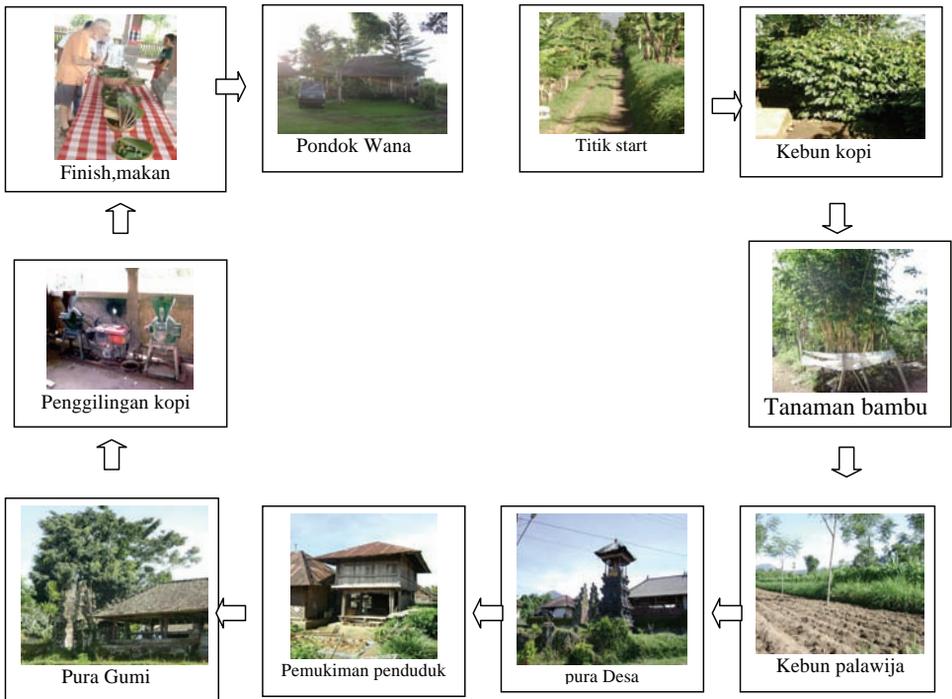
Kegiatan pemetaan wilayah memberikan pemahaman kepada warga yang terlibat tentang keberadaan potensi wilayah Banjar Kiadan dan batas-batas kepemilikan desa secara jelas. Proses menuju kepemilikan yang lebih jelas ini memotivasi masyarakat untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya alam dan budaya secara berlanjut. Tahapan untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas itu segera dimulai setelah proses pemetaan wilayah selesai dilakukan.

Beberapa wilayah yang kritis dan rawan terkena bencana longsor mulai ditanami tanaman bambu. Bambu tidak langsung ditanam, tetapi masyarakat membuat pembibitannya terlebih dahulu, setelah cukup umur baru mulai ditanam, selanjutnya diperlukan pemeliharaan. Dipilihnya bambu, berdasarkan atas hasil kajian, bahwa bambu populasinya sudah mulai berkurang dan daerah-daerah yang tidak longsor tersebut ternyata banyak ditanami bambu.

### **Penyiapan Atraksi Ekowisata dan Struktur Organisasi**

Memasuki tahun kedua, kegiatan lebih difokuskan kepada penyiapan fasilitas dan atraksi ekowisata. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah diketahui bahwa potensi terbesar yang dimiliki Kiadan adalah panorama alam, pola pemukiman desa pegunungan, dan hamparan perkebunan kopi. Temuan

inihlah yang melatarbelakangi masyarakat Kiadan yang direpresentasikan oleh KSM ekowisata menjadikan atraksi wisata *treking* sebagai paket wisata utama. Jalur *treking* disepakati melintasi perkebunan kopi, jurang, dan pemukiman (Gambar 5.1).



Gambar 5.1 Jalur *treking* Kiadan (jalur pendek)

Kemudian guna mendukung atraksi tersebut, KSM Kiadan bekerjasama dengan subak Sari Boga mulai merancang alur jalur *treking* dengan memanfaatkan jalan setapak melingkari perkebunan kopi. Sedangkan untuk menambah kesan atraktif, dibuatkan jalur-jalur baru yang melintasi beberapa jurang. Peta wilayah Banjar Kiadan yang telah dihasilkan sebelumnya diakui sangat membantu dalam memplot jalur trekking tersebut. Setelah melewati beberapa proses, akhirnya dihasilkan jalur trekking Kiadan.

Selanjutnya KSM juga menyusun alur cerita pada setiap titik yang akan dilalui pada saat trekking. Setiap cerita memiliki kaitan substansi dengan lokasi yang terlewati, karena itu materi cerita muncul dari hasil survei pada saat pemetaan wilayah. Misalnya ketika melewati titik 'perkebunan kopi', cerita yang harus dituturkan ialah tentang proses penanaman kopi, teknik perawatan tanaman kopi, proses pemetikan buah kopi pada saat panen tiba, sistem pola tanam tumpang sari, dan aktifitas keseharian petani kopi. Selain guide lokal menceritakan materi tersebut kepada para wisatawan, nantinya, tamu juga harus diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan petani yang dijumpai di perkebunan, sedangkan guide bertugas menterjemahkan proses dialog tersebut. Dengan demikian tamu dijamin memperoleh informasi yang asli (*genuine*), yakni informasi atau pengetahuan dari sumber pertama.

Selanjutnya di titik pemukiman penduduk, muatan ceritanya adalah tentang sejarah pemukiman masyarakat Kiadan, perkembangan pola dan model bangunan rumah, konsep *asta kosala-kosali*, dan sistem pembagian pekarangan rumah. Sedangkan di pabrik penggilingan kopi guide menceritakan proses pasca panen, mulai dari penggilingan kopi dengan mesin atau penumbukan dengan alat tumbuk tradisional, sampai dengan proses pengepakan kopi dalam bentuk serbuk. (Matrik 5.2)

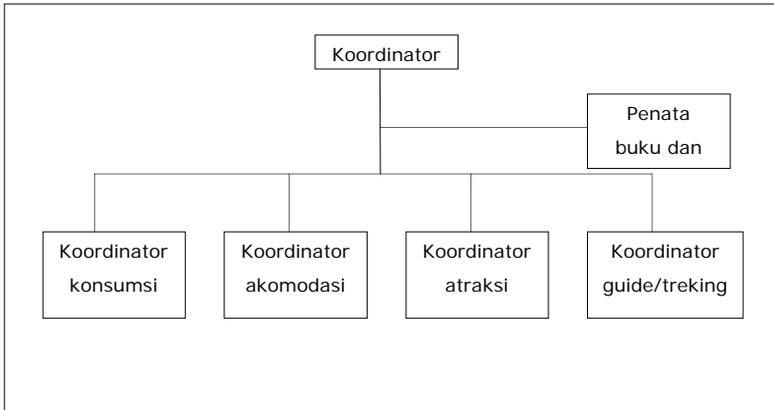
Matrik 5.2 Materi Cerita pada Setiap Titik Perhentian Jalur *Treking* Kiadan (Jalur panjang)

NO	TITIK ATRAKSI	CERITA
1	Bale Informasi	Informasi Kiadan secara umum Jalur yang akan dilalui dan kode etik
2	Titik start	Batas wilayah dengan banjar lain Keberadaan SLTPN 2 Petang Pemberian topi dan tongkat oleh anak-anak

3	Kebun kopi dan jeruk	Budidaya kopi dan jeruk Status lahan sekitar 3% merupakan tanah negara Kepemilikan lahan kebun, yaitu 1 ha/KK. Analisis usaha perkebunan kopi dan jeruk
4	Area konservasi	Jenis tanaman (bambu 13 jenis, aren, tanaman keras 24 jenis) Manfaat area konservasi terhadap desa dan masyarakat umum: daerah resapan
5	Kebun palawija	Budidaya palawija, sistem tumpang sari. Analisis usaha palawija.
6	Pura Penataran	Sejarah Kebo Iwa dalam membangun pancoran. Fungsi dan struktur bangunan pura.
7	Bale bengong dan pura Dalem Purwa	Sejarah peninggalan purbakala. Sistem subak (sawah).
8	Pura Kelebutan	Fungsinya sebagai <i>pesucian betara</i> di Pura Puncak Mangu dan melasti menjelang <i>tawur Nyepi</i> . Mata air keramat berfungsi sebagai sumber irigasi Subak Sandakan.
9	Bendungan Subak Sandakan	Bendungan yang bisa mengairi 200 ha sawah sampai radius 4 km.
10	Rumah jaga DAM	Tempat kontrol air irigasi.
11	Pura Desa Nungnung	Pura kahyangan desa Nungnung
12	Permukiman	Pola permukiman Pola perubahan struktur rumah ( <i>saka roras</i> yang tinggal satu buah rumah).
13	Pengolahan kopi	Transisi dari sistem pengolahan lama ke moderan, kelebihan dan kelemahan masing-masing. Analisis sistem usaha kopi, sistem pemasaran.
14	Atraksi tari	Cerita dibalik tarian Penyerahan bingkisan kopi atau yang lain

Sumber: Analisis data primer

Sedangkan untuk melancarkan pengelolaan ekowisata, kelompok pengelola membuat sebuah struktur organisasi pengelolaan ekowisata, seperti yang terlihat dalam Gambar 5.2, setiap bagian bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Keseluruhan struktur organisasi berada di bawah pengawasan dan perlindungan banjar *pakraman*. Dalam penerapannya di lapangan, sistem dan struktur organisasi ini bersifat luwes dan fleksibel.



Gambar 5.2 Struktur organisasi Pengelola Ekowisata Kiadan

## 2. Tahap Penguatan Pembentukan JED

Pada bulan Juni 2001, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi bersama di Kantor Yayasan Wisnu, Nyoman Juta, perwakilan KSM Ekowisata Kiadan, melontarkan gagasan untuk membangun sebuah lembaga atau forum yang beranggotakan empat desa dampingan Yayasan Wisnu sebagai wahana untuk menyatukan langkah dalam mengembangkan ekowisata di empat desa. Juta melihat bahwa kendala yang dihadapi selama proses perintisan ekowisata adalah keterbatasan sumber daya manusia yang siap mengembangkan ekowisata di masing-masing desa, termasuk di Kiadan. Dengan berjaringan di antara empat desa segala permasalahan yang muncul dalam mengelola ekowisata dapat dibicarakan dan dicarikan solusi dalam

pertemuan-pertemuan jaringan.

Gagasan Nyoman Juta muncul berdasarkan cerita dari Made Japa, salah seorang anggota KSM Pelaga, tentang pengalamannya magang di Tual, Maluku, yang dikirim oleh Yayasan Wisnu untuk semacam kegiatan studi banding. Nyoman Juta berpikir bahwa harus ada satu lembaga kerja sama antardesa jika ingin mengembangkan ekowisata. Banjar Kiadan dirasa belum mampu jika ingin mengembangkan ekowisata sendiri, terutama karena keterbatasan orang-orang Kiadan untuk menyiapkan dan bekerja di jasa ekowisata. Ketika ide digulirkan, ternyata Nyoman Sadra selaku Ketua KSM Ekowisata Baliaga Tenganan juga mempunyai pemikiran yang sama, walaupun dengan alasan yang berbeda. Sadra lebih melihat bahwa kerja sama yang sudah terjalin antar lima desa jangan sampai terputus, bahkan ketika program sudah berakhir. Ia melihat bahwa Tenganan mendapat banyak keuntungan dari pertemanan yang sudah berjalan selama satu setengah tahun ini. Gagasan Nyoman Juta tersebut terus bergulir dan direspon oleh tokoh-tokoh dari desa-desa lainnya. Puncaknya, dalam pertemuan bersama enam bulanan pada bulan Juni 2001 di kantor Yayasan Wisnu, semua desa setuju dengan gagasan untuk membuat sebuah jaringan antar desa, yang kemudian dinamakan Jaringan Ekowisata Desa (JED).

Sayangnya, justru ketika ide ini ramai dibicarakan, salah satu desa dampingan yaitu Banjar Lawak Belok/Sidan memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam 'jaringan' pertemanan dampingan Wisnu. KSM Lawak Belok/Sidan yang aktif mengikuti kegiatan, memilih untuk lebih berkonsentrasi bekerja sama dengan Pemda Badung yang juga sedang mengembangkan agrowisata di wilayah mereka.

Gagasan guna membangun JED semakin menemukan momentumnya setelah di akhir tahun ke dua (2001) Yayasan KEHATI, Jakarta, menghentikan pengucuran dana untuk program pengembangan ekowisata Bali, akibat dari kebijakan USAID yang merupakan lembaga donor Kehati,

yang membatasi kucuran dana bagi mitranya pasca peristiwa pengeboman WTC, *World Trade Center*, Amerika Serikat. Kejadian ini memberi pengaruh yang cukup besar bagi psikis keempat desa, termasuk banjar Kiadan.

Namun pemutusan dana dari KEHATI tidak serta merta membuat empat desa dan Yayasan Wisnu yang tengah mengembangkan ekowisata desa menjadi patah semangat. Apalagi sebelumnya mereka telah berencana untuk memperkuat jaringan antar desa dengan membentuk JED. Lewat JED jaringan komunikasi antar desa untuk mengelola sumber daya alam dan budaya melalui kegiatan ekowisata tetap dapat berlanjut. Melalui berbagai forum pertemuan ide untuk membentuk JED semakin dimatangkan.

Setelah segala persyaratan untuk mendirikan lembaga sebagai koperasi sekunder terpenuhi, seperti adanya visi dan misi, struktur kelembagaan, sistem kepemilikan, dan tata aturan, akhirnya pada tanggal 22 April 2002, bertempat di kantor Yayasan Wisnu, Jalan Pengubengan, Kerobokan, Denpasar, JED secara resmi dibentuk. Peresmian JED dihadiri berbagai kalangan pariwisata Bali, termasuk Menteri Pariwisata dan Kebudayaan saat itu, I Gede Ardika. Mulai hari itu, JED dengan keanggotaan empat desa dan Yayasan Wisnu secara resmi memulai sebuah proses panjang pengembangan ekowisata desa.

Menurut perwakilan empat desa, termasuk wakil dari Banjar Kiadan, meskipun nama yang diusung ekowisata, kegiatan yang ditangani tidak hanya terbatas ekowisata, namun JED juga mengelola kegiatan ekonomi yang lain, yaitu distribusi hasil bumi dan simpan pinjam produktif. Pilihan kegiatan ini didasari oleh kesadaran keempat desa tentang rentannya industri pariwisata terhadap berbagai isu. Usaha distribusi hasil bumi JED dipilih, karena selama ini masyarakat kesulitan dalam memasarkan hasil buminya, seperti kopi yang dihasilkan oleh masyarakat Kiadan. Selanjutnya berkembang pula pemikiran untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kopi, dan minyak.

Dalam perkembangan selanjutnya, usaha distribusi bahan kebutuhan pokok ini mengalami kendala, akibat dari jarak antar ke empat desa yang cukup jauh, sehingga sulit untuk pendistribusian bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut.

Usaha simpan pinjam JED lebih diarahkan kepada peminjaman uang untuk usaha-usaha produktif warga masyarakat, namun diupayakan dengan birokrasi sesederhana mungkin sehingga tidak memberatkan warga. Dalam perkembangannya usaha simpan pinjam tersebut juga tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, karena minimnya warga masyarakat yang memanfaatkan jasa tersebut.

Sedangkan dalam usaha pariwisata, JED mengelola sebuah travel untuk mendukung program ekowisata. Dengan adanya travel milik masyarakat, diharapkan distribusi keuntungan dapat mulai terbagi lebih adil di tingkat desa. Prinsip dari usaha travel JED adalah, bahwa usaha ini tidak dimaksudkan untuk merubah mata pencaharian masyarakat desa dari sektor pertanian ke sektor jasa pariwisata. Usaha travel dirintis, karena masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk sektor pariwisata. Apabila ada wisatawan yang mengunjungi desa mereka, maka mereka dapat menjadi tuan rumah yang baik untuk meladeni para tamu, misalnya dengan menjadi pemandu wisata dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan persyaratan minimal.

Secara legal, JED berbentuk koperasi sekunder. Bentuk struktur organisasi JED dibagi dalam Dewan Pemilik, JED sebagai koperasi sekunder, koperasi primer di setiap desa, dan masyarakat sebagai pemilik riil koperasi primer atau sekunder (Gambar 5.8). Dewan Pemilik adalah pemilik JED yang terdiri dari empat desa dan Yayasan Wisnu. Konkretnya, masing-masing desa memilih wakil-wakilnya sebanyak tiga orang melalui rapat desa/banjar adat untuk mewakili desa/banjarnya dalam Dewan Pemilik JED. Dewan pemilik inilah yang memilih dan memberhentikan pengelola JED. Fungsi

pengelola JED adalah untuk menjalankan manajemen JED untuk menghasilkan keuntungan. Dengan berdirinya JED istilah Kelompok Swadaya Masyarakat pun berubah menjadi Koperasi Primer Desa/banjar.

Di Kiadan sendiri, JED selain mengelola ekowisata juga mengelola sebuah warung koperasi serba ada yang melayani pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat. Secara fisik bangunan koperasi berbentuk sebuah warung sederhana yang berlokasi di depan balai subak Sari Boga. Lokasinya berada di depan pekarangan salah seorang anggota KSM, Made Warta.

Dalam wadah koperasi primer ekowisata Kiadan tersebut berbagai persoalan yang menyangkut pengelolaan ekowisata Kiadan didiskusikan, kemudian dicarikan jalan keluar. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak yang sama dalam mengeluarkan usulan, pemikiran, maupun kritik menyangkut operasionalisasi dan perkembangan usaha kelompok. Koperasi tersebut juga yang menjadi wakil kelompok dalam berkomunikasi dengan pihak banjar adat, subak, pemerintahan desa Pelaga, maupun *stakeholders* yang lain. Para pengurus koperasi tidak memperoleh gaji bulanan, namun mereka menerima honor sesuai dengan peran dan fungsinya setiap ada rombongan tamu yang berkunjung. Artinya, apabila ada tamu yang berkunjung para pengelola ekowisata baru mendapat penghasilan, sebaliknya apabila dalam jangka waktu tertentu tidak ada tamu yang datang, maka semua pengelola tidak mendapat imbalan apapun. Mekanisme ini ditempuh untuk menghindari beban pembiayaan yang besar bagi keuangan koperasi ekowisata Kiadan.

### **Krisis Kunjungan Wisatawan**

Memasuki tahun 2003, perkembangan ekowisata Kiadan beserta jaringannya yang tergabung dalam JED, menghadapi ujian berat. Kondisi pasca bom Kuta, 12 Desember 2002, memberi pengaruh yang besar terhadap turunnya kunjungan

wisatawan ke Bali. Hal yang sama juga dialami oleh Ekowisata yang dikelola JED, walaupun pihak pengelola JED telah berupaya keras melakukan promosi lewat berbagai media namun belum dapat menarik minat calon wisatawan untuk datang mengunjungi Kiadan dan tiga desa lainnya. Setelah peresmian JED, empat desa JED sempat mengalami masa-masa membludaknya kunjungan tamu, terutama tamu yang berkarakteristik aktifis NGO dari negara-negara Asia Tenggara, yang merupakan jaringan Wisnu dan INSIST Yogyakarta.

Namun kondisi sebaliknya terjadi pasca bom Kuta. Kunjungan wisatawan sangat kecil, bahkan pada bulan-bulan tertentu sama sekali tidak ada wisatawan yang mengunjungi desa-desa JED, termasuk Kiadan. Otomatis kegiatan JED dalam bidang pengelolaan ekowisata terhenti. Kondisi yang hampir sama juga dialami oleh bidang distribusi barang kebutuhan pokok. Minimnya pengalaman berusaha atau berbisnis disertai dengan lemahnya daya beli masyarakat di masing-masing desa akibat krisis ekonomi Bali pasca Bom, mengakibatkan unit usaha distribusi juga mengalami kelesuan.

Kondisi demikian juga terjadi di Banjar Kiadan, gairah dan semangat para pengelola ekowisata yang baru mulai muncul setelah diresmikannya JED, tiba-tiba menyurut akibat minimnya kunjungan wisatawan. Namun kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan di awal tahun, seperti melanjutkan penanaman bambu pada daerah-daerah jurang tetap dilanjutkan. Dalam kondisi seperti itu tokoh ekowisata Kiadan, Nyoman Juta dan Made Japa berusaha memelihara semangat sesama timnya. Kedua orang tersebut berprinsip bahwa kondisi kurang menggairahkan tersebut seharusnya dapat mendorong masyarakat Kiadan agar tidak terlalu bergantung terhadap pariwisata. Dalam setiap *sangkep* koperasi berulang kali, kedua orang tersebut menyampaikan prinsip tersebut.

Kami, walaupun mempunyai pekerjaan tambahan sebagai tuan rumah pengelola ekowisata, namun tetap adalah seorang petani kopi dan peternak sapi. Bekerja mengelola ekowisata hanyalah menjadi sampingan. Namun pekerjaan pokok warga di Kiadan adalah petani dan peternak sapi. Walaupun kunjungan tamu sepi, kami tidak berkecil hati. *Toh*, tujuan utama program ekowisata di Kiadan untuk melestarikan lingkungan pelan-pelan mulai membuahkan hasil, misalnya dengan konservasi tanaman bambu.

Semangat demikian membuat anggota koperasi tetap setia menjalankan kegiatan ekowisata. Walaupun wisatawan belum banyak dan sering datang berkunjung, para petani tetap merawat kebunnya agar selalu rapi, jalur *treking* juga dipelihara agar nampak indah. Demikian juga kegiatan-kegiatan pertemuan rutin baik di tingkat koperasi banjar, jaringan JED, selalu dihadiri dengan serius.

Pada level JED menurunnya kegairan dan semangat mengurus JED juga terlihat. Dalam setiap pertemuan evaluasi enam bulanan, perwakilan masyarakat selalu mendapatkan laporan pengelola JED, tentang kerugian yang dialami JED. Akumulasi kerugian demi kerugian tersebut sempat menimbulkan pemikiran di kalangan utusan empat desa untuk membekukan usaha JED. Namun pada titik kritis keputusan mereka dingatkan kembali kepada komitmen awal berjaringan. Proses panjang yang telah dilewati bersama-sama dalam menjalankan ekowisata bagi para perwakilan empat desa lebih berharga daripada besarnya kerugian yang telah terjadi. Mereka akhirnya tetap ingin mempertahankan JED, bagaimanapun kondisinya. Bagi ke empat desa, lembaga JED sudah menyerupai pertalian ikatan kekeluargaan di antara mereka, karena melalui JED mereka bisa saling berbagi dalam *penyamabrayan* sesama warga Bali.

Para pengelola JED dapat merasakan manfaat non materi yang besar dengan terlibat dalam pengelolaan JED. Gede Astana Jaya, manager JED saat ini mengakui amat Menikmati hari-hari yang dilewatinya selama bekerja di JED, laki-laki

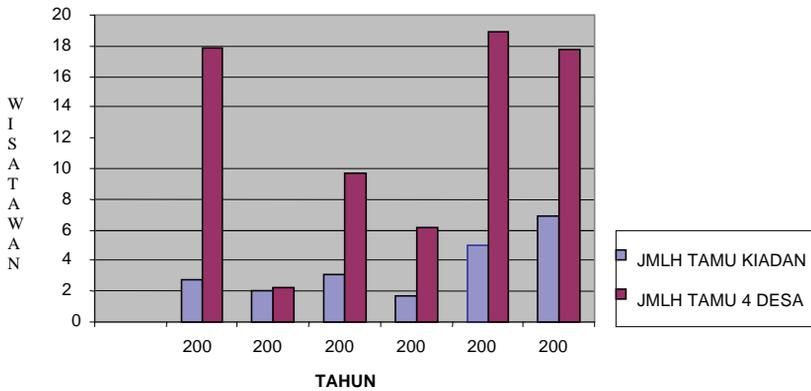
yang pernah bekerja selama 10 tahun di sektor pariwisata ini menemukan semangat dan spirit hidup kembali setelah bergabung dengan JED, hal itu terutama dirasakannya saat mengantar tamu ke desa. Satu hal yang sangat berbeda dengan apa yang pernah di alami saat bekerja di *travel agent* dan villa.

Dulu, saya selalu merasa kedudukan saya dengan tamu sangat berbeda. Mereka membayar, jadi saya harus melakukan seperti apa yang mereka harapkan. Namun tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi di JED. Saya merasa berada di tingkat yang sama dengan tamu. Mereka sangat menghormati atas apa yang kami miliki dan lakukan, walaupun mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk melihat dan mengalami semua itu. Bahkan mereka dengan senang hati mau berbagi pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki untuk kemajuan JED. Tidak sedikit dari para tamu yang datang telah membantu JED. Ada yang menulis artikel tentang perjalanan mereka bersama JED, memberitahu teman-teman mereka tentang JED, dan memberikan masukan kepada teman-teman di desa agar tamu lebih menikmati pengalaman mereka selama di desa. Saya sebagai pengelola JED sangat senang dengan apresiasi yang mereka berikan selama berkunjung ke desa.

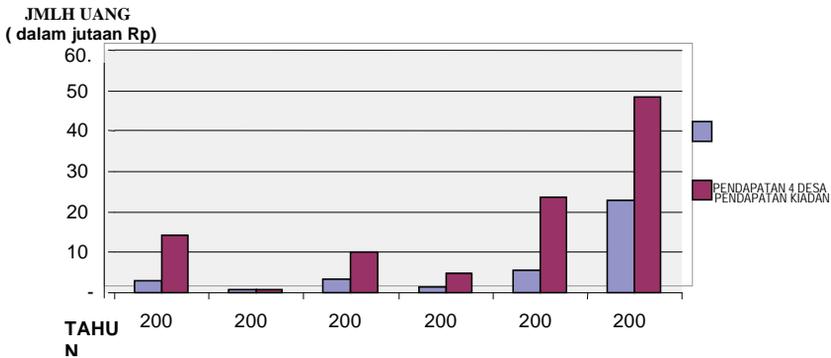
### **3. Tahap Pengembangan**

Memasuki tahun 2004, seiring kembali pulihnya perkembangan pariwisata di Bali, secara perlahan namun pasti jumlah kunjungan wisatawan keempat desa JED mulai meningkat. Promosi yang dilakukan dengan gencar melalui berbagai media, seperti internet, media cetak nasional, ikut mendorong meningkatnya jumlah kedatangan wisatawan. Selain itu konsolidasi internal ditingkat pengelola JED dan Koperasi Desa Kiadan yang semakin meningkatkan kinerja kelembagaan juga ikut mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Kiadan. Tabel 5.1 pada bagian Lampiran, Gambar 5.3, dan Gambar 5.4 menyajikan fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang diperoleh, baik

pada level Banjar Kiadan maupun level JED/total empat desa.



Gambar 5.3 Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan (2002-2007)



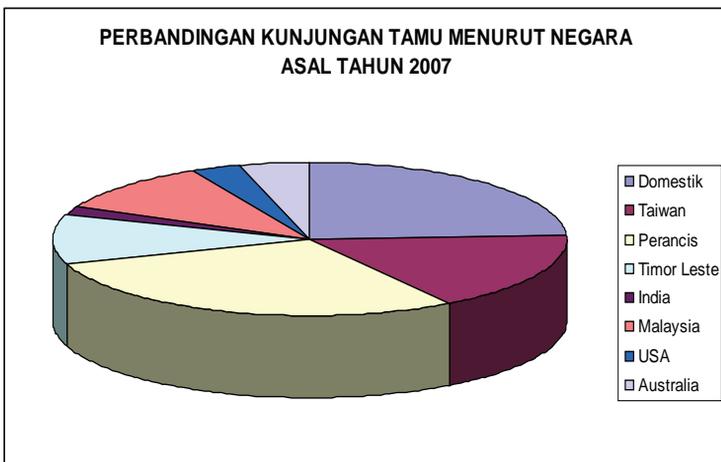
Gambar 5.4 Perkembangan Pendapatan dari Kunjungan Wisatawan

Sedangkan, apabila dilihat dari sisi asal negara wisatawan, terlihat bahwa wisatawan berasal dari berbagai belahan dunia. Tabel 5.2 dan Gambar 5.5 menunjukkan bahwa wisatawan terbanyak berasal dari 1) Perancis, yaitu sebanyak 28 %, 2) Indonesia (23%), dan Taiwan (17%). Hal ini sesuai dengan pendapat banyak pakar ekowisata yang mengatakan bahwa wisatawan asal benua Eropa pada umumnya mendominasi wisatawan tipe ekowisata, karena kepedulian mereka terhadap kelestarian lingkungan dan keberadaan budaya lokal yang sangat tinggi.

Tabel 5.2 Asal negara dan jumlah wisatawan

No	Asal Negara	Jumlah	%
1	Domestik	16	23
2	Taiwan	11	17
3	Perancis	19	28
4	Timor Leste	7	11
5	India	1	2
6	Malaysia	7	11
7	USA	2	3
8	Australia	3	5
	TOTAL	69	100

Sumber : Analisis data sekunder, laporan 6 bulanan JED tahun 2007



Gambar 5.5 Perbandingan kunjungan tamu menurut asal negara

Dengan semakin bertambahnya pengalaman dalam mengelola kunjungan wisatawan, dari setiap kunjungan rombongan tamu, JED telah memiliki mekanisme dalam mengelola pembayaran wisatawan. Mekanisme tersebut merupakan hasil kesepakatan antar pihak manajemen JED dengan perwakilan empat desa dan Wisnu di JED.

Tabel 5.3 Mekanisme aliran uang setiap pembayaran kunjungan wisatawan

Jumlah Tamu	Jumlah Pembayaran	Uraian Biaya	Jumlah Biaya	Pendapatan Jed
2 Orang	1.700.000	Biaya Transport	500.000	
		Paket Pelaga	650.000	
		Fee Guide	50.000	
Total	1.700.000		1.200.000	500.000

Sumber : Analisis data sekunder, laporan 6 bulanan JED tahun 2007

Tabel 5.3 menunjukkan contoh kasus mekanisme pembayaran kunjungan rombongan wisatawan yang berjumlah dua orang dengan harga Rp.1.700.000. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp. 650.000 diterima oleh Koperasi JED Kiadan sebagai harga paket. Sedangkan yang diterima JED sebagai pendapatan bersih adalah sebesar Rp.500.000. Di akhir tahun pendapatan JED setelah dikurangi dengan biaya operasional JED, akan dibagikan kembali kepada masing-masing desa, termasuk Banjar Kiadan, dalam bentuk Sisa Hasil Usaha(SHU), mengingat masing-masing desa merupakan para pemegang saham JED. Jadi selain Koperasi Kiadan memperoleh pendapatan pada setiap kunjungan wisatawan, mereka juga memperoleh pembagian akumulasi keuntungan pada setiap akhir tahun dari JED.

Pendapatan yang didapat sebagai harga paket ekowisata, setelah digunakan untuk membayar biaya operasional (honor guide lokal, tukang masak, narasumber, sewa tempat pertemuan, dan akomodasi), sisanya didistribusikan untuk biaya konservasi (Rp.5000 setiap tamu), sumbangan kepada banjar pakraman (Rp.5000), sumbangan kepada subak (Rp.5000), dan sumbangan untuk desa dinas (Rp.5000). Setelah pendistribusian ke masing-masing pos tersebut, sisa terakhir baru dimasukkan sebagai keuntungan pengelola ekowisata Banjar Kiadan, yaitu Koperasi JED Kiadan.

Untuk mempertanggungjawabkan kinerja JED, di-

adakan forum pertemuan akhir tahunan yang dihadiri oleh para pemilik JED, yakni empat desa pengelola JED dan Yayasan Wisnu. Tempat pertemuan diadakan secara bergiliran di masing-masing desa dan Yayasan Wisnu. Dalam setiap pertemuan akhir tahun, selain digelar pertanggungjawaban kinerja pengelola JED juga dilakukan evaluasi dan pembuatan perencanaan kinerja JED maupun koperasi ekowisata di masing-masing desa. Evaluasi dan perencanaan tersebut menyangkut beberapa hal, antara lain : 1) aspek manajemen, 2) kapasitas lembaga dan individu, 3) produk atau paket ekowisata, 4) *marketing* (pemasaran), dan 5) aspek keuangan. Hal-hal yang telah diputuskan tersebut pencapaiannya kemudian dilihat kembali dalam pertemuan pertengahan tahun berikutnya.

Misalnya, dalam pertemuan akhir tahun 2006 JED menyepakati agar masing-masing desa membuat dua paket baru di tahun 2007, dengan didampingi oleh Yayasan Wisnu. Selain itu disepakati pula agar dalam keseluruhan produk paket yang telah dimiliki sebelumnya dilakukan penyesuaian alur waktu dan kegiatan para wisatawan sehingga cerita yang disampaikan oleh guide lokal lebih terstruktur, efisien, menarik, dan atraktif. Keputusan ini, oleh kelompok pengelola ekowisata Kiadan ditindaklanjuti dengan menyusun paket-paket yang lebih menarik sehingga dapat membuat tamu yang datang lebih terkesan. Melalui serangkaian proses, akhirnya pada pertengahan tahun 2007, dihasilkan dua buah paket baru di Kiadan, yaitu 1) Kiadan *Plaga Coffee Look* dan *Bamboo Adoption*. Dalam pertemuan JED pada pertengahan tahun 2007, dalam proses diskusi evaluasi terungkap bahwa hanya Banjar Kiadan, Pelaga yang berhasil menyusun dua buah paket baru ekowisata, sedangkan tiga desa lainnya masih melakukan survei dan kajian.

### **Problematik Pengembangan Ekowisata**

Berdasarkan pemaparan proses perkembangan ekowisata Kiadan di atas, selanjutnya pembahasan diarahkan

kepada proses dialektika yang terjadi di Banjar Kiadan. Upaya ini dilakukan dengan melihat respon masyarakat Kiadan terhadap dua hal berikut ini: *pertama*, persepsi masyarakat Kiadan terhadap pengelolaan ekowisata; *kedua*, persepsi masyarakat terhadap kesesuaian program ekowisata dengan kriteria-kriteria ekowisata.

## **Sikap dan Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Ekowisata**

### **1. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Ekowisata**

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 30 orang responden, mayoritas responden menyatakan persetujuannya terhadap pengembangan ekowisata di Kiadan (100%). Berdasarkan data tersebut program pengembangan ekowisata memang telah mendapatkan dukungan penuh dari warga masyarakat Banjar Kiadan.

Tabel 5.4 Sikap masyarakat terhadap pengembangan Ekowisata

Persetujuan terhadap program pengembangan Ekowisata.	Jumlah	%
Setuju	30	100
Tidak setuju	0	0
Ragu-ragu	0	0
Total	30	100

Sumber: Data primer

Bila dikelompokkan, terdapat tiga alasan yang dikemukakan responden yang melatarbelakangi sikap persetujuan responden. Kelompok pertama menyatakan bahwa pengembangan ekowisata akan dapat meningkatkan perekonomian warga Kiadan. Mereka berpandangan bahwa dengan dikembangkannya ekowisata akan meningkatkan penghasilan para petani, memberikan lapangan pekerjaan baru, dan menambah pemasukan kas banjar. Kelompok kedua beralasan bahwa pengembangan ekowisata akan dapat

menunjang kelestarian lingkungan Kiadan. Kelompok kedua pada umumnya telah memiliki kesadaran tentang ekowisata. Mereka memahami dengan baik karakteristik ekowisata sebagai bentuk pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan kelompok ketiga beralasan bahwa dengan dikembangkannya ekowisata di Kiadan akan dapat memberikan prestise atau nama baik bagi Banjar Kiadan. Mereka berpandangan bahwa dengan dikembangkannya ekowisata di Kiadan, desa mereka akan lebih dikenal di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Salah satu responden, misalnya, mengungkapkan.

Saya sempat diajak melihat *website* JED sewaktu bermain ke kantor JED di Kerobokan. Saya kagum saat staf di sana menunjukkan bagian *website* yang memuat tentang Kiadan. Di sana dideskripsikan paket ekowisata yang 'dijual' di Kiadan serta kondisi Kiadan secara detail. Saya bangga sekali karena Kiadan sekarang sudah ada di *website*, berarti desa kami sudah menjadi bagian dari masyarakat maya global.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat kebanggaan sebagian warga Kiadan terhadap banjar mereka setelah terlibat dalam ekowisata. Bagi mereka munculnya banjar Kiadan dalam *website* JED merupakan suatu hal yang luar biasa, bentuk penghormatan, dan memberikan prestise tertentu.

Tabel 5.5 Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Ekowisata

Keterlibatan dalam perencanaan Ekowisata.	Jumlah	%
Terlibat	12	40
Tidak terlibat	18	60
Ragu-ragu	0	0
Total	30	100

Sumber: Data primer

Tabel 5.5 menggambarkan tingkat keterlibatan responden dalam perencanaan ekowisata. Dari tabel tersebut terlihat responden yang terlibat dalam perencanaan ekowisata sebesar 40 %. Sisanya sebesar 60 % tidak terlibat dalam proses perencanaan di awal proses ekowisata. Apabila dilihat dari alasan ketidakterlibatan responden, maka dapat diketahui, sebagian besar alasannya adalah karena pada saat dimulainya ekowisata para responden tersebut memang belum berminat untuk turut serta berpartisipasi, mereka masih menunggu keseriusan para perintis ekowisata, baik dari pihak internal Banjar Kiadan maupun para pendamping dari LSM. Setelah proses awal perencanaan ekowisata berjalan, barulah mereka memiliki kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam program pengembangan ekowisata, setelah melihat para perintis pengembangan ekowisata di Kiadan ternyata serius atau bersungguh-sungguh dalam menjalankan ekowisata.

Tabel 5.6 Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan/ pengembangan Ekowisata

<b>Keterlibatan dalam pengelolaan/pengembangan Ekowisata</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Terlibat	18	60
Tidak terlibat	12	40
Ragu-ragu	0	0
Total	30	100

Sumber: Data primer

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa responden yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata Kiadan sebesar 60%, sedangkan sebesar 40% tidak terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kiadan dalam pengelolaan ekowisata cukup tinggi, baik partisipasi langsung seperti terlibat dalam *menghandle* wisatawan sebagai guide lokal, tukang masak, penyiapan akomodasi, dan lain-lain, maupun partisipasi tidak langsung, seperti menjual bahan-

bahan baku makanan wisatawan, membantu pembibitan bambu, memelihara jalur trekking, dan sebagainya.

Alasan responden untuk terlibat dalam pengelolaan ekowisata, ternyata cukup beragam. Sebagian besar alasan responden adalah untuk meningkatkan kesejahteraan (manfaat ekonomi), 44%. Sisanya, sebesar 30% beralasan untuk melestarikan, dan sebesar 26% alasannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pribadi.

Sedangkan responden yang tidak terlibat dalam pengelolaan ekowisata memiliki beberapa alasan, antara lain: belum melihat kemajuan yang berarti dari perkembangan ekowisata Kiadan, tidak memiliki cukup banyak waktu untuk terlibat dalam pengelolaan, tidak memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam pengelolaan ekowisata, serta sejak awal tidak terlibat sehingga merasa enggan melibatkan diri setelah ekowisata berjalan cukup lama.

## 2. Manfaat Ekowisata terhadap Ekonomi Masyarakat

Responden pada umumnya berpendapat bahwa pengembangan ekowisata Banjar Kiadan telah memberikan dampak ekonomi yang positif bagi kehidupan masyarakat Kiadan (96,7%). Hanya 3,33% responden yang menganggap bahwa kegiatan ekowisata belum atau tidak memberi manfaat ekonomi (Tabel 5.7). Selain itu, manfaat ekonomi ekowisata ternyata tidak hanya dirasakan oleh responden yang terlibat langsung dalam ekowisata, namun juga oleh responden yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan ekowisata.

Tabel 5.7 Persepsi masyarakat tentang manfaat ekonomi Ekowisata

<b>Manfaat ekonomi Ekowisata</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Bermanfaat	29	96,7
Tidak bermanfaat	1	3,33
Ragu-ragu	0	0
Total	30	100

Sumber: Data primer

Kelompok responden yang kedua ini berpandangan bahwa pengembangan ekowisata telah memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh warga masyarakat Kiadan dengan adanya mekanisme penyisihan pendapatan dari setiap kunjungan tamu ekowisata ke dalam kas *banjar adat, subak*, dan banjar dinas. Informasi demikian diperoleh pada saat acara *sangkepan banjar*, di mana para pengurus ekowisata secara rutin menyampaikan laporan keuangan kepada seluruh masyarakat Kiadan. Namun di sisi lain besarnya pendapatan yang diperoleh lembaga banjar dari pengelolaan ekowisata masih tergolong sedikit. Sebagai contoh, misalnya, pada akhir tahun 2007 jumlah tamu yang berkunjung ke Kiadan baru mencapai 97 orang, karena setiap tamu yang berkunjung ada mekanisme penyisihan pendapatan untuk banjar sebesar Rp.5000, berarti jumlah uang yang disetorkan pihak pengelola kepada banjar pada tahun 2007 berjumlah Rp. 485.000.

Kendatipun demikian masyarakat Kiadan tetap merasakan besarnya manfaat yang diperoleh dengan adanya program ekowisata, terutama manfaat yang bersifat non-material. Misalnya, manfaat yang dirasakan oleh kelompok ibu-ibu (perempuan) yang merasakan beban kerja mereka menjadi lebih ringan setelah hadirnya 14 buah kran air bersih di sepanjang pinggir jalan dan gang di Kiadan. Kehadiran air bersih tersebut dimulai sejak ditemukannya sumber mata air bersih oleh tim pemetaan wilayah pada saat proses perencanaan ekowisata tahun 2000 silam. Penemuan air bersih tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan saluran pipa air dari lokasi sumber air menuju area pemukiman warga Kiadan. Dengan adanya fasilitas air bersih gratis tersebut, ibu-ibu mempunyai waktu luang yang lebih banyak yang dapat dipergunakan untuk mencari penghasilan tambahan dan mengurus atau merawat anak serta keluarga.

### **3. Kesesuaian Atraksi Ekowisata dengan Potensi Ekowisata**

Tabel 5.8 menunjukkan, dari 30 orang responden,

seluruhnya (100%), menyatakan bahwa atraksi ekowisata yang disuguhkan kepada wisatawan sudah sesuai dengan potensi ekowisata yang dimiliki Banjar Kiadan. Atraksi ekowisata berupa *treking* dengan melihat-lihat panorama perkebunan kopi, mengunjungi pemukiman dan proses pengolahan kopi, dan yang lainnya dipandang telah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Walaupun sudah sesuai, namun beberapa responden memberikan catatan bahwa atraksi yang telah dikembangkan perlu ditingkatkan terus-menerus agar bisa memberikan kepuasan kepada para pengunjung. Selain itu sebagian responden juga berpendapat bahwa sesungguhnya masih banyak potensi banjar Kiadan yang dapat dikemas untuk disajikan sebagai paket ekowisata, misalnya: peninggalan purbakala, tanaman bambu, dan wisata spiritual.

Tabel 5.8 Persepsi masyarakat tentang kesesuaian atraksi ekowisata dengan potensi wilayah

<b>Kesesuaian atraksi ekowisata dengan potensi wilayah.</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Sesuai	30	100
Tidak sesuai	0	0
Ragu-ragu	0	0
Total	30	100

Sumber: Data primer

Penilaian para responden tersebut sejalan dengan persepsi para pengelola ekowisata. Pihak pengelola yang sehari-hari aktif menjalankan ekowisata berpendapat bahwa banyak potensi desa mereka yang belum tergarap dengan optimal. Persoalan lintasan jalur *treking*, misalnya, menjadi salah-satu masalah serius yang sering dibahas dalam rapat-rapat maupun pertemuan informal sesama pengelola ekowisata Kiadan. Lintasan jalur *treking* yang sudah ada hanya melewati salah-satu bagian wilayah Banjar Kiadan, yaitu wilayah di bagian timur jalan utama/jalan raya. Sementara wilayah Kiadan di bagian barat jalan belum digunakan sebagai jalur

*treking*. Hal ini disebabkan karena kondisi topografi wilayah bagian barat Kiadan yang lebih sulit untuk dilalui dengan banyaknya jurang-jurang yang dalam dan terjal. Sedangkan wilayah bagian timur relatif lebih datar, sehingga lebih mudah untuk dilalui. Selain itu wilayah Kiadan di bagian timur sudah terdapat jalan setapak yang melingkari perkebunan yang dapat dipakai sebagai jalur *treking*, sehingga dari segi biaya pembuatan lintasan *treking* di wilayah bagian timur menjadi lebih murah.

Pada awal pembuatan jalur *treking*, pihak pengelola menyampaikan bahwa apabila kunjungan tamu sudah banyak, di bagian barat wilayah Kiadan pun akan dibuatkan jalur *treking*, sama halnya seperti yang terdapat di bagian timur wilayah banjar. Namun sampai tahun 2008, rencana pembuatan jalur *treking* di bagian barat wilayah Kiadan belum terealisasi karena minimnya dana. Padahal dari sisi potensi, wilayah bagian barat Banjar Kiadan memiliki panorama yang lebih indah dan eksotik, terutama latar belakang kawasan di mana terlihat jejeran Pegunungan Batukaru hingga Perbukitan Bedugul.

Masih menurut para pengelola ekowisata Kiadan, persoalan lintasan jalur *treking* apabila dibiarkan terus-menerus akan dapat memicu konflik, terutama bagi para petani yang memiliki lahan perkebunan di wilayah Barat, karena merasa diperlakukan kurang adil oleh pihak pengelola ekowisata dan banjar adat. Pada saat para petani di wilayah timur yang kebunnya sering dilintasi oleh wisatawan yang berkunjung mendapatkan keuntungan ekonomi, di waktu bersamaan kebun para petani di wilayah Barat merasa dirugikan akibat tidak adanya wisatawan yang melewati atau mengunjungi kebunnya. Maka ke depan hal tersebut perlu dicarikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Selain masalah pembuatan jalur *treking*, pihak pengelola ekowisata terus-menerus melakukan kajian-kajian untuk mencari kemungkinan penambahan atraksi sehingga atraksi ekowisata Kiadan lebih variatif. Salah-satu rencana yang tengah dijajagi adalah rencana membuat kebun tanaman

*upakara* dan *bamboo adoption*. Pembuatan kebun tanaman upakara, selain dapat menjadi paket ekowisata, juga dapat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terhadap berbagai jenis tanaman upakara yang sudah tergolong langka, seperti jenis-jenis buah-buahan kelapa tertentu. Sedangkan paket *bamboo adoption* dimaksudkan agar para pengunjung dapat melakukan kegiatan konservasi secara langsung di Banjar Kiadan, yaitu dengan membeli bibit bambu dan menanamnya langsung pada daerah-daerah yang rawan longsor.

#### 4. Manfaat Ekowisata terhadap Kelestarian Lingkungan

Responden juga diminta pendapatnya tentang kontribusi pengembangan ekowisata terhadap kelestarian lingkungan Kiadan (Tabel 5.9) Sebagian besar responden, yakni sebesar 90% menyatakan bahwa pengembangan ekowisata sejauh ini telah berdampak penting terhadap kelestarian lingkungan, sisanya sebanyak 3,3% menyatakan belum terdapat kontribusi lingkungan, dan 6,7% ragu-ragu. Contoh konkret sumbangan program ekowisata terhadap lingkungan, menurut responden, antara lain: penanaman bambu di beberapa sempadan jurang yang terancam longsor, adanya kontribusi lingkungan dari harga paket wisata tamu sebesar Rp.5000, perawatan kebun kopi secara lebih intensif, serta pemeliharaan jalur *treking*. Seluruh aktifitas ini dalam jangka panjang mendukung fungsi Kiadan sebagai kawasan resapan air hujan.

Tabel 5.9 Persepsi masyarakat tentang kontribusi ekowisata terhadap kelestarian lingkungan

Kotribusi ekowisata terhadap kelestarian lingkungan.	Jumlah	%
Sudah ada	27	90
Belum ada	1	3,3
Ragu-ragu	2	6,7
Total	30	100

Sumber: Data primer

Sedangkan responden yang menyatakan bahwa belum adanya kontribusi ekowisata terhadap lingkungan dengan menunjukkan beberapa fakta, seperti: masih dibebaskannya warga untuk menembak burung, belum adanya mekanisme pengolahan sampah secara terpadu, dan kurangnya kebersihan telajakan dan selokan di sepanjang jalan utama Banjar Kiadan. Dari hasil observasi, di sepanjang kiri kanan jalan dan gang di Kiadan sampah plastik memang masih berserakan di sembarang tempat (Lampiran 5).

### **Kesesuaian Program dengan Kriteria Ekowisata**

Dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih detail tentang problematika pengembangan ekowisata Kiadan, kepada responden juga ditanyakan kesesuaian pengelolaan ekowisata Kiadan dengan Kriteria-kriteria ekowisata yang merupakan penjabaran dari sembilan prinsip Ekowisata, yang telah dirumuskan dalam Lokakarya Ekowisata Bali.

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar program ekowisata yang dijalankan di Kiadan telah mendekati prasyarat yang ditetapkan dalam kriteria-kriteria ekowisata. Seluruh item kriteria mencapai besaran di atas 60 % untuk kategori 'sudah sesuai'. Bahkan selain kriteria 2A dan 2B, tingkat kesesuaiannya telah mencapai di atas 75%. Artinya, mayoritas responden menilai pengelolaan ekowisata Kiadan telah memenuhi kriteria - kriteria ekowisata, sedangkan hanya sebagian kecil saja responden yang berpandangan bahwa pengelolaan program ekowisata Kiadan belum sesuai dengan hal-hal yang dirumuskan dalam Prinsip-Prinsip Ekowisata.

Tabel 5.10 Kesesuaian program ekowisata dengan Kriteria Ekowisata

Prinsip	Kriteria	Sudah		Belum		Ragu	
		Jml	(%)	Jml	%	Jml	%
1.	A Memperhatikan keseimbangan pemanfaatan lahan.	26	86,7	3	10	1	3,3
	B Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan	26	86,7	3	10	1	3,3
	C Memanfaatkan areal warisan budaya sebagai obyek ekowisata yang disesuaikan dengan daya dukung.	29	96,7	1	3,3	0	0
	D Melestarikan keanekaragaman hayati&cagar budaya.	28	93,3	2	6,7	0	0
	E Memperhatikan keberadaan hewan&tumbuhan asli.	27	90,0	2	6,7	1	3,33
2.	A Menyediakan guide profesional&berlisensi.	19	63,3	6	20,0	5	16,7
	B Menyediakan fasilitas pendukung&informasi yang memadai terkait dengan objek ekowisata.	22	73,3	6	20,0	2	6,7
3.	A Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian.	30	100	0	0	0	0
	B Memprioritaskan pemanfaatan produk lokal untuk operasional objek ekowisata.	29	96,7	0	0	1	3,33
	C Melibatkan lembaga adat setempat.	28	93,3	1	3,33	1	3,33
4.	A Pembangunan&operasional disesuaikan dengan tata krama, norma setempat&kearifan lokal.	30	100	0	0	0	0
	B Kegiatan ekowisata tidak mengganggu aktivitas keagamaan masyarakat setempat.	30	100	0	0	0	0
5.	A Menaati undang-undang & perangkat peraturan lainnya yang terkait.	27	90,0	1	3,33	2	6,7
	B Mentaati <i>awig-awig</i> (peraturan) desa setempat.	30	100	0	0	0	0

6.	A	Mendapat persetujuan masyarakat & lembaga adat setempat.	29	96,7	0	0	1	3,33
	B	M e n j a l i n komunikasi&koordinasi dengan masyarakat&lembaga adat setempat dalam pengembangan objek.	28	93,3	1	3,33	1	3,33
7.	A	Menyediakan fasilitas & memberikan pelayanan prima & memuaskan kepada konsumen.	23	76,7	5	16,7	2	6,7
	B	Menyediakan media untuk memperoleh umpan balik dari konsumen.	24	80,0	3	10,0	3	10,0
8.	A	Memiliki materi pemasaran yang akurat, jelas dan berkualitas.	26	86,7	2	6,7	2	6,7
	B	Dipasarkan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan.	28	93,3	0	0	2	6,7
9.	A	Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (Parahyan-gan).	30	0	0	0	0	0
	B	Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia (pawon-gan).	30	0	0	0	0	0
	C	Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan (palema-han).	30	0	0	0	0	0

Sumber : Data primer.

Pada kriteria-kriteria tertentu akumulasi pendapat responden mencapai skor sempurna (100%) terhadap tingkat pencapaian ekowisata Kiadan. Hal ini terlihat antara lain pada kriteria : 1) Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian, 2) Pembangunan dan operasional disesuaikan dengan tata krama, norma setempat dan kearifan lokal, 3) Keberadaan dan kegiatan objek ekowisata tidak mengganggu aktivitas keagamaan masyarakat setempat, 4) Mentaati *awig-awig* (peraturan) desa setempat, 5) Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), 6) Memperhatikan keselarasan

hubungan antara manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan 7) Memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan (*Palemahan*).

Sebaliknya beberapa kriteria memperoleh besaran prosentase di bawah rata-rata. Artinya, para responden menilai bahwa rumusan kriteria tersebut belum meraih pencapaian sebagaimana halnya dengan kriteria-kriteria lainnya dalam pelaksanaan di tataran realita. Tiga kriteria yang mencapai besaran prosentase terendah antara lain : 1). Menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan prima dan memuaskan kepada konsumen (76,7%), 2). Menyediakan fasilitas pendukung dan informasi yang memadai terkait dengan objek ekowisata (73,3%), dan 3). Menyediakan guide profesional dan berlisensi (63,3 %).

Salah satu unsur fasilitas yang perlu dibenahi, menurut responden adalah tentang akomodasi. Hal ini juga sesuai dengan temuan peneliti melalui wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh di Kiadan dan hasil FGD(*Focus Group Discussion*) atau diskusi kelompok terfokus, yang mengungkapkan bahwa penggunaan Penginapan *Pondok Wana* sebagai tempat akomodasi mengandung beberapa kelemahan. Salah-satunya adalah citra Penginapan *Pondok Wana* selama ini yang dikenal sebagai penginapan yang sering dimanfaatkan sebagai tempat berselingkuh oleh pasangan-pasangan bukan suami-istri dari berbagai daerah di sekitar Pelaga. Mereka dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai tamu '*short time*', yang lebih banyak datang di akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu (Lampiran 6).

Citra demikian tentu saja bisa berpengaruh pula terhadap citra ekowisata Kiadan yang tengah berkembang. Oleh karena itu, pihak pengelola disarankan agar segera membuat tempat penginapan sendiri dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk yang memenuhi persyaratan, seperti misalnya telah mempunyai toilet dan sumber air bersih yang memadai. Selain itu diperlukan pelatihan khusus tentang tata cara memperlakukan tamu yang sedang menginap.

Selain itu, dari hasil wawancara mendalam dan FGD juga terungkap permasalahan lainnya, yakni permasalahan manajemen staf akibat jarang nya kunjungan wisatawan ke Kiadan. Rendahnya frekwensi kedatangan wisatawan ternyata berpengaruh terhadap mubazirnya pemakaian tenaga kerja ekowisata, khususnya tukang masak, staf akomodasi, dan guide lokal. Selanjutnya fenomena tersebut berdampak terhadap rendahnya margin keuntungan yang diterima kelompok pengelola, karena besarnya pendapatan yang digunakan untuk membayar honor tenaga kerja.

Tukang masak terlatih yang dimiliki sebanyak tujuh orang. Pengelola menghadapi kesulitan dalam pengaturan mekanisme kerja tim juru masak. Apabila pada saat kedatangan tamu dalam jumlah sedikit dipekerjakan seluruh tukang masak yang ada maka akan terjadi pemborosan biaya operasional. Pengelola harus memberikan honor kepada setiap pekerja yang masing-masing menerima Rp 40.000 per sekali kunjungan wisatawan. Padahal pekerjaan yang ada sudah cukup dikerjakan oleh dua orang. Penyelesaian yang ditempuh selama ini adalah dengan menerapkan sistem kerja secara bergiliran, yakni setiap kunjungan tamu di bawah 10 orang, dipekerjakan dua orang tukang masak (Lampiran 7).

Masalah yang serupa terjadi pada mekanisme pengaturan kerja guide lokal. Guide lokal yang dimiliki oleh JED Kiadan berjumlah empat orang. Seorang guide bisa menemani tamu sampai maksimal 10 orang. Di lain sisi ekowisata Kiadan menerapkan kebijakan tidak boleh menerima tamu dalam sekali kunjungan melebihi jumlah 10 orang. Dengan demikian dalam satu kali kunjungan tamu, semestinya cukup dipekerjakan seorang guide. Selama ini guide yang dipekerjakan dalam setiap kunjungan di atas satu orang tamu adalah dua orang guide. Namun dalam praktiknya hal ini sulit diterapkan, walaupun ketua pengelola telah menugaskan dua orang saja dalam sebuah kunjungan tamu, namun yang hadir biasanya lebih dari dua orang. Mereka beralasan, yang penting dapat hadir, agar bisa belajar

memandu tamu dengan lebih baik (Lampiran 8).

Made Japa, selaku Koordinator Program, mengungkapkan bahwa pihak pengelola belum bisa menerapkan aturan yang ada secara tegas sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan awal, khususnya yang terkait dengan pengaturan jadwal kerja. Menurutnya, motivasi utama para pengelola ekowisata Kiadan dalam mengelola kegiatan tersebut bukanlah uang atau materi, melainkan semangat untuk memberikan 'sesuatu' kepada banjar (*ngayah*) serta hubungan pertemanan antar sesama peserta JED lainnya (*pasuwitran*). Mereka menganggap bekerja mengelola ekowisata hanya merupakan pekerjaan sampingan, sedangkan pekerjaan pokok mereka tetap sebagai petani kopi dan peternak sapi.

Bagi Japa dan kawan-kawannya bisa membawa nama banjar ke kancah pariwisata khususnya ekowisata sudah memberikan kepuasan batin tersendiri. Salah-satu, misalnya, munculnya promosi tentang banjar Kiadan dalam website JED yang demikian luks dan profesional memberikan rasa bangga yang luar biasa terhadap keberadaan desanya. Kebanggaan tersebut berulang kali disampaikan kepada sesama warga Kiadan lainnya melalui *pesangkepan* banjar atau obrolan santai di tegalan, maupun terhadap pihak luar yang berkunjung ke Kiadan. Bagaimanapun juga, segala jerih payah selama puluhan tahun tidak sia-sia begitu saja, minimal sekarang banjar mereka sudah menjadi bagian dari kampung global dunia internet dengan membawa misi kepedulian lingkungan dan ekowisata. Hal ini sudah tentu merupakan hasil program ekowisata yang tidak ternilai harganya.

### **Analisis SWOT**

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*) terhadap pengelolaan ekowisata di banjar Kiadan mempertimbangkan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, serta hal-hal yang bisa mempengaruhinya. Faktor-faktor internal yang dianalisis adalah kekuatan dan kelemahan obyek. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah

peluang dan ancaman yang berasal dari luar yang berpengaruh terhadap pengembangan ekowisata di banjar Kiadan, Pelaga.

Berikut ini merupakan penjabaran isu-isu dari faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman dari pengembangan ekowisata Kiadan :

1. Faktor Kekuatan

- a. Terdapatnya kawasan hutan konservasi dengan tingkat keterenggan yang beragam, sehingga memberi kesan visual yang menarik bagi pengunjung.
- b. Letak Banjar Kiadan di kaki Pegunungan Adeng yang memiliki ketinggian 935 meter dpl, akibatnya kawasan ini memiliki suhu udara yang sejuk sehingga cocok untuk berwisata dan beristirahat.
- c. Keberadaan perkebunan Subak Abian Sari Boga yang merupakan areal perkebunan kopi, jeruk, sengon, kacang-kacangan, nangka, dan sebagainya, berikut aktifitas di dalamnya termasuk pembibitan, perawatan tanaman dan aktifitas lainnya yang cocok sebagai wahana pembelajaran.
- d. Keberadaan situs-situs bangunan pura, sehingga cocok digunakan sebagai obyek wisata budaya bagi wisatawan yang berkunjung.
- e. Aksesibilitas yang baik, terletak dekat dengan jalur wisata Denpasar-Sangeh-Kintamani yang sering dilintasi wisatawan asing, sehingga memudahkan akses koneksitas dengan obyek wisata lain yang telah berkembang lebih dulu.
- f. Kondisi alami dan tradisional pedesaan dengan alam yang mendukung berikut tipikal masyarakat desa yang hangat, ramah, dan bersahabat. Hal ini mengingat sifat menerima dari tuan rumah dapat membuat pengunjung merasa aman dan nyaman.
- g. Keberadaan kelembagaan lokal ekowisata, yaitu sudah terdapat kelompok pengelola ekowisata Koperasi Ekowisata Kiadan, yang telah terlatih dan memahami

ekowisata dengan baik, melalui serangkaian loklatatih dan workshop yang telah diikuti, seperti pelatihan *local guide*, F&B, PRA, ToT, dan sebagainya.

- h. Koperasi Ekowisata Kiadan menjadi bagian dari Jaringan Ekowisata Desa (JED), sehingga lebih memudahkan dalam melakukan upaya-upaya pengembangan ekowisata ke depan.
2. Faktor Kelemahan
    - a. Kebersihan kurang terjaga, misalnya adanya sampah plastik di sepanjang pinggir jalan utama desa.
    - b. Adanya sikap pragmatis sebagian warga masyarakat yang menginginkan agar ekowisata segera dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar.
    - c. Kunjungan wisatawan yang datang menikmati paket ekowisata masih kecil.
  3. Faktor Peluang
    - a. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Badung dalam pengembangan wisata agro di Badung Utara. Kecamatan Petang (termasuk di dalamnya Banjar Kiadan, Pelaga) merupakan kawasan unggulan pengembangan agrowisata Kabupaten Badung. Sehingga menjadi salah-satu peluang kawasan ini menjadi lokasi wisata potensial di masa mendatang.
    - b. Koneksitas dengan obyek wisata alam di sekitarnya. Banjar Kiadan dikelilingi oleh beberapa obyek wisata alam yang dapat dikembangkan menjadi satu paket obyek wisata pendukung, misalnya Bagus Agro, air terjun Nungnung, dan view Belok Sidan.
  4. Faktor Ancaman
    - a. Kondisi keamanan nasional yang kurang stabil akibat isue terorisme.
    - b. Krisis ekonomi global berkepanjangan yang tengah dialami masyarakat dunia secara umum, seperti melambungnya harga bahan bakar Minyak (BBM) dunia, sehingga menurunkan minat untuk bepergian.
    - c. Kesamaan produk dengan beberapa obyek sejenis di

Bali.

Selanjutnya dari rincian faktor-faktor SWOT di atas, ditentukan *main issue* (isu pokok) dari masing-masing faktor. Adapun *main issue* ditentukan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan yang ada di masyarakat Kiadan, JED, dan Yayasan Wisnu. Setelah proses penentuan *main issue* dilalui, selanjutnya dirumuskan strategi-strategi dalam mengembangkan ekowisata Kiadan ke depan. Hasil pembahasan tersebut terlihat dalam Matrik 5.3.

Matrik 5.3 Matrik Analisis SWOT Ekowisata Kiadan

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
<b>MATRIKS ANALISIS SWOT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat potensi ekowisata yang besar, Lingkungan relatif masih alami</li> <li>2. Sudah ada kunjungan wisatawan melalui JED</li> <li>3. Sudah terdapat jalur trekking yang memadai.</li> <li>4. Kelembagaan masyarakat lokal cukup kuat.</li> <li>5. Kapasitas pengelola cukup memadai (guide, tukang masak, akomodasi),</li> <li>6. Tergabung dalam JED.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebersihan lingkungan masih kurang.</li> <li>2. Belum ada akomodasi memadai yang dimiliki sendiri oleh pengelola.</li> <li>3. Jumlah kunjungan tamu masih kecil dan belum stabil.</li> </ol>
PELUANG (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O

<p>a. Kebijakan Pemda Badung yang menjadikan kawasan Badung Utara sebagai Kawasan Agrowisata.</p> <p>b. Perubahan minat wisatawan yang cenderung kembali ke alam.</p> <p>c. Adanya beberapa obyek wisata alam di sekitar Kiadan.</p>	<p>d. Menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata Badung dalam mengembangkan ekowisata. (1,5,6-a)</p> <p>e. Mengadakan promosi di daerah wisata di Bali Selatan. (5,6-a,b)</p> <p>f. Menjaga keaslian lingkungan Kiadan melalui bidang pendidikan. (2,4-b)</p> <p>g. Melakukan sinergi dengan obyek wisata yang ada di sekitar Kiadan. (3,4-c)</p>	<p>d. Peningkatan kesadaran masyarakat Kiadan guna menjaga kebersihan lingkungan. (1-b)</p> <p>e. Membuat alternatif atraksi guna meningkatkan jumlah kunjungan. (3-b,c)</p> <p>f. Mempersiapkan rumah-rumah penduduk sebagai akomodasi. (2-a,b)</p> <p>g. Bekerja sama dengan travel agen ekowisata di luar negeri untuk memperluas promosi. (3-a,b)</p>
ANCAMAN (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<p>a. Isu keamanan yang kurang stabil, akibat berbagai bencana alam dan terorisme.</p> <p>b. Krisis ekonomi global.</p>	<p>g. .Bersama-sama JED, mengundang media luar negeri untuk melihat langsung kondisi keamanan di Bali, khususnya di 4 desa ekowisata. (7-a)</p> <p>h. Mempergunakan bahan-bahan lokal, tenaga lokal, dengan semangat gotong royong dalam membangun fasilitas ekowisata. (5,6-b).</p>	<p>e. Memperkuat usaha JED di luar jasa ekowisata, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap ekowisata. (3-b)</p> <p>b. Membangun akomodasi yang sederhana sehingga menghemat biaya (2-b).</p>

### Strategi Pengembangan

Matrik 5.3 menunjukkan matriks analisis SWOT dan interaksi antara masing-masing komponen SWOT menghasilkan rumusan alternatif strategi pengembangan ekowisata Kiadan. Apabila diekplorasi lebih jauh rumusan strategi tersebut dapat dibagi ke dalam dua level, yaitu level lokal di Banjar Kiadan dan level jaringan yaitu JED.

#### a. Strategi pada level banjar Kiadan

1. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Badung dalam

mengembangkan ekowisata.

Meskipun selama perkembangan ekowisata Kiadan dalam sembilan tahun terakhir, pemerintah daerah kurang berperan, namun Koperasi Ekowisata Kiadan harus terus mengupayakan adanya perhatian Pemda dalam pengembangan ekowisata Kiadan. Pemda melalui Dinas Pariwisata Badung bisa dijadikan mitra sejajar dalam upaya lebih mengembangkan ekowisata ke depan. Terlebih lagi adanya kebijakan Pemda yang menjadikan kawasan Badung Utara, termasuk Banjar Kiadan sebagai kawasan Agrowisata.

## 2. Mengadakan promosi di daerah wisata di Bali Selatan

Selama ini promosi ekowisata JED lebih banyak diarahkan kepada promosi melalui jalur Internet. Padahal terdapat pasar yang sudah sangat dekat yaitu wisatawan yang telah berada di Bali Selatan, misalnya Nusa Dua, Sanur, dan Kuta. Apabila pasar ini digarap melalui kerja sama dengan travel agen-travel agen yang ada, maka jumlah kunjungan wisatawan akan dapat meningkat, dengan upaya promosi yang maksimal.

## 3. Meningkatkan kebersihan lingkungan Kiadan

Dari hasil penyebaran angket kepada tamu yang telah menikmati paket wisata Kiadan, salah satu hal yang paling sering menjadi sorotan para tamu adalah adalah persoalan kurangnya kebersihan lingkungan Banjar Kiadan. Banyaknya sampah-sampah organik dan non-organik yang berserakan di pinggiran jalan utama menimbulkan pemandangan kurang nyaman dan kesan kurangnya higienitas kawasan. Pengelola bisa merancang program edukasi tentang pentingnya nilai kebersihan dimulai dari para siswa sekolah-sekolah yang ada di Kiadan. Pihak sekolah bisa dilibatkan untuk mengajarkan anak-anak sekolah untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan banjar dan belajar metode pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Selain itu warga masyarakat secara umum, perlu

dimotivasi untuk menjaga telajakannya masing-masing agar selalu bersih dengan menyiapkan bak-bak sampah pada titik tertentu. Dalam jangka panjang perlu dibangun sebuah sistem dan mekanisme pengelolaan sampah warga secara terpadu, dari hulu hingga hilir.

5. Melakukan sinergi dengan obyek wisata yang ada di sekitar Kiadan.

Untuk meningkatkan variasi atraksi wisata, pengelola ekowisata Banjar Kiadan perlu menajajagi kemungkinan mengkoneksikan wisata trekking Kiadan dengan beberapa obyek wisata alam yang ada di sekitar Kiadan, seperti Air Terjun Nungnung, perkebunan bunga Bagus Agro, jembatan Tukad Bangkung, dan view Belok Sidan. Terjalannya koneksitas antara beberapa obyek tersebut akan dapat menambah daya tarik ekowisata Kiadan karena bertambahnya pilihan atraksi yang bisa dinikmati oleh para wisatawan yang berkunjung.

6. Membuat tambahan paket atraksi

Paket atraksi ekowisata Kiadan perlu diperkaya dengan jenis-jenis atraksi lainnya mengingat masih banyak potensi yang belum digarap. Beberapa alternatif atraksi yang bisa diujicobakan, misalnya, wisata bersepeda, spa tradisional, retreat/meditasi, melibatkan tamu dalam pengolahan kopi, dan mengajarkan tamu membuat masakan khas Bali. Atraksi-atraksi tersebut dapat dikemas sesuai dengan latar dan setting Banjar Kiadan, misalnya, dalam paket memasak, kelompok pengelola ekowisata bisa mengawalinya dengan mengajak tamu memanen sayur labu dan paku-pakuan, kemudian baru mengolahnya menjadi masak-masakan bercitarasa tinggi.

7. Mendesain rumah-rumah penduduk sebagai akomodasi.

Selama ini pihak pengelola Ekowisata bekerjasama dengan pemilik penginapan Pondok Wana dalam menyediakan akomodasi bagi wisatawan yang menginap di

Kiadan. Hal ini membuat pihak pengelola tidak dapat menata akomodasi agar sesuai dengan standard ekowisata. Selain itu sebagian pembayaran jasa penginapan harus diserahkan kepada pihak luar yang belum tentu memiliki partisipasi dalam program ekowisata. Ke depan perlu disiapkan agar penginapan bisa disediakan oleh pengelola secara mandiri. Pengelola dapat memanfaatkan beberapa rumah warga yang memenuhi syarat untuk dijadikan akomodasi tamu. Sudah barang tentu hal ini tetap memerhatikan persyaratan-persyaratan standar yang dibutuhkan oleh sebuah fasilitas akomodasi agar dapat menjaga kenyamanan dan privasi tamu yang menginap. Warga pemilik rumah juga perlu dilatih khusus agar bisa menjadi tuan rumah yang baik ketika ada tamu yang datang dan menginap.

8. Mempergunakan bahan-bahan lokal, tenaga lokal, dengan semangat gotong-royong dalam membangun fasilitas ekowisata.

Salah-satu ciri kuat yang melekat pada ekowisata adalah pemakaian potensi lokal secara optimal dalam mendukung program ekowisata. Penggunaan potensi lokal selain dapat meningkatkan peran serta masyarakat, juga bisa menghemat pendanaan yang dimiliki kelompok pengelola ekowisata Kiadan. Dalam pembangunan sarana akomodasi, misalnya, pengelola dapat menggerakkan tenaga-tenaga terlatih (tukang bangunan) yang ada di Kiadan untuk membangun fasilitas penginapan sederhana atau merenovasi rumah warga untuk digunakan sebagai penginapan. Sedangkan sistem pemberian upah diselesaikan dengan mekanisme tertentu sehingga menguntungkan kedua belah pihak

## **b. Strategi pada Level JED**

1. Bekerja sama dengan travel agen ekowisata di luar negeri untuk memperluas promosi

Di negara-negara lain perkembangan ekowisata sudah cukup maju dibandingkan dengan di Indonesia. Semakin luasnya negara-negara yang memiliki paket-paket ekowisata,

mendorong tumbuhnya biro-biro perjalanan khusus yang bergerak dalam bidang ekowisata. JED melakukan terobosan-terobosan agar dapat menjalin kerja sama dengan biro-biro perjalanan internasional sehingga bisa melakukan promosi yang memiliki jangkauan luas. JED juga harus menjajagi kemungkinan dapat mengikuti pameran-pameran di negara-negara yang merupakan pasar utama ekowisata dunia, seperti negara-negara Eropa dan Kanada.

2. Mengundang media luar negeri untuk melihat langsung kondisi keamanan di Bali, khususnya di empat desa ekowisata.

Selain mengadakan promosi ke luar negeri, JED juga dapat menjajagi kemungkinan untuk mengundang media-media asing, baik media cetak maupun elektronik, yang berpengaruh untuk datang mengunjungi empat desa ekowisata di Bali, dan meminta mereka membuat liputan mengenai ekowisata di empat desa tersebut. Upaya demikian akan berdampak besar terhadap deseminasi informasi tentang JED ke berbagai segmen masyarakat global. Selain itu para jurnalis media tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan kepada negara mereka tentang kondisi keamanan Bali khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Program ini sebaiknya dikoordinasikan dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Pusat untuk mendapatkan dukungan pemerintah.

3. Pengembangan usaha-usaha JED di luar jasa ekowisata, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap ekowisata

Bergantung secara penuh kepada sektor ekowisata, ibarat menaruh telur dalam sebuah keranjang. JED perlu membuka peluang-peluang usaha di luar jasa ekowisata untuk mengurangi ketergantungan kepada pariwisata. Masyarakat di empat desa, termasuk Banjar Kiadan, sejak awal harus dimotivasi untuk merencanakan sumber-sumber pendapatan alternatif atau mengembangkan sektor perkebunan yang

telah digeluti dengan melakukan diversifikasi tanaman sesuai dengan perkembangan permintaan pasar. Kegiatan ekowisata tetap hanya dipandang sebagai mata pencaharian sampingan, namun tanpa mengurangi kesungguhan pihak pengelola untuk terus-menerus mengembangkannya.

**(Endnotes)**

- 1 Griya, tempat tinggal keluarga kalangan Brahmana kasta tertinggi dalam strata Hindu-Bali
- 2 Wantilan, bangunan di bagian luar pura yang digunakan sebagai tempat rapat desa dan pementasan kesenian pada saat upacara pura.

## BAB VI EPILOG KOMPARASI MODEL PENGEMBANGAN EKOWISATA

SEBAGAI bab penutup bagian ini memaparkan perbandingan dari tiga kasus model pengembangan ekowisata di desa Kemenuh, Tenganan, dan Kiadan. Disertakan pula refleksi dari keseluruhan proses pengembangan ekowisata di masing-masing desa dan kaitannya dengan perkembangan pariwisata Bali dalam dua dekade terakhir. Apabila diperhatikan secara umum, ketiga desa dapat dibelah menjadi dua corak model pengembangan; corak pertama diwakili oleh desa Kemenuh dengan model pengembangan yang terpusat pada ketokohan dan kemampuan seorang figur. Corak kedua direpresentasikan oleh desa Tenganan dan Kiadan dengan model pengembangan berbasis pada pembangunan sistem, kelembagaan lokal, serta jaringan.

### **Dari Otoritarian Menuju Partisipatif**

Sudah menjadi persepsi umum bahwa dalam proyek-proyek pembangunan indikator keberhasilan proses partisipasi masyarakat selalu dilihat dari jumlah keterlibatan warga (*quantity*). Jarang sekali yang melihat aspek kualitas proses partisipasi. Kendatipun ukuran demikian tidak sepenuhnya salah, namun sangat besar peluang terjadinya pemahaman keberhasilan partisipasi masyarakat yang menyesatkan.

Kehadiran *Sua Bali* di desa Kemenuh telah memberikan alternatif baru model pengembangan pariwisata, di tengah *mainstream* pengembangan pariwisata massal yang begitu bergemuruh di era dekade 1990-an. Pilihan sikap *Sua Bali* tersebut sangat visioner dibandingkan apa yang tengah terjadi pada 21 Kawasan Wisata Bali kala itu, seperti kawasan Kuta,

Sanur, Nusa Dua, Tanah Lot, bahkan Ubud sekalipun. Sikap Sua Bali dalam menentukan pembatasan jumlah kunjungan tamu, misalnya, menjadi berlawanan secara asimetris dengan kecenderungan utama berbagai kawasan wisata yang menargetkan jumlah kunjungan sebanyak-banyaknya. Kredito besar yang dianut pemerintah pusat dan pemda Bali pun masih di sekitar isu 'pariwisata dengan kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya'.

Dari sisi partisipasi, langkah-langkah yang diambil oleh Sua Bali memang belum sepenuhnya sesuai dengan prasyarat partisipasi. Artinya, warga masyarakat desa Kemenuh tidak dilibatkan sejak awal proses perencanaan. Sua Bali terkesan 'bergerak' sendiri menjalankan program-programnya, bahkan cenderung mendobrak skema-skema tradisional yang telah berjalan sejak lama. Sua Bali berniat menjadi pelopor dan contoh bagi warga masyarakat sekitarnya, dalam menjalankan sebuah bentuk pariwisata yang dipandanginya 'tepat dan benar'. Sua Bali yang mengerjakan sebagian besar urusan, sedangkan warga masyarakat lebih banyak diam menonton, sampai gilirannya tiba, masyarakat akan mendapatkan bagiannya berupa persentase keuntungan proyek ekowisata.

Pada titik inilah, keberadaan Sua Bali dianggap sudah mengabaikan prinsip partisipasi lokal. Menurut Cernea (1991), partisipasi lokal amat penting dalam pengembangan ekowisata, karena akan bisa memberikan lebih banyak peluang kepada warga untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu, partisipasi lokal berarti memberikan wewenang atau kekuasaan kepada orang-orang lokal untuk memobilisasikan kemampuan mereka sendiri, menjadi pemeran sosial dan bukan menjadi obyek pasif semata, mengelola sumber daya yang dimiliki, membuat keputusan, serta melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupannya.

Merujuk kepada pendapat Well dan Brandon (1992), pendekatan yang dijalankan oleh Sua Bali di desa Kemenuh lebih mendekati corak pendekatan pewaris (*beneficiary*

*approach*), di mana masyarakat lokal menerima keuntungan dari kehadiran proyek, namun tidak diberikan wewenang dalam mempersiapkan, membuat kebijakan, dan mendesain perencanaan.

Kebijakan Sua Bali dalam mengembangkan ekowisata di Kemenuh, apabila dikaitkan dengan konteks yang lebih luas akan bisa dipahami dengan melihat situasi dan kondisi sosial politik lokal dan nasional pada saat itu. Kecenderungan pembangunan dalam skala nasional dan lokal Bali, ditandai oleh pola-pola pembangunan *top-down*, miskin partisipasi, sentralistik, dan otoriter. Pada saat itu Bali tengah digempur oleh berbagai proyek pariwisata dengan investasi besar (megaprojek) dan memarginalkan peran masyarakat Bali. Sebut misalnya; proyek Bakrie Nirwana Resort (BNR) di Tanah Lot, Tabanan; proyek BTID Pulau Serangan, dan proyek Garuda Wisnu Kencana (GWK). Kesemuanya memberikan satu pesan yang sama, tidak adanya ruang partisipasi bagi suara-suara masyarakat lokal.

Di tengah-tengah suasana demikian, kepeloporan Sua Bali dalam menentang arus *mainstream* pariwisata massal, sudah barang tentu menorehkan catatan tersendiri. Bahwa dalam praktiknya terjadi sedikit kesalahpahaman dengan masyarakat lokal, itu merupakan soal lain yang terus-menerus mesti dibenahi dalam masa-masa berikutnya. Satu hal yang harus digarisbawahi ialah sikap keberanian dan kepeloporan dalam menawarkan sebuah terobosan dalam suatu lingkungan yang terhegemoni secara kuat.

Bertolak belakang dengan Sua Bali yang berada pada posisi merintis, Yayasan Wisnu memulai program ekowisata di tahun 1999, di mana pada masa-masa itu dikenal dengan dimulainya Era Reformasi. Sebuah era dimulainya kebebasan berekspresi warga masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan lokalnya. Sebuah jaman yang dicirikan oleh berakhirnya sebuah rezim otoritarian dan dimulainya sebuah rezim pemerintahan yang lebih demokratis. Setting dan latar demikian itu, tentu saja berimbas besar terhadap

pola pendekatan yang tengah diterapkan oleh Wisnu di 4 desa ekowisata. Pada aras *grass root* (akar rumput), kondisi masyarakat desa yang dihadapi oleh Wisnu jelas berbeda dengan yang dihadapi oleh Sua Bali. Masyarakat desa sudah lebih terbuka dan berani menyampaikan gagasan-gagasannya setelah lepas dari kungkungan kehilangan kebebasan selama masa Orde Baru. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh Wisnu dalam menghadapi masyarakat *grass root* seperti itu jelas juga tidak dapat dibilang kecil. Dituntut sebuah cara-cara pendekatan masyarakat yang lebih partisipatif, akuntabel, transparan, dan konsisten.

### **Menuju Pendekatan Partisipatoris**

Terlepas dari sikap sebagian masyarakat yang kurang memberikan respon positif terhadap rencana pengembangan ekowisata Tenganan, tahap sosialisasi yang dilakukan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Tenganan dan Yayasan Wisnu telah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan dari bawah (*bottom-up*), di mana anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Kenyataan seperti ini sudah barang tentu merupakan kenyataan yang kurang lazim terjadi khususnya di Bali. Dalam konteks regional daerah Bali, kegiatan-kegiatan pembangunan selama ini umumnya diselenggarakan oleh pemerintah dengan kurang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat *top-down* dan peran masyarakat sangat kecil. Hal ini sesuai dengan ungkapan Cernea (Soelaiman, 1998 : 134) bahwa inisiatif lokal sering diabaikan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak berdasarkan pada evaluasi empiris, baik perencanaan itu sendiri maupun inisiatif lokal, maka hal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan pandangan terhadap inisiatif lokal.

Setelah memperhatikan proses awal sosialisasi yang dilakukan di Desa Tenganan, dalam kaitannya dengan konteks perencanaan Bali terdapat sebuah indikasi konkret pada

penekanan satu paradigma perencanaan yang diterapkan. Bila Andreas Faludi (1982:81) menyatakan bahwa terdapat tiga paradigma dalam perencanaan (*Planning Theory*), yang meliputi sebagai berikut : *the object-centered view of planning*, *the decision-centered view of planning*, dan *the control-centered view of planning*.

Pada paradigma pertama, yaitu *the object-centered view of planning*; merupakan paradigma yang memberikan penekanan pada peran penting obyek dalam perencanaan. Selain itu perencanaan konteks ini dimaknai tidak lebih sebagai kompilasi dan analisa obyek ditambah penelitian. Pengertian yang diberikan Faludi pada jenis paradigma yang kedua, yaitu *the decision-centered view of planning* adalah sebuah paradigma perencanaan yang menekankan pada keberadaan proses pengambilan keputusan sebagai komponen penting dalam perencanaan. Menurutnya perencanaan adalah alat intervensi negara dan pengendalian kekuasaan hanya ada di pihak negara.

Sedangkan dalam paradigma ke tiga '*the control-centred view of planning*', dinyatakan bahwa paradigma ini terdapat penekanan pada faktor kekuasaan/kekuatan pengendalian. Di samping itu juga terdapat intervensi dan pemberian autarki pada masyarakat yang dianggap sangat diperlukan dalam perencanaan. Atau dengan bahasanya Faludi dinyatakan dengan, "*Within the overall concern for control as a precondition of planning.*" Jenis pengendalian (control) dalam paradigma ini ada dua macam, yaitu *Partial Control* dan *total control*.

Dengan merujuk pada tiga jenis paradigma teori perencanaan yang diungkapkan oleh Andreas Faludi seperti di atas, maka selanjutnya dapat dipergunakan untuk melihat kecenderungan penggunaan paradigma dalam perencanaan ekowisata di desa Tenganan. Pada perencanaan yang digunakan di dalam kerangka perencanaan ekowisata di Tenganan memiliki relevansi dengan salah satu paradigma di atas, yaitu *the object-centred view of planning*.

Pada dasarnya penggunaan paradigma yang bersifat

absolut pada satu pendekatan saja segera akan menampakkan kekurangan. Usaha ideal dalam perencanaan adalah dengan mencoba mengkombinasikan antara dua atau tiga paradigma sekaligus. Sehingga dengan cara demikian akan memperoleh hasil perencanaan yang lebih sempurna dan mendekati realitas kehidupan masyarakat yang sebenarnya, sebab ketiganya akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan.

### **Transformasi Kesadaran Masyarakat**

Pada desa penelitian yang ketiga, yakni desa Kiadan, Plaga, perkembangan ekowisata telah beranjak lebih jauh. Di sini persoalan partisipasi boleh dikatakan tidak lagi mengalami hambatan yang berarti. Bahkan dibandingkan tiga desa dampingan Yayasan Wisnu lainnya (termasuk desa Tenganan), proses pelibatan partisipasi masyarakat Kiadan adalah yang terbaik. Konsolidasi partisipasi di Kiadan telah berhasil merangkul dua lembaga utama yang terdapat di Kiadan, yakni *Subak abian* dan *banjar pakraman*. Dari sisi *capacity building* pun banjar Kiadan berhasil melahirkan banyak kader-kader muda sebagai penggerak ekowisata. Namun bagaimana masyarakat Kiadan sendiri menilai program ekowisata yang telah berjalan hampir sepuluh tahun di desanya (1999-2008)?

Perkembangan ekowisata Kiadan, apabila diukur secara kasat mata, memang belum menampakkan hasil yang memuaskan. Jumlah kunjungan wisatawan misalnya masih tergolong rendah. Hal ini belum sesuai dengan harapan di awal peluncuran ekowisata desa, yaitu 200 orang setahun. Kecilnya jumlah kunjungan wisatawan tersebut tentu berdampak terhadap jumlah pendapatan ekonomi yang diterima oleh koperasi pengelola ekowisata Kiadan. Selain itu penjualan hasil pertanian petani Kiadan, khususnya kopi, juga belum begitu banyak terserap oleh wisatawan. Para petani kopi masih tetap mengandalkan penjualan produk mereka kepada pasar konvensional.

Namun apabila dilacak dengan lebih mendalam, proses pengembangan ekowisata yang telah berlangsung di

Kiadan telah menghasilkan sebuah transformasi kesadaran di kalangan masyarakat Kiadan, khususnya di kalangan para penggiat ekowisata. Sebuah kesadaran tentang pentingnya pemahaman terhadap hak-hak masyarakat desa terhadap sumber daya alam yang mereka miliki. Kesadaran demikian sudah begitu kuat melekat dalam ruang kesadaran dan cara berpikir para pengelola ekowisata Kiadan. Mereka menyadari tentang betapa pentingnya bagi mereka untuk mengetahui dan memahami secara detail keberadaan sumber daya alam yang mereka miliki agar bisa mengambil posisi tawar yang kuat ketika bernegosiasi dengan pihak-pihak luar, baik itu pemerintah, investor, LSM, maupun pihak-pihak lainnya. Kesadaran ini, dapat ditangkap dari pernyataan Ketua Koperasi Ekowisata Kiadan, Made Japa.

Kami, warga Kiadan, tidak ingin pariwisata yang berkembang di sini seperti pariwisata di Kuta atau Ubud, di mana masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Masyarakat beramai-ramai menjual atau mengontrakkan tanah kepada investor yang datang, lalu bekerja menjadi buruh atau tenaga kerja kasar lainnya. Kami harus tetap menjadi tuan rumah di wilayah kami sendiri. Mereka yang datang harus tunduk terhadap tata ruang desa yang telah kami buat..

Kesadaran demikian, tentulah diperoleh dari sebuah proses penyadaran yang panjang. Proses penyadaran melalui berbagai media, baik itu *workshop*, pelatihan, maupun magang ke masyarakat lainnya yang telah terorganisir dan berdaya. Para aktivis ekowisata Kiadan, dengan bekal pendidikan formal seadanya, telah mampu menyerap, mencerna, menghayati, serta mempraktikkan prinsip-prinsip ekowisata yang disampaikan oleh para peserta dan fasilitator dalam berbagai pelatihan dan *workshop*. Karakter dasar pendampingan yang bertipe partisipatif dari LSM pendamping mendorong munculnya inisiatif lokal secara berkelanjutan di Kiadan.

Adanya transformasi kesadaran di kalangan penggiat

ekowisata Kiadan, juga diakui oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekowisata, namun senantiasa mengamati proses perkembangan ekowisata sejak awal. Nyoman Sudana, seorang guru SMP Negeri 2 Petang, mengakui bahwa para penggiat ekowisata saat ini berkembang menjadi figur-figur berwawasan luas, kritis, dan disegani di Kiadan. Mereka telah menjadi intelektual yang diandalkan oleh warga lainnya dalam menelaah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Lebih jauh Sudana menyebutkan :

Saya bangga dengan aktivis-aktivis ekowisata Kiadan. Dengan latar belakang pendidikan seadanya mereka telah memahami konsep-konsep ekowisata yang begitu pelik. Tidak hanya memahami sebagai pengetahuan, namun juga mampu menerapkannya menjadi sebuah program ekowisata yang bermanfaat bagi warga Kiadan secara keseluruhan. Ini semua tentu sebuah lompatan besar yang mereka alami selama mengikuti proses pengembangan ekowisata.

Selain itu hubungan baik yang terjalin dengan sesama aktivis ekowisata dari tiga desa lain dan Yayasan Wisnu juga memberikan makna tersendiri bagi para pengelola ekowisata Kiadan. Mereka menganggap komunitas JED sebagai bentuk pertalian hubungan keluarga (*pasuwiteran/penyamabrayan*), merupakan salah-satu hasil dari proses ekowisata selama ini. Hubungan dengan orang-orang Tenganan, Ceningan, dan Sibetan, selama sekitar sembilan tahun terakhir sudah menghasilkan sebuah ikatan yang lebih dari sekedar hubungan atau relasi bisnis Ekowisata.

Pengalaman pahit dan manis selama menjalankan program ekowisata sejak tahun 1999 telah menciptakan ikatan kuat dan rasa setia kawan yang mendalam di antara mereka, baik yang berasal dari desa Kiadan, Ceningan, Sibetan, dan Tenganan. Mereka tidak hanya saling kontak ketika ada kegiatan JED atau ekowisata, seringkali antar desa saling mengundang teman mereka dari desa yang lain apabila sedang mempunyai acara upacara adat atau agama. Ikatan

kekeluargaan inilah yang menjaga eksistensi kegiatan JED walaupun sedang dalam kondisi kritis, misalnya mengalami kerugian akibat gagalnya usaha distribusi bahan kebutuhan pokok pada tahun 2004.

Nyoman Juta, tokoh Kiadan yang merupakan inisiator pengembangan ekowisata Kiadan, merasakan adanya perbedaan besar antara proses yang dialami selama didampingi oleh Yayasan Wisnu dengan pembinaan yang lazim dilakukan oleh pemerintah. Menurut Juta, pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Wisnu bersifat berkelanjutan dan jauh dari kesan formal. Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali hanya sesaat dan tidak berkelanjutan. Yayasan Wisnu memfasilitasi masyarakat Kiadan setahap demi setahap sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat desa. Mereka juga membantu memfasilitasi masyarakat Kiadan dalam menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ditemui dalam proses di lapangan. Lebih jauh, Juta mengungkapkan tentang minimnya perhatian pemerintah daerah kabupaten Badung terhadap pengembangan ekowisata di Kiadan.

Kami berulang kali telah menghubungi Dinas Pariwisata Badung untuk ikut membantu kami dalam mengembangkan ekowisata, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan positif. Terakhir kali, kami mengundang pejabat Dinas Pariwisata dalam peresmian Balai Informasi Ekowisata Kiadan tahun 2004, namun tetap saja mereka tidak mau datang, tanpa alasan yang jelas.

Pernyataan ini menyiratkan kekecewaan masyarakat Kiadan terhadap respon pemerintah daerah Kabupaten Badung yang kurang menghargai inisiatif lokal pengembangan ekowisata Kiadan. Sikap pemerintah tersebut dinilai masyarakat sangat bertolak belakang dengan trend pembangunan yang sedang berubah dari pola *topdown* menuju pola *bottom-up*. Kenyataan demikian, hampir tidak pernah

menyurutkan semangat para penggiat ekowisata Kiadan dalam menjalankan program yang telah disepakati sejak awal. Dengan segala sumber daya yang ada mereka tetap bertekad untuk mengembangkan ekowisata sesuai dengan visi awal yang telah disepakati.

### **Pentingnya Pengorganisasian Masyarakat**

Apa yang bisa kita pelajari dari proses berjalannya ekowisata di tiga desa penelitian tersebut? Pada tingkat gagasan konseptual ide ekowisata tidak begitu sulit diterima oleh masyarakat desa. Prinsip-prinsip yang dikandung dalam ekowisata hampir bersesuaian dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat Bali. Misalnya, prinsip keberlanjutan (*sustainability*) memiliki pengertian yang mirip dengan kearifan lokal Bali *cenik lantang* (arti harfiahnya: kecil dan panjang), prinsip perencanaan partisipatif sangat dekat dengan model demokrasi lokal *Sangkep banjar* yang telah lama dipraktikkan masyarakat desa pakraman di Bali. Pada aras ini, betapa kita melihat bahwa gagasan-gagasan ekowisata amat sejalan dengan prinsip-prinsip hidup masyarakat pedesaan Bali.

Namun pada saat idealisasi pada tingkat gagasan coba diwujudkan ke dalam tingkatan strategi dan aksi, para aktor pelaku ekowisata, baik itu LSM, KSM, maupun CO (*community organizer*), mengalami beragam hambatan. Peneliti pun merasakan fenomena demikian pada saat melakukan pengamatan terlibat di ketiga desa. Dari hasil analisis setelah melakukan serangkaian pengamatan terhadap data-data yang terkumpul, peneliti dapat menguraikan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari eksperimen perintisan dan pengembangan ekowisata di tiga desa penelitian :

*Pertama*, paradigma ekowisata yang pada dasarnya memang berpunggungan dengan paradigma pariwisata massal yang telah lebih dulu berkembang di Bali. Hal ini terkait dengan pemahaman masyarakat yang sudah terlanjur dicekoki oleh ideologi kapital dari pariwisata massal. Sebagian

di antaranya misalnya : investasi besar untuk keuntungan besar dan secepat-cepatnya, mengorbankan apapun demi kemajuan pariwisata (termasuk sosial, budaya, bahkan religi). Sehingga dengan demikian permasalahan pertama yang dihadapi ialah bagaimana caranya membongkar ideologi pariwisata massal, yang selalu berorientasi profit, ke arah ideologi ekowisata yang sejatinya berideologi konservasi dan masyarakat lokal?

*Kedua*, sulitnya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam arti riil. Masyarakat selama 32 tahun telah terbiasa, baik rela maupun karena terpaksa, menerima program-program pembangunan yang bersifat *top-down* (dari atas ke bawah). Hak-hak untuk menyampaikan aspirasi diberangus habis hingga tingkat terbawah. Demokrasi dengan demikian hanya sekedar menjadi pemanis bibir penguasa untuk menguatkan hegemoni kekuasaannya. Dengan politik hegemoni, masyarakat dipaksa untuk bersuara tunggal. Munculah akhirnya apa yang di Bali dikenal dengan istilah *briuk siu* (tirani mayoritas) ataupun dalam kutub ekstrim yang berlawanan menjadi budaya *koh ngomong* (budaya bisu).

Dalam suasana demikian mencoba untuk menumbuhkan partisipasi yang telah lama hilang dari rekaman memori sosial masyarakat menjadi sesuatu yang nisbi. Sulit setengah mati untuk diwujudkan. Di Bali, ruang dan medianya sesungguhnya masih tersedia sampai tingkat banjar, yaitu tereksresi dalam bentuk *sangkep* dan institusi *desa pakraman*. Namun, ironisnya ruang dan media mengalami impotensi dalam skala rentang waktu yang panjang. Ia kehilangan kemampuan (kapasitas) menjawab realitas sosialnya, terjebak ke dalam formalitas yang kadang-kadang malah cenderung a-demokratis. Simak saja dalam serentetan kasus adat di Bali yang masih menyisakan ironi hingga detik ini.

Dalam pengembangan ekowisata, partisipasi masyarakat merupakan kata kunci yang sangat menentukan. Partisipasi tidak hanya sekedar melibatkan peran serta masyarakat secara fisik, namun lebih diwujudkan sebagai...memberi lebih banyak peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif

dalam kegiatan-kegiatan pengembangan ekowisata. Hal itu berarti memberi wewenang atau kekuasaan pada masyarakat untuk memobilisasi kemampuan mereka sendiri, menjadi pemeran sosial dan bukan sebagai subjek pasif, mengelola sumber daya, membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi hidupnya (Cernea, 1991).

Terlepas dari hambatan-hambatan yang kerap dijumpai dalam proses pelibatan partisipasi masyarakat di atas, ada satu upaya konkret yang bisa ditempuh dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat, yakni melalui usaha pengorganisasian masyarakat. Usaha pengorganisasian masyarakat selama ini memang lebih sering digunakan secara intens oleh kalangan NGO dan umumnya dipandang secara sinis oleh kalangan pemerintah. Pengorganisasian masyarakat hanya merupakan upaya untuk saling menumbuhkan interaksi melalui sebuah pergaulan/pertemanan/persahabatan dengan suatu kumpulan masyarakat tertentu yang bertujuan menumbuhkan kekritisian masyarakat dalam mengambil keputusan-keputusan dan tindakan – tindakan dengan sadar, untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Jadi, ia bukan kegiatan yang sekedar mengumpulkan sebanyak-banyak orang untuk mencapai suatu kepentingan sementara pribadi atau kelompok yang diwakili.

Pengorganisasian di tingkat *grass root* dapat diawali melalui media *sangkep* yang masih ada dan tumbuh di kalangan masyarakat Bali dewasa ini. Hanya saja, memang, secara kelembagaan *desa pakraman* meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Sedangkan secara individual, masing-masing personal dalam institusi adat harus mau meningkatkan pemahaman, daya kritis dan kepekaannya dalam membaca sebuah realitas sosial. Lembaga adat harus menemukan kembali keberdayaannya yang telah lama dipasung pada masa Orde Baru. Melalui *sangkep*, masyarakat bisa merembuhkan kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan bersama strategi dalam menggarap potensi desa secara optimal dan

menghadapi ancaman dari luar. Upaya ini memang tidak mudah dan membutuhkan energi yang cukup besar. Namun yang perlu dicatat adalah kondisi-kondisi eksternal yang ada saat ini sudah amat memberikan peluang ke arah itu, misalnya terbukanya ruang Otonomi Daerah dan pemberlakuan Perda No 3 tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*.

Dengan melakukan pengorganisasian masyarakat secara terus-menerus dan terarah, tidak hanya gerakan ekowisata sesungguhnya yang akan lebih cepat menemukan wujudnya di Bali. Namun lebih dari itu, masyarakat lokal Bali (*desa pakraman*) akan dapat menemukan keberdayaannya kembali. Pada titik ini, akan dapat dipahami bahwa ekowisata sebenarnya hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu keberdayaan masyarakat. Jika masyarakat sudah berdaya dan paham tentang potensi daerahnya, secara otomatis mereka akan memelihara dan melestarikan sumber daya yang dimilikinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1997. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata*. Kalawarta Indecon 5: i.
- Arida, I Nyoman Sukma, dkk. 2005. *Seks dan Kehamilan Pranikah, Remaja Bali di Dua Dunia*. Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Bukart and Medlik. 1976. *Tourism*. London. Cox and Wyman Ltd.
- Burkart, A.J and Medlik, S. 1988. *Tourism Past Present and future*. ELBS edition. London . Heineman.
- Baiquni, M. 1999. *Participatory Rural Appraisal Metode dan Teknik Partisipatif dalam Pengembangan Pedesaan*. Makalah Program Pelatihan Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan, Program Studi Magister Administrasi Publik UGM.
- Baiquni, M. 1999. *Local Initiatives Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Perkotaan*. Makalah Program Pelatihan Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan, Program Studi Magister Adminisrasi Publik UGM.
- Bintarto, R dan Surastopo H.S, 1987. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta. LP3ES.
- Bintarto, R. 1998. *Geografi, Ilmu dan Aplikasinya; Sebuah Informasi*. Majalah Geografi Indonesia Th. I No.2. Yogyakarta. Fakultas Geografi UGM.
- Brandon, K. 1995. *Langkah-langkah Dasar Untuk Mendorong Partisipasi Lokal dalam Proyek-proyek Wisata Alam* dalam Lindberg, K. dan Hawkins, D.E., *Ekoturisme : Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola*. Jakarta. PACT dan ALAMI.
- Bunting, B.W. 1991. *Resident Peoples and National Parks*. Tucson : University of Arizona Press.
- Cebbalos, H dan Laseurain. 1995. *Ekoturisme sebagai Suatu Gejala yang Menyebar ke Seluruh Dunia*, dalam Lindberg, K. dan Hawkins, D.E., *Ekoturisme : Petunjuk*

- untuk Perencana dan Pengelola.* Jakarta. PACT dan ALAMI.
- Cernea, M. 1991. *Putting People First : Sociological Variables in Rural Development.* New York. Oxford University Press.
- Dalem, AAGR. 2002. *Ekowisata : Konsep dan Implementasinya di Bali.* Jurnal Ilmiah Dinamika Kebudayaan Vol !V No.3. Denpasar.LPM Universitas Udayana.
- Damanik, J dan Weber, Helmut F, 2006. *Perencanaan Ekowisata, , Dari Teori ke Aplikasi.* Yogyakarta. Andi Offset
- Faludi, Andreas. 1973. *Planning Theory.* Oxford. Pergamon Press.
- Fandeli, dkk. 2000. *Pengusahaan Ekowisata.* Yogyakarta . Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah mada.
- Fandeli, C. 2002. *Perencanaan Kepariwisata Alam.* Yogyakarta. Fakultas Kehutanan UGM.
- Fennel, D.A.1999. *Ecotourism : An Introduction..* Routlege, London and New York.
- Hadinoto, K. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata.* Jakarta: University of Indonesia Press.
- Haryanta, Agus. 2002. *Wisata Alam.* Makalah Pengelolaan Hutan Mangrove Lestari. Denpasar ; Pusat Informasi Mangrove.
- Hidayati, Deny, dkk. 2003.*Ekowisata : Pembelajaran dari Kalimantan Timur.* Jakarta. Pusat penelitian Kependudukan LIPI.
- Insula-International Scientific Council for Island Development, 1995. *Piagam Pariwisata Berkelanjutan (Charter for Sustainable Tourism),*[cited 2007 Maret 3]. Available from: URL:  
<http://www.insula.org/tourism/charte.htm>
- Kadt, D dan Emanuel.,1979. *Tourism: Passport to Development, Published for The World Bank and UNESCO,* Oxford University Press. New York.
- Kurnianingsih, A. 2007. *Ekowisata Kerakyatan, Memiliki Kembali Bali.* Denpasar. Jaringan Ekowisata Desa.

- Kurnianingsih, A.2008. *SIMULACRA BALI : Ambiguitas Tradisionalisasi Orang Bali*. Yogyakarta. INSISTPress.
- Laksono, dkk. 2000. *Perempuan di Hutan Mangrove, Kearifan Ekologis Masyarakat Papua*.Yogyakarta : Galang Press dan Yayasan Kehati.
- Lewaherilla, N.E. 2002 *Pariwisata Bahari Pemanfaatan Potensi Wilayah Pesisir dan Lautan*.Makalah Falsafah Sains. Program Pasca Sarjana/ S3.Bogor.
- Lindberg, K., 2002. *Tourism as a Development Path in The South*, dipresentasikan dalam Conference of Tourism in North/South Perspectives diselenggarakan oleh the North/South Coalition and Forum
- Mikkelsen, B. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan : Sebuah Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Manuaba, IB Adnyana. 2006. *Ecological Challenges to Sustainable Development of Bali*. Makalah Seminar Internasional.
- Maxwell, Joseph A. 1996. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. Thousand Oaks: sage Publication.
- McKinnon, J.K.1986.*Pengelolaan Kawasan yang dilindungi di Daerah Tropika*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Pendit, S.N. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.
- Poon, Aulina.1993.*Tourism, Tecnology &Competitive Strategies*, CAB Internasional
- Pitana, G. 1996. *Pelangi Kepariwisata Bali (Telaah dari gatra Sosiologis-Antropologis)*. Denpasar.
- Prajogo. 1977. *Pola Pariwisata dan Pola Perencanaan Pengembangan*. Makalah Lokakarya IV, Pengelolaan Perencanaan Pengembangan Regional. Yogyakarta. Program Studi; Perencanaan Pembangunan Regional UGM.
- Simatupang, G.R. Lono Lastoro. 1999. *Pariwisata dan Pengembangan Desa*. Modul Lokakarya Pendampingan Masyarakat Seni dan Budaya. Yogyakarta.
- Sudarto, Gatot. 1998. *Ekowisata (Ecotourism) Wahana Kegiatan*

*Ekonomi yang Berkelanjutan, Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecil Sektor Pariwisata. Masyarakat Ekowisata Indonesia.*

- Soekadijo, R.G. 2000, *Anatomi Pariwisata*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Suardika, I Wayan. 2005. *Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Danau Buyan – Tamblingan*. Tesis Program Pasca Sarjana. Denpasar. Universitas Udayana.
- Sudarto, Gatot. 1998. *Ekowisata, Wahana Kegiatan Ekonomi yang Berkelanjutan, Pelestarian Lingkungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kecil Sektor Pariwisata*, MEI.
- Wahab, S. 1988. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Witari, Made. 2005. *Studi Kearifan Ekologi Dalam Pengelolaan Kawasan Agrowisata Salak Sibetan di Kabupaten Karangasem Bali*. Tesis Program Pasca Sarjana. Denpasar. Universitas Udayana.
- Wood, M.E., 2002. *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability*, UNEP
- Western, D. 1995. Memberi Batasan Tentang Ekoturisme, dalam Lindberg, K. dan Hawkins, D.E., *Ekoturisme : Petunjuk untuk Perencana dan Pengelola*. Jakarta. PACT dan ALAMI.
- Yoeti, O.A.2000. *Ekowisata Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Pt.Pertja.
- Yoga Atmaja, Ida Bagus. 2002. *Ekowisata Rakyat ; Lika-Liku Ekowisata di Tenganan, Pelaga, Sibetan dan Nusa Ceningan*. Kuta. Wisnu Press.

## INDEKS

- A**
- A.J. Burkart 12
- Alternative tourism 15
- Amlapura 31, 35
- Auliana Poon 15
- awig-awig 25, 33, 49, 54, 125, 126
- B**
- Bakrie Nirwana Resort 4, 141
- Bali iii, iv, viii, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 23, 24, 26, 29, 30, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 70, 74, 85, 87, 91, 92, 100, 105, 106, 109, 110, 111, 124, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 148, 149, 150, 151
- Bali Age 8, 61, 67, 85
- Batubulan 29
- Belok Sidan 91, 131, 134
- Bogor 26, 159
- C**
- capacity building 28, 92, 144
- Chambers 9
- community based tourism 2, 3
- D**
- daerah tujuan wisata 153, 155
- Daerah Tujuan Wisata 153
- Deklarasi Quebec 17
- Denpasar 29, 31, 37, 38, 95, 106, 130
- development oriented 3
- E**
- Eplerwood 22
- F**
- Fandeli 16, 22, 158
- From 18
- G**
- Gianyar 5, 8, 29, 41, 166
- Gross Domestic Product 12
- H**
- Hindu 8, 12, 44, 56, 138
- I**
- Ida Ayu Mas v, 41
- Indonesia iv, vii, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 19, 20, 26, 45, 46, 59, 74, 78, 112, 136, 137

**J**

Jerman 44, 47, 51, 55

**K**

Kemenuh iii, v, vii, viii, 5, 8,  
29, 30, 31, 41, 42, 43, 44,  
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,  
55, 56, 57, 59, 60, 139,  
140, 141

Kiadan iii, v, vii, viii, 8, 9, 26,  
37, 38, 39, 89, 90, 91, 92,  
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,  
100, 101, 102, 104, 105,  
106, 108, 109, 110, 111,  
112, 114, 115, 116, 117,  
118, 119, 120, 121, 122,  
123, 124, 126, 127, 128,  
129, 130, 131, 132, 133,  
134, 135, 136, 137, 139,  
144, 145, 146, 147, 148

Klungkung 26, 29

**L**

Lembaga Swadaya Masyarakat  
5, 8, 26, 63, 91

**M**

Majapahit 8

Manggis 8, 31

Manuaba iv, 15, 159

Mas v, 29, 30, 41

Masyarakat Ekowisata Indo-  
nesia 5, 20

megabiodiversity 4

**P**

Pangosekan 29

pariwisata Bali 4, 6, 12, 15,

29, 106, 139

pariwisata budaya 4, 12

Participatory Rural Appraisal

9, 70, 94, 157

Payangan 4

Pembangunan Pariwisata

Berkelanjutan vii, 13

people oriented 3

Plaga vii, 8, 71, 76, 89, 115,

144

**R**

Reformasi 4, 142

Reklamasi 2, 148

**S**

Serangan 4, 141

S. Medlik 12

Sua Bali viii, 8, 10, 30, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

60, 139, 140, 141, 142

Sukawati 8, 29, 30, 41

Sungai Petanu 41

SWOT viii, 9, 41, 59, 60, 84,

86, 129, 131, 132, 133

**T**

Tanah Lot 4, 140, 141

Tenganan iii, iv, v, vii, viii,

8, 26, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 41, 61, 62, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,

80, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 94, 105, 139, 142,

143, 144, 146, 160

Tri Hita Karana 23, 26, 44

**U**

Ulakan 35

**W**

Wisata Ekologi 5

World Conservation Union 16

World Tourism Organization

1

**Y**

Yoeti 21, 160

## TENTANG PENULIS

**Nyoman Sukma Arida** lahir dan dibesarkan di Singapadu, Gianyar, Bali. Kini menjadi dosen di Jurusan Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Ia menyelesaikan pendidikan master di S2 Lingkungan Unud (2008) dan pendidikan doktoral Kajian Pariwisata di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2015.

Cukup lama berkecimpung di dunia NGO, khususnya yang terkait isu lingkungan, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal di Bali. Ia juga menjadi peneliti dan Ketua Pelaksana Yayasan Uluangkep, sebuah NGO di Gianyar Bali. Ayah dua orang putra dan putri telah menulis empat buah buku: 'Mengelola Konflik Batas Wilayah' (Uluangkep,2004), Seks dan Kehamilan Pranikah (PSKK UGM, 2005), *Pandora Bali* (2012), dan *Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri* (2016).



Pariwisata Bali kini tengah berada di persimpangan jalan. Kredo pariwisata massal yang mendominasi pariwisata Bali terbukti telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan social, kultur dan kondisi lingkungan Bali. Alih-alih mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di banyak desa-desa miskin yang tersebar di Bali, pariwisata malah kian melebarkan disparitas antar wilayah. Di tengah-tengah kegalauan tentang ambiguitas pariwisata tersebut sebuah pertanyaan layak diajukan; kemanakah arah perkembangan pariwisata Bali ke depan?

Ekowisata diharapkan dapat menjadi salah-satu alternatif jawabannya. Sebagai sebuah konsep dan wacana ekowisata telah diperdebatkan luas di berbagai komunitas akademis dan gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun sebagai sebuah eksperimen gerakan, jejak ekowisata masih sulit ditemukan. Buku ini menggambarkan potret dinamika dan analisis kritis perjalanan pengembangan ekowisata di tiga desa kuno Bali. Berbagai dinamika proses pengembangan, partisipasi lokal, dan tantangan yang saling berkelindan dipaparkan secara rinci dan kritis. Melalui penuturan pelaku-pelaku utamanya yang dibingkai dengan pendekatan partisipatoris, buku ini menjadi saksi bahwa di aras *grass root* masyarakat Bali ternyata mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhannya dan memiliki posisi tawar yang jelas.

ISBN 978-602-9320-85-5



9 786029 320855